

GRAND DESIGN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

KABUPATEN KULON PROGO 2018 – 2035



**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN KULON PROGO**

KATA PENGANTAR

Berbagai data kependudukan dan dinamikanya di Kabupaten Kulon Progo merupakan petunjuk bagi gambaran tentang kebijakan pembangunan di masa depan. Hasil proyeksi penduduk Kabupaten Kulon Progo 2018 – 2035 menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk telah berada pada tingkat yang rendah, dengan ditandai tingkat kelahiran dan kematian yang sama-sama rendah. Dalam hal ini migrasi masuk menjadi hal penting dalam hal perubahan jumlah penduduk. Setidaknya ada 3 hal penting yang perlu dicermati. *Pertama*, struktur penduduk telah berada pada struktur dewasa, dengan dominasi penduduk usia produktif. *Kedua*, kondisi penduduk pada struktur dewasa telah mencapai fase *window of opportunity* yang datang hanya sekali dan memberikan peluang untuk memperoleh bonus demografi. *Ketiga*, dinamika penduduk pada masa depan lebih ditentukan oleh faktor migrasi daripada kelahiran dan kematian. Ketiga hal tersebut telah menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan. Oleh karena itu dibutuhkan Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) untuk dijadikan arah bagi perumusan kebijakan dan program kependudukan di masa yang akan datang.

GDPK selain diperlukan sebagai arah bagi kebijakan kependudukan di masa depan, juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan pembangunan di Kabupaten Kulon Progo. GDPK adalah gambaran kuantitas dan kualitas penduduk pada masa kini untuk selanjutnya diproyeksikan pada masa depan. Terdapat lima pilar penting yang dibahas yakni pengendalian kuantitas, pengembangan kualitas, pembangunan keluarga, pengarahan mobilitas dan pembangunan basis data kependudukan. Diharapkan ke depan akan terwujud penduduk yang berkualitas sebagai modal pembangunan untuk mewujudkan Kabupaten Kulon Progo yang maju, mandiri dan sejahtera, berkelanjutan dan berbudaya. Secara operasional, grand design ini merupakan bagian integral dari pembangunan di berbagai bidang dalam rangka memerangi kemiskinan dan ketidakberdayaan.

Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, dokumen GDPK di Kabupaten Kulon Progo dapat diselesaikan. Oleh karena itu diucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi. Kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan dalam rangka penyempurnaan dokumen berikutnya.

Kulon Progo, 30 Juli 2018

Tim Penyusun GDPK

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
INTISARI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum	4
1.3 Visi	5
1.4 Misi	6
1.5 Arah Kebijakan	6
1.6 Tujuan	7
1.7 Sasaran	9
BAB II KONSEP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN	10
2.1 Kajian Teoritis.....	10
2.2 Konseptualisasi Grand Design Kependudukan	12
2.3 Kajian Yuridis Terhadap Sistem Registrasi Penduduk.....	14
2.4 Konseptualisasi Sistem Registrasi Penduduk.....	15
2.5 Konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Road Map	20
2.5.1 Pembangunan Berwawasan Kependudukan	20
2.5.2 Peta Jalan (Road Map)	23
BAB III KONDISI KEPENDUDUKAN KULON PROGO SAAT INI	22
3.1 Kuantitas Penduduk	22
3.2 Kualitas Penduduk	35

3.2.1	Pendidikan	31
3.2.2	Kesehatan	35
3.2.3	Ekonomi	42
3.2.3.1	Kemiskinan	42
3.2.3.2	Produk Domestik Regional Bruto	45
3.2.3.3	Inflasi	49
3.2.3.4	Indeks Gini	52
3.2.4	Ketenagakerjaan	53
3.2.5	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	56
3.2.6	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	57
3.2.7	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	60
3.2.7.1	Partisipasi dalam Bidang Legislatif	60
3.2.7.2	Partisipasi dalam Bidang Eksekutif	61
3.3	Pembangunan Keluarga	63
3.4	Persebaran dan Mobilitas Penduduk	68
3.5	Data dan Informasi Kependudukan	69
BAB IV	KONDISI KEPENDUDUKAN YANG DIINGINKAN	78
4.1	Kuantitas Penduduk	78
4.2	Kualitas Penduduk	80
4.3	Kondisi Keluarga	81
4.4	Persebaran dan Mobilitas Penduduk	81
4.5	Database Kependudukan	82
4.6	Permasalahan dan Tantangan	86
BAB V	KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN	89
5.1	Pengendalian Kuantitas Penduduk	89
5.2	Peningkatan Kualitas Penduduk	91
5.3	Pembangunan Keluarga	94
5.4	Pengarahannya Mobilitas Penduduk	97
5.5	Pembangunan Database Kependudukan	98

BAB VI	ROAD MAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN	101
6.1	Pengendalian Kuantitas Penduduk	101
6.2	Peningkatan Kualitas Penduduk	104
6.3	Pembangunan Keluarga	106
6.4	Pengarahannya Mobilitas Penduduk	107
6.5	Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan	109
BAB VII	PENUTUP	110
DAFTAR PUSTAKA		

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin Tahun 2010 – 2017 Di Kabupaten Kulon Progo	25
Tabel 3.2	Sebaran Penduduk Kulon Progo Menurut Jenis Kelamin	26
Tabel 3.3	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2013 – 2017 Di kabupaten Kulon Progo.....	27
Tabel 3.4	Banyaknya KK dan Rata-rata Jiwa dalam Keluarga Tahun 2010-2017 Di Kabupaten Kulon Progo.....	31
Tabel 3.5	Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016	32
Tabel 3.6	Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kulon Progo Berdasarkan Data SIAK Tahun 2016 – 2017	33
Tabel 3.7	Persentase Penduduk Kabupaten Kulon Progo dibandingkan dengan Kabupaten/Kota lain di DIY dan Daerah Tempat Tinggal	34
Tabel 3.8	Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Kulon Progo.....	35
Tabel 3.9	APK dan APM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010 – 2017	36
Tabel 3.10	Ketersediaan Sekolah dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2010 – 2017 Kabupaten Kulon Progo	37
Tabel 3.11	Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2010-2017 Kabupaten Kulon Progo	38
Tabel 3.12	Capaian Indikator Kesehatan Kab. Kulon Progo Tahun 2016 dan 2017.....	39
Tabel 3.13	Indikator Kesehatan Tahun 2010-2017 Kabupaten Kulon Progo.....	40
Tabel 3.14	Capaian Indikator Kesehatan Tahun 2010-2017 Kabupaten Kulon Progo	41
Tabel 3.15	Persentase Kemiskinan Tahun 2008-2016 Kabupaten Kulon progo	43
Tabel 3.16	Sebaran Keluarga Miskin di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2016	45
Tabel 3.17	Laju Pertumbuhan PDRB 2010 – 2014 Kabupaten Kulon Progo	46
Tabel 3.18	PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah) 2011-2016.....	47
Tabel 3.19	PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha tahun 2010-2016.....	48

Tabel 3.20	PDRB Perkapita Tahun 2010-2014 Kabupaten Kulon Progo.....	49
Tabel 3.21	Nilai Inflasi Rata-rata Tahun 2010-2014 Kabupaten Kulon Progo.....	51
Tabel 3.22	Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2010-2014 Kabupaten Kulon Progo.....	52
Tabel 3.23	Indeks Gini Tahun 2010-2014 Kabupaten Kulon Progo.....	53
Tabel 3.24	Penduduk dan Angkatan Kerja Tahun 2013-2017 Kab. Kulon Progo	54
Tabel 3.25	Penduduk Berumur 15 Tahun ke atas yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2014 Kabupaten Kulon Progo.....	55
Tabel 3.26	Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2012-2017 Kab. Kulon Progo	56
Tabel 3.27	Indikator Penyusunan IPM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2013-2017	57
Tabel 3.28	Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Progo Tahun 2015-2016.....	59
Tabel 3.29	Indeks Pembangunan Gender (IPG) DIY Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2015-2016	59
Tabel 3.30	Capaian IPM dan IPG Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010-2017.....	60
Tabel 3.31	Banyaknya Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010-2014 dan 2014-2019	61
Tabel 3.32	Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Kulon Progo Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 dan 2017	61
Tabel 3.33	Jumlah Pejabat menurut Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Kulon Progo.....	62
Tabel 3.34	Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Lapangan Pekerjaan Utama Kepala Keluarga di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017	66
Tabel 3.35	Persentase Keluarga Miskin Menurut Kecamatan dan Lapangan Pekerjaan Utama Kepala Keluarga di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017.....	67
Tabel 3.36	Migrasi Bersih Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 dan 2017	69
Tabel 6.1	Road Map Pengendalian Kuantitas Penduduk Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018 – 2035	104
Tabel 6.2	Road Map Indikator Pendidikan Kab. Kulon Progo Tahun 2018-2035	105

Tabel 6.3	Road Map Peningkatan Kualitas Kesehatan Penduduk Kabupaten Kulon Progo tahun 2018 – 2035	105
Tabel 6.4	Road Map Peningkatan Kualitas Ekonomi Penduduk Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2035	106
Tabel 6.5	Road Map Pembangunan Keluarga Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2035	106
Tabel 6.6	Road Map Pengarahan Mobilitas Penduduk Kabupaten Kulon Progo Tahun 2018-2035	108
Tabel 6.7	Road Map Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan Tahun 2018-2035	109

DAFTAR GAMBAR

1.	Skema Tujuan Pembangunan Kependudukan Kulon Progo.....	8
2.	Perkembangan IPG Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011-2015.....	58
3.	Data Dasar (Database) kependudukan di Indonesia	72

Intisari

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, maka pengendalian kuantitas penduduk secara seimbang dan pembangunan kualitas keluarga mutlak harus dilakukan, sehingga diharapkan penduduk akan menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional serta mampu bersaing dengan bangsa lain. Pengendalian kuantitas dilakukan melalui upaya pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian dan pengarahannya mobilitas penduduk, sedangkan pembangunan kualitas dilakukan melalui peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan.

Pertumbuhan penduduk di Kulon Progo dalam rentang waktu 1971-2010 cenderung menurun. Hanya pada tahun 1971-1980 jumlah penduduk mengalami peningkatan tetapi setelahnya justru mengalami penurunan terlebih pada rentang waktu 1990-2000. Namun pada rentang waktu 2000-2010 dan seterusnya mulai mengalami peningkatan seiring dengan peningkatan *Total Fertility Rate* (TFR) dan migrasi masuk. Jika dicermati secara lebih mendalam terdapat beberapa persoalan penting dalam hal pembangunan kependudukan yang perlu mendapat perhatian serius. Pertama, telah mulai dimasukinya era Bonus Demografi pada tahun 2014 yang ditandai dengan besarnya rasio ketergantungan yang kurang dari 50 yakni 49,72 yang artinya setiap 100 penduduk usia produktif menanggung beban tanggungan sebanyak 49 orang tidak produktif. Kedua, kebijakan kependudukan di Kulon Progo belum sepenuhnya menjadi bagian integral dari kebijakan pembangunan. Dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah Kulon Progo 2017-2022 belum menempatkan pembangunan kependudukan sebagai salah satu misi. Ketiga, pencapaian Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) di Kulon Progo

belum diikuti dengan penurunan angka kemiskinan yang berkelanjutan. Selama tahun 2011-2015 angka kemiskinan turun dari 24,64% menjadi 13,11% namun pada tahun 2016 meningkat lagi menjadi 14,48%. Berangkat dari ketiga persoalan mendasar tersebut, sekaligus harus dijadikannya penduduk sebagai modal dasar dan faktor dominan dalam pembangunan berkelanjutan, maka perlu adanya upaya penyusunan GDPK untuk dijadikan arah bagi perumusan kebijakan dan program kependudukan di Kulon Progo pada masa yang akan datang. GDPK merupakan dokumen perencanaan strategis urusan kependudukan yang memuat arah, kebijakan, strategi dan program jangka pendek, menengah dan jangka panjang rentang waktu 2018-2035 untuk menjadi panduan dalam pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk.

Rumusan visi dari GDPK adalah terwujudnya penduduk Kulon Progo yang berkualitas, maju, mandiri, sejahtera, berkarakter dan berbudaya serta berdaya saing berdasarkan iman dan taqwa. Untuk mewujudkannya, ada beberapa misi yang dicanangkan sebagai berikut:

1. Mewujudkan penduduk yang berkualitas secara ekonomi, sosial dan budaya, berdaya saing berlandaskan iman dan taqwa.
2. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan yang terintegrasi, serasi dan selaras dengan berbagai urusan pembangunan.
3. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang didasarkan pada keseimbangan pertumbuhan penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk.
4. Membangun komitmen para pemangku kepentingan terhadap upaya pengendalian kuantitas penduduk dan pembangunan kualitas keluarga.

Sebagai upaya untuk mewujudkan visi dan misi tersebut, berbagai kebijakan disusun secara terpadu dan berkesinambungan. Arah kebijakan pokok yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Mengelola pengendalian kuantitas penduduk untuk menekan laju pertumbuhan penduduk secara seimbang dan terkendali, dengan cara mengatur kelahiran, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
2. Meningkatkan kualitas penduduk atau kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya dan penguatan karakter masyarakat.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kualitas angkatan kerja, penyediaan lapangan kerja, peningkatan jejaring perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat dan desa.
4. Meningkatkan kualitas, kesejahteraan dan ketahanan keluarga dalam rangka pembangunan keluarga secara terintegrasi dan berkesinambungan.
5. Mengatur persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan upaya pendekatan pembangunan secara merata secara kewilayahan dan regional.
6. Mengembangkan data kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya, yang terintegrasi dalam satu sistem informasi serta dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan secara valid.

Jumlah dan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Sensus Penduduk Tahun 2010 adalah 388.869 jiwa dengan laju pertumbuhan 0,48% per tahun apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota di DIY tergolong rendah. Namun hal ini lebih disebabkan oleh banyaknya migrasi keluar, sementara TFR nya masih cukup tinggi (2,22). Implikasi kebijakan dari fenomena ini adalah dengan melakukan revitalisasi program pengendalian penduduk seperti Program Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga dan Penanganan Mobilitas. Salah satu upaya yang dilakukan adalah memperkuat kelembagaan di Kabupaten Kulon Progo, menyediakan Sumber Daya Manusia (SDM) program yang memadai terutama di tingkat lini lapangan, serta menyediakan sarana prasarana dan anggaran yang mencukupi. Salah

satu sasarnya adalah meningkatkan pencapaian program seperti tertuang dalam road map setiap periode, termasuk dalam rangka memperkecil disparitas antara perdesaan dan perkotaan (wilayah perbatasan dengan kota).

Potensi bonus demografi akan berlangsung sejak tahun 2014 dan terus berlanjut hingga 2035. Bonus demografi tersebut mencapai puncaknya pada periode 2020-2025 yakni fase jendela peluang yakni fase jendela peluang (*window of opportunity*). Pada periode tersebut, angka ketergantungan menjadi terendah sepanjang masa, yaitu sebesar 45 persen. Untuk mengantisipasi "*window of opportunity*" ini maka kebijakan yang perlu diambil adalah penyediaan lapangan kerja, peningkatan ketrampilan dan kualitas SDM serta mempersiapkan kaum perempuan untuk memasuki angkatan kerja. Hal yang penting untuk diperhatikan pula terkait dengan fase bonus demografi adalah tingginya jumlah penduduk pada kategori remaja. Implikasi kebijakan yang perlu diambil berkaitan dengan jumlah remaja yang besar ini adalah menyiapkan mereka sebagai generasi penerus bangsa. Untuk itu kualitas baik yang menyangkut pendidikan maupun kesehatannya (termasuk kesehatan reproduksinya) harus memperoleh perhatian yang serius.

Selain persentase penduduk usia kerja dan remaja yang besar, kelompok penduduk usia 65 tahun ke atas juga meningkat secara signifikan. Fenomena "aging population" di Kulon Progo telah terjadi dan menjadi masalah utama sebagaimana dihadapi di negara-negara maju. Proporsi kelompok ini cenderung meningkat, telah mencapai 12,7 persen pada 2017 dan terus meningkat menjadi sekitar 16,91 persen pada tahun 2035. Implikasi kebijakan dari fenomena ini adalah upaya-upaya untuk kaum lansia ini dapat hidup lebih sejahtera, melalui antara lain pelayanan program-program dan kegiatan yang lebih ramah lansia.

Berdasarkan aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata, tidak hanya terkonsentrasi dengan kecamatan-kecamatan di wilayah dataran saja. Demikian juga halnya dengan urbanisasi, diharapkan

prosesnya dapat terjadi disemua arah, di semua kecamatan. Patut disadari bahwa kecamatan-kecamatan yang berada di Perbukitan Menoreh memiliki tingkat urbanisasi yang rendah.

Pembangunan kependudukan dari sisi kuantitas telah pula selaras dengan pembangunan kualitas penduduk baik dalam aspek kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan dan mental spiritual. Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada unsur pendidikan, kesehatan dan ekonomi.

Berbagai arahan kebijakan pembangunan kependudukan telah dituangkan dalam GDPK Kabupaten Kulon Progo 2018-2035. Namun demikian, tantangan besar persoalan kependudukan di Kabupaten Kulon di masa mendatang adalah TFR yang masih tinggi, tingkat migrasi masuk yang akan meningkat pesat seiring dengan keberadaan *New Yogyakarta International Airport* (NYIA) dan keberhasilan pembangunan di Kulon Progo, serta tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi yang belum optimal. Penting untuk mewujudkan keselarasan potensi bonus demografi dengan produktivitas tenaga kerja yang tinggi. Kunci utama untuk mewujudkannya terletak pada kualitas SDM sebagai modal dasar pembangunan.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penduduk merupakan komponen atau aspek yang strategis dalam mendorong dinamika kemajuan daerah dan bangsa, sehingga keberadaannya merupakan modal dasar pembangunan. Penduduk yang berkualitas, pertumbuhan kuantitas yang terkendali sesuai dengan daya dukung alam dan lingkungan, akan sangat mendorong adanya akselerasi kemajuan, namun sebaliknya kualitas penduduk yang jauh dari harapan dan kebutuhan serta pertumbuhan kuantitas penduduk yang tidak terkendali terhadap daya dukung alam dan lingkungan, diprediksikan akan menjadi sumber permasalahan dalam berbagai sektor kehidupan. Untuk itu diperlukan kondisi penduduk yang ideal baik dari aspek kualitas, kuantitas dibandingkan dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan.

Perhatian serius terhadap aspek kependudukan dalam pembangunan, akan melahirkan kemajuan yang dicapai dalam pembangunan akan selaras, serasi, seimbang dan punya nilai keberlanjutan (*sustainable*). Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya tampung alam dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa. Pembangunan berkelanjutan sebagai suatu konsep, wawasan, orientasi dan paradigma dalam membangun, saat ini telah menjadi kesadaran semua pihak dan telah dituangkan dalam kebijakan pemerintah.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas perlu dilakukan berbagai program antara lain pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahannya mobilitas

penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan.

Penduduk adalah modal dasar pembangunan, juga merupakan titik sentral dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Jumlah penduduk ideal sesuai dengan daya dukung lingkungan, laju pertumbuhan terkendali diikuti dengan kualitas tinggi adalah modal bagi keberhasilan pembangunan. Sebaliknya keberhasilan pembangunan dapat menjadi dasar bagi terkontrolnya jumlah, laju pertumbuhan dan kualitas penduduk. Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa kemajuan suatu daerah sebagian besar ditentukan oleh kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Dua komponen pokok kependudukan yang penting dikaji adalah proses kependudukan dan struktur kependudukan. Proses kependudukan mencakup aspek kelahiran, kematian dan mobilitas penduduk. Struktur kependudukan mencakup aspek komposisi antara lain komposisi penduduk menurut umur, jenis kelamin, status perkawinan, dan lain-lain. Hasil dari dua komponen baik proses maupun struktur adalah dasar bagi proses pembangunan secara keseluruhan.

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, bahwa dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas perlu dilakukan berbagai program antara lain pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas penduduk, pengembangan kualitas penduduk pada seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, penyiapan dan pengaturan perkawinan serta kehamilan.

Pada tahun 2017 ini Kabupaten Kulon Progo memiliki jumlah penduduk 446.028 jiwa yang terdiri dari laki-laki berjumlah 221.380 jiwa dan perempuan berjumlah 224.648 jiwa.

Adapun Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) Kabupaten Kulon Progo pada angka 0,48 persen per tahun berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010, sementara laju pertumbuhan penduduk DIY sebesar 1,04 persen dan pertumbuhan penduduk nasional sebesar 1,49 persen per tahun, sehingga laju pertumbuhan Kulon Progo masih di bawah DIY dan nasional. Namun beberapa tahun terakhir, LPP Kulon Progo memiliki peningkatan yang cukup pesat, yakni dalam kisaran 1,6 persen per tahun. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017 adalah 760,77 jiwa per km²

Di lihat dari komposisi penduduk, pada tahun 2017 jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 319.008 jiwa, usia non produktif 0-14 tahun 90.432 jiwa dan 65 tahun ke atas 56.588 jiwa. Dari data tersebut dapat diketahui bahwa rasio ketergantungan di Kulon Progo pada tahun 2017 adalah 46,1. Artinya, pada saat ini setiap 100 penduduk usia produktif di Kulon Progo menanggung 46 orang usia tidak produktif.

Dengan demikian, Kabupaten Kulon Progo saat ini, meskipun masih dihadapkan pada Total Fertility Rate (TFR) yang cukup tinggi yaitu sebesar 2,22 berdasarkan Sensus Penduduk 2010 namun telah mencapai era bonus demografi berupa kesempatan untuk mencapai pertumbuhan dan kondisi ekonomi optimal. Kulon Progo telah mencapai apa yang disebut dengan *demographic dividen* yaitu keuntungan optimal yang diperoleh dari kondisi struktur demografi yang telah stabil. Penduduk pada fase ini betul-betul dapat menjadi sumber daya manusia yang tangguh bagi pembangunan dan ketahanan nasional. Pertanyaan besar adalah kapan dan bagaimana mewujudkan penduduk tumbuh seimbang tersebut. Oleh karenanya, perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga harus mendapat perhatian khusus dalam kerangka pembangunan nasional yang berkelanjutan. Untuk pelaksanaannya diperlukan suatu grand gesign atau rancangan induk pengendalian kuantitas penduduk agar kondisi penduduk tumbuh seimbang segera terwujud.

Hal pokok yang perlu dikondisikan agar struktur penduduk seimbang dapat terwujud adalah kepedulian semua pihak, baik unsur pemerintah, sektor swasta maupun unsur masyarakat. Melalui kerja sama sinergis semua pihak, terintegrasi dan berkesinambungan serta sejalan dengan semangat otonomi daerah, implementasi prinsip “Pembangunan Berwawasan Kependudukan” secara konsisten dan berkelanjutan merupakan paradigma yang tidak dapat ditawar lagi. Lebih dari itu dengan menggabungkan amanat Undang-Undang No 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, telah memberikan gambaran bahwa aspek-aspek kependudukan beserta matranya dan lingkungan hidup, maka untuk masa depan perlu digaungkan prinsip “Pembangunan Berwawasan Kependudukan yang Berkelanjutan”.

Sebagai kesimpulan, diperlukan suatu rencana besar yang memuat kebijakan dan program operasional baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang yang mampu menjadi dasar dan tolok ukur pembangunan kependudukan. Untuk itu perlu dibuat rancangan induk pembangunan kependudukan dalam bentuk Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kulon Progo. Arah dan target capaian pengendalian penduduk adalah pilar utama dalam rancangan induk tersebut.

1.2 Dasar Hukum

Beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum dalam penyusunan Grand Design Pembangunan Kependudukan Kabupaten Kulon Progo adalah sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (Pembukaan, Pasal 28B, Pasal 33 dan Pasal 34)
- b) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan
- c) Undang-Undang No 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia
- d) Undang-Undang No 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (HAM)

- e) Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- f) Undang-Undang-Undang No 7 Tahun 2004 tentang Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan
- g) Undang-Undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
- h) Undang-Undang No 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional
- i) Undang-Undang No 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI
- j) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Undang-Undang 24 Tahun 2013.
- k) Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJMN 2005 – 2025)
- l) Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
- m) Undang-Undang 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga
- n) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- o) Undang-Undang No 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- p) Undang-Undang No 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta
- q) Instruksi Presiden No 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional
- r) Instruksi Presiden No 3 Tahun 2010 tentang Pembangunan yang Berkeadilan
- s) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 153 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan
- t) Peraturan Presiden Republik Indonesia No 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019

1.3 Visi

Terwujudnya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, berkarakter, berkualitas, berbudaya, berdaya saing berlandaskan iman dan taqwa.

1.4 Misi

1. Mewujudkan sumberdaya manusia yang sehat, berprestasi, mandiri, berkarakter dan berbudaya.
2. Menciptakan sistem perekonomian yang berbasis kerakyatan
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam lingkungan kehidupan yang aman, tertib dan tenteram.
4. Mewujudkan pembangunan berbasis kawasan dengan mengoptimalkan sumber daya alam dan didukung oleh teknologi serta infrastruktur yang berkualitas.
5. Mewujudkan pembangunan yang berwawasan kependudukan yang terintegrasi, serasi dan selaras dengan berbagai urusan pembangunan.
6. Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yang didasarkan pada keseimbangan pertumbuhan penduduk sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahan mobilitas penduduk.
7. Membangun komitmen para pemangku kepentingan terhadap upaya pengendalian kuantitas penduduk dan pembangunan kualitas keluarga.

1.5 Arah Kebijakan

1. Meningkatkan kualitas penduduk atau kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan derajat kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya dan penguatan karakter masyarakat

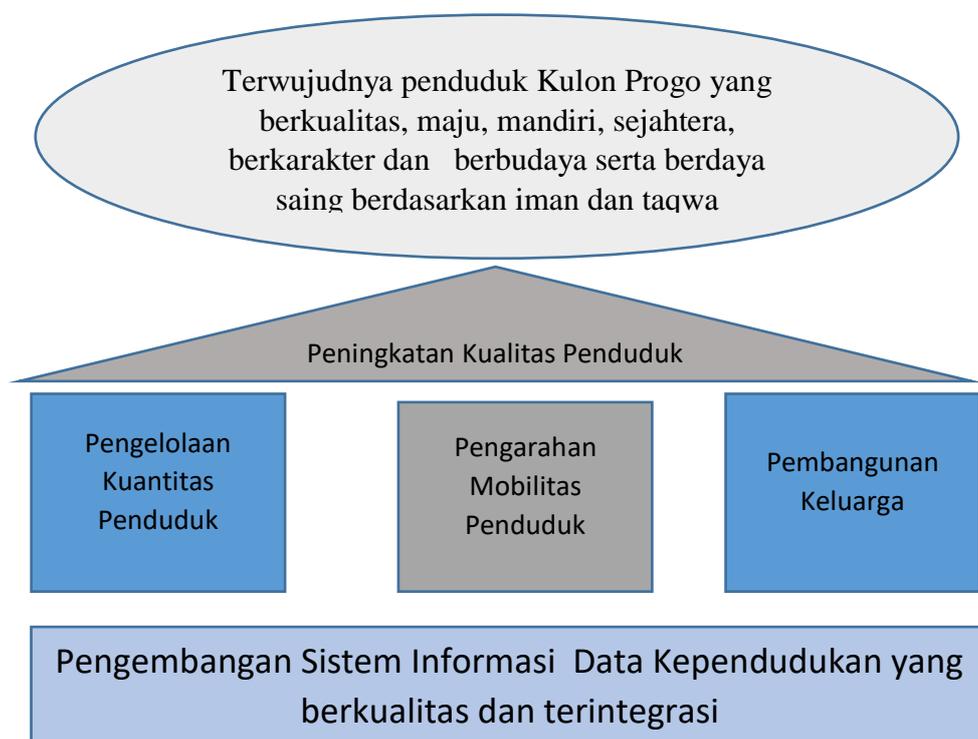
2. Mengelola pengendalian kuantitas penduduk untuk menekan laju pertumbuhan penduduk secara seimbang dan terkendali, dengan cara mengatur kelahiran, meingkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan reproduksi dan keluarga berencana.
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui peningkatan kualitas angkatan kerja, penyediaan lapangan kerja, peningkatan jejaring perluasan kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat dan desa.
4. Meningkatkan kualitas, kesejahteraan dan ketahanan keluarga dalam rangka pembangunan keluarga secara terintegrasi dan berkesinambungan.
5. Mengatur persebaran dan mobilitas penduduk secara lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan upaya pendekatan pembangunan secara merata secara kewilayahan dan regional.
6. Mengembangkan data kependudukan yang akurat dan dapat dipercaya, yang terintegrasi dalam satu sistem informasi serta dapat dimanfaatkan sebagai dasar bagi pengambilan keputusan secara valid.

1.6 Tujuan

- a. Mewujudkan kualitas penduduk dalam berbagai aspek : kesehatan, pendidikan, sosial, budaya berlandaskan iman dan taqwa, sehingga mampu berdaya saing dalam menghadapi tantangan kemajuan ;
- b. Mewujudkan kuantitas penduduk yang ideal, serasi dan seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
- c. Mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang didasarkan pada wawasan kependudukan dan lingkungan

- d. Mewujudkan kesejahteraan penduduk melalui penanggulangan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja dan penyediaan lapangan kerja.
- e. Mewujudkan pengarahannya mobilitas penduduk secara merata antar wilayah kecamatan.
- f. Mewujudkan keluarga yang berketahanan, sejahtera, sehat, maju, mandiri dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender serta mampu merencanakan sumber daya keluarga
- g. Mewujudkan tercapainya bonus demografi melalui pengendalian kuantitas dan peningkatan kualitas penduduk
- h. Mewujudkan data dan informasi kependudukan yang akurat (valid) dan dapat dipercaya serta terintegrasi melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan.

Secara konseptual, kerangka berpikir pembangunan kependudukan selama 2018-2035 dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.1. Skema Kerangka Berpikir Pembangunan Kependudukan Kulon Progo Tahun 2018-2035

1.7 Sasaran

1. Terwujudnya pembangunan berwawasan kependudukan untuk meningkatkan kualitas penduduk dalam rangka mencapai pembangunan berkelanjutan
2. Pencapaian bonus demografi melalui pengelolaan kuantitas penduduk dengan cara pengendalian angka kelahiran, penurunan angka kematian, dan pengarahannya mobilitas penduduk sejalan dengan pembangunan kualitas di bidang pendidikan, kesehatan dan produktivitas
3. Terwujudnya keluarga berkualitas yang memiliki ciri ketahanan sosial, ekonomi dan berbudaya tinggi serta berlandaskan iman dan taqwa.
4. Pembangunan database kependudukan melalui pengembangan sistem informasi data kependudukan yang akurat, dapat dipercaya dan terintegrasi

BAB II

KONSEP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

2.1 Kajian Teoritis

Ada beberapa alasan pemikiran, kependudukan merupakan isu strategis dalam kerangka pembangunan nasional: *pertama*, kependudukan atau dalam hal ini penduduk merupakan pusat dari seluruh kebijakan dan program yang dilakukan; *kedua*, keadaan atau kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan yang dilakukan pemerintah; *ketiga*, dampak perubahan dinamika kependudukan baru akan terasa dalam jangka yang panjang; *keempat*, karena luasnya cakupan masalah kependudukan. Analisis mengenai kependudukan dalam pembangunan nasional harus dilihat pada tataran kebijakan dan implementasi. Pada tataran kebijakan, analisis diarahkan untuk melihat sampai seberapa jauh pemerintah dalam mengintegrasikan isu-isu kependudukan dalam kebijakan pembangunan nasional. Selanjutnya, pada tataran implementasi dapat dilihat seberapa jauh kebijakan tersebut diimplementasikan dalam program-program sektoral (Tjiptoherijanto, 2001).

Pembangunan kependudukan adalah upaya mewujudkan sinergi, sinkronisasi, dan harmonisasi pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, penataan persebaran dan pengarahannya mobilitas, serta penataan administrasi kependudukan. Secara garis besar pembangunan kependudukan meliputi 5 (lima) aspek penting, yaitu: *Pertama*, berkaitan dengan kuantitas penduduk, antara lain: jumlah, struktur dan komposisi penduduk, laju pertumbuhan penduduk, serta persebaran penduduk. *Kedua*, berkaitan dengan kualitas penduduk yang berhubungan dengan status kesehatan dan angka kematian, tingkat pendidikan, dan angka kemiskinan. *Ketiga* adalah mobilitas penduduk, seperti tingkat migrasi yang mempengaruhi persebaran penduduk antar wilayah, baik antar pulau maupun antara perkotaan dan perdesaan. *Keempat* adalah data dan informasi penduduk dan *kelima* adalah

penyerasian kebijakan kependudukan. Pembangunan Kependudukan dan KB di Indonesia harus benar - benar dapat memanfaatkan jendela peluang demografi untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pengendalian kuantitas dan laju pertumbuhan penduduk berkaitan dengan penetapan jumlah, struktur, komposisi, dan pertumbuhan penduduk yang ideal melalui upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian yang diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara jumlah, struktur, dan komposisi penduduk yang serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Daya dukung bagi penduduk adalah jumlah penduduk yang dapat didukung oleh satuan sumber daya dan lingkungan dalam keadaan penduduk sejahtera (Suriatmadja dalam Tukiran 2001). Daya dukung suatu wilayah tidak merupakan besaran yang tetap, dapat berubah menurut waktu dan masukan yang ada. Daya dukung berhubungan dengan kebutuhan manusia pada tingkat tertentu, ada yang didasarkan pada Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) dan ada pula yang sampai pada tingkat kesejahteraan tertentu.

Peningkatan kualitas penduduk diarahkan untuk mempersiapkan dan membentuk sumber daya manusia agar menjadi kekuatan pembangunan nasional dan ketahanan nasional, bukan menjadi beban yang dapat menimbulkan implikasi permasalahan sosial. Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak.

Pengarahannya mobilitas penduduk dan penyebaran penduduk untuk mencapai persebaran penduduk yang optimal didasarkan pada keseimbangan antara jumlah penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengarahannya mobilitas mencakup upaya

menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah. Keserasian ini disamping akan mendorong kemajuan antar daerah, antar desa dan kota secara merata, diharapkan dapat mencegah terjadinya ketimpangan atau disparitas antar kelompok masyarakat dan antar wilayah. Pengarahan mobilitas penduduk, dilakukan dengan kebijakan yang tepat dan terintegrasi, baik dukungan lahan, wilayah, intervensi penguatan ekonomi dan penyediaan pelayanan sosial.

Sistem informasi kependudukan diarahkan untuk terciptanya pemahaman dan dukungan data kependudukan bagi seluruh sektor pembangunan yang terkait dengan masalah kependudukan. Dalam pengembangan informasi kependudukan perlu dibangun suatu jaringan informasi yang lengkap, valid dan selalu *update*, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pengambilan keputusan strategis dan dapat diandalkan. Terciptanya sistem informasi kependudukan yang demikian dapat terjadi manakala langkah awal kegiatan dari administrasi kependudukan berjalan lancar.

2.2 Konseptualisasi Grand Design Kependudukan

Grand Design Pembangunan Kependudukan di Kulon Progo merupakan arahan kegiatan dalam tahapan lima tahunan pembangunan kependudukan Indonesia dengan melihat target pencapaian sampai dengan tahun 2035. Penduduk mempunyai tiga matra pokok, yaitu aspek kuantitas, kualitas, serta mobilitas penduduk. Disamping ketiga matra ini, ada aspek pendukung lain yaitu administrasi kependudukan. Mendasarkan Peraturan Presiden Nomor 153 Tahun 2014 Tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan, terdapat lima bidang yang akan menjadi kajian dalam Grand Design Pembangunan Kependudukan, yaitu :

1. Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pengendalian kuantitas dilakukan dengan pengaturan fertilitas (kelahiran) dan penurunan mortalitas.

2. Peningkatan Kualitas Penduduk

Peningkatan kualitas penduduk dilakukan mencakup bidang kesehatan, pendidikan, agama, ekonomi, dan sosial budaya. Peningkatan kualitas penduduk berkaitan dengan upaya menjadikan penduduk sebagai sumber daya manusia melalui pembangunan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME, pengembangan kualitas fisik, dan pengembangan kualitas non fisik untuk mewujudkan produktifitas dan ketahanan penduduk, khususnya terhadap kelompok anak, remaja, dewasa, usia lanjut, wanitta, penduduk dan masyarakat rentan.

3. Pembangunan Keluarga

Pembangunan Keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa

4. Penataan Persebaran dan Pengaturan Mobilitas Penduduk

Penataan Persebaran Penduduk adalah upaya menata persebaran penduduk agar serasi dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan serta sesuai dengan rencana tata ruang wilayah

5. Penataan administrasi Kependudukan

Penataan administrasi kependudukan dilakukan dengan penataan dan pengelolaan data base kependudukan serta penataan dan penerbitan dokumen kependudukan. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan

dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Dokumen Grand Design Pembangunan Kependudukan mencakup lima bidang pembangunan sampai tahun 2035 sehingga dapat diperoleh gambaran yang jelas langkah-langkah yang perlu diambil.

2.3 Kajian Yuridis Terhadap Regulasi Administrasi Kependudukan

Pengaturan terhadap administrasi kependudukan dalam regulasi pada dasarnya untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk Indonesia dan Warga Negara Indonesia yang berada di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang tentang Administrasi Kependudukan ini memuat pengaturan dan pembentukan sistem yang mencerminkan adanya reformasi di bidang Administrasi Kependudukan. Salah satu hal penting adalah pengaturan mengenai penggunaan Nomor Induk Kependudukan (NIK). NIK adalah identitas Penduduk Indonesia dan merupakan kunci akses dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan. Sebagai kunci akses dalam pelayanan kependudukan, NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap Penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh Dokumen Kependudukan.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

- a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;

- b. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
- c. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
- d. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
- e. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Salah satu tahapan yang penting dalam penyusunan dokumen administrasi kependudukan adalah pendaftaran atau registrasi penduduk. Pendaftaran atau registrasi Penduduk pada dasarnya menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pendaftaran Penduduk didasarkan pada asas domisili atau tempat tinggal atas terjadinya Peristiwa Kependudukan yang dialami oleh seseorang dan/atau keluarganya. Pencatatan Sipil pada dasarnya juga menganut stelsel aktif bagi Penduduk. Pelaksanaan Pencatatan Sipil didasarkan pada asas peristiwa, yaitu tempat dan waktu terjadinya Peristiwa Penting yang dialami oleh dirinya dan/atau keluarganya.

Ada beberapa alasan mengapa data registrasi penduduk sangat penting :

- a. Registrasi penduduk merupakan satu-satunya sumber data yang pengumpulannya secara khusus dari seluruh peristiwa yang bersifat kontinyu sehingga dinamika kependudukan dapat dikaji setiap waktu. Hal ini sangat bertolak belakang dengan sensus penduduk yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali dan survai nasional yang dalam banyak kasus dilakukan setiap tahun misalnya Susenas dan Sakernas atau tiga tahun seperti survai Demografi dan kesehatan Indonesia dengan model sample yang jumlahnya terbatas.
- b. Data demografi yang terkait dengan kejadian vital yang berasal dari registrasi penduduk bersifat langsung dan sangat lengkap. Hal ini selain bermanfaat untuk melakukan

pengukuran demografis secara langsung, juga akan membantu pemerintah atau akademi untuk memahami setiap perubahan angka demografi dan dapat digunakan untuk perumusan kebijakan lebih lanjut

- c. Cakupan data registrasi penduduk bersifat multi level sejak tingkat nasional sampai dengan tingkat desa. Bahkan untuk keperluan tertentu dapat direpresentasikan dalam level yang lebih rendah dari desa. Pada akhirnya dengan kelebihan-kelebihan tersebut data registrasi merupakan data yang paling dibutuhkan untuk perencanaan kependudukan dan pembangunan.

2.4 Konseptualisasi Sistem Registrasi Penduduk

Data yang menyangkut penduduk dengan berbagai karakteritiknya merupakan salah satu data pokok yang amat diperlukan untuk perencanaan pembangunan di segala bidang misalnya : kebutuhan akan sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, dan lain-lain. Setiap bidang pembangunan membutuhkan karakteristik pokok penduduk yang rinci seperti: Susunan umur, persebaran penduduk, jenis kelamin, tingkat pendidikan, tingkat kesehatan, dan sebagainya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut sudah barang tentu harus tersedia data penduduk secara kesinambungan, tepat waktu, akurat, dan sederet persyaratan lain melalui pengumpulan data dari berbagai sumber.

Registrasi penduduk merupakan pencatatan yang terus menerus mengenai kejadian vital (*vital events*) yang dialami penduduk berupa kelahiran, kematian, dan perpindahan. Registrasi penduduk yang utamanya didasarkan pada Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1977 ini yang dimaksud untuk membangun suatu sistem pencatatan penduduk yang berlaku menyeluruh dan seragam di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut dilakukan melalui kewajiban menggunakan kartu keluarga, Kartu Penduduk, dan pelaporan dari setiap kejadian vital pada lingkup keluarga bersangkutan. Pada registrasi penduduk ini boleh dikatakan

bahwa konsep yang di terapkan adalah *de jure*, dalam arti penduduk akan dicatat secara resmi apabila ia telah memenuhi syarat tertentu untuk menjadi penduduk suatu wilayah/daerah pendaftaran kelurahan. Tingkat cakupan data penduduk yang diperoleh akan sangat tergantung kepada kesadaran masyarakat untuk melaporkan kejadian vital (kelahiran,kematian, dan perpindahan) yang terjadi di dalam keluarga. Di negara-negara maju, pengumpulan data penduduk melalui registrasi ini umumnya tidak banyak menemui masalah dan hambatan. Sebaliknya pada negara-negara berkembang seperti Indonesia, pada umumnya data yang di cakup masih “*under reported*” dan tidak cukup rinci serta kualitasnya kurang memadai untuk berbagai analisis kependudukan, sehingga tidak dapat dielakkan lagi pada umumnya para ahli kependudukan masih mendasarkan analisisnya pada angka hasil sensus penduduk atau survai di bidang kependudukan. Diharapkan dengan penerangan yang intensif kepada masyarakat tentang pentingnya pelaporan kejadian vitas yang terjadi di rumah tangganya, keterbukaan dan penyempurnaan pelayanan, serta mungkin penyempurnaan berbagai peraturan yang selama ini ada akan memberikan hasil pencatatan penduduk yang lebih baik. Data yang dihasilkan akan dapat digunakan sebagai pembanding dan pelengkap series data kependudukan, baik dari hasil survai maupun sensus.

Keterbukaan informasi publik adalah bentuk perubahan tata kelola pemerintahan yang demokratis dan transparan sesuai dinamika masyarakat. Institusi publik terutama pemerintah harus membuka dirinya agar sesuai dengan amanat konstitusi. Di mana dalam UUD RI Tahun 1945. Data (amandemen) pasal 28 F disebutkan bahwa “*setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*” Hal itu menunjukkan konstitusi telah memberikan jaminan terhadap semua orang dalam memperoleh informasi. Konsekwensinya institusi pemerintah harus mampu menyediakan informasi khususnya dari Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil harus mampu dilaksanakan karena menyangkut hak publik untuk memperoleh informasi sesuai peraturan perundangan. Sejalan dengan hal itu, perkembangan kependudukan dan pembangunan dapat berhasil jika pengelolaan dan penyajian data kependudukan berskala nasional atau daerah dapat berjalan dengan baik. Data kependudukan yang diolah dengan baik dan sistematis akan menjadi informasi yang berguna untuk menunjang pembangunan kependudukan,

Dalam Undang-Undang RI No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 58 Ayat (1) menyebutkan bahwa "*Data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk*". Data agregat meliputi himpunan data perseorangan yang berupa data kuantitatif dan data kualitatif. Berdasarkan pasal 58 ayat 4 UU No. 24 Tahun 2013, menyebutkan bahwa Data Kependudukan digunakan untuk semua keperluan adalah data kependudukan dari Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri, antara lain untuk pemanfaatan :

1. Pelayanan Publik;
2. Perencanaan Pembangunan;
3. Alokasi Anggaran;
4. Pembangunan Demokrasi; dan
5. Penegakan Hukum Dan Pencegahan Kriminal.

Data Kependudukan tersebut bersumber dari data kependudukan kabupaten/kota yang terintegrasi dalam SIAK. Berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 sebagai perubahan UU No. 23 Tahun 2006 memberikan kedudukan data kependudukan yang digunakan untuk semua keperluan : Alokasi Anggaran (Termasuk untuk perhitungan DAU), Pelayanan Publik, Perencanaan Pembangunan, Pembangunan Demokrasi, Penegakan Hukum Dan Pencegahan Kriminal.

Data kependudukan meliputi data perseorangan dan atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam SIAK. Ketersediaan data penduduk dalam SIAK menyangkut dua aspek boleh dan tidak boleh dipublikasikan atau diberikan kepada publik atau lembaga tertentu karena peraturan perundangan yang berlaku. Data yang dapat diakses secara umum oleh publik adalah data agregat. Data yang terbatas dapat diakses oleh lembaga tertentu dalam persyaratan tertentu adalah data yang menyangkut data pribadi penduduk

Data administrasi kependudukan yang tidak boleh dipublikasikan adalah data pribadi penduduk karena berdasarkan Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bab V. Informasi yang dikecualikan pasal 17. Setiap Badan Publik Wajib membuka akses bagi pemohon informasi publik kecuali, diantaranya butir (g). Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi fakta otentik yang bersifat pribadi, dan kemauan akhir atau wasiat seseorang. Lebih lanjut di butir (h). Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan rahasia pribadi, yaitu :

1. Riwayat dan kondisi anggota keluarga
2. Riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang
3. Kondisi keuangan, aset, pendapatan dan rekening bank seseorang
4. Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapasitas intelektual, dan rekomendasi kemampuan seseorang dan/atau
5. Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan non formal.

Data pribadi merupakan data yang dikecualikan untuk dipublikasikan karena menyangkut data perseorangan tertentu, maka pemerintah dalam hal ini Dinas Kependudukan

dan Pencatatan Sipil melakukan penyimpanan, perawatan dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.

Pemanfaatan data pribadi penduduk dapat diakses setelah mendapat izin untuk mengakses dari Menteri Dalam Negeri (PP 37/2007). Perjanjian kerja sama NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sudah dalam 22 Kementerian/Lembaga yang telah menjalin kerjasama dengan Kementerian Dalam Negeri untuk pemanfaatan data kependudukan tersebut, yaitu Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan/Bappenas, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian BUMN, Kementerian Kesehatan, Kementerian Komunikasi dan Infomasi, Kepolisian Republik Indonesia, BNP2TKI, TNP2K, Bank Indonesia, PPATK, PT Jamsostek, PT Askes, Ditjen Pajak, Deputi Setwapres, Bidang Kesra dan Penanggulangan Kemiskinan, Bareskrim Polri, Bank Mandiri, Bank BNI, Bank BRI, Sekjen kementerian Kesehatan dan Sekretaris Utama BNP2TKI.

Bagi Lembaga yang telah melakukan kerjasama secara nasional, dalam pemanfaatan data kependudukan langsung mengakses dengan lembaga, kementerian/non kementerian induk, tidak perlu dengan Disdukcapil kabupaten/kota karena data telah dibuka dan terintegrasi sesuai cakupan perjanjian kerjasama

2.5 Konsep Pembangunan Berwawasan Kependudukan dan Road Map Pembangunan Kependudukan

2.5.1 Pembangunan Berwawasan Kependudukan

Grand design pembangunan kependudukan ini erat kaitanya dengan upaya untuk mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan kependudukan. Penduduk adalah subyek dan sekaligus obyek pembangunan. Sebagai subyek, penduduk adalah pembangun itu sendiri, sedangkan sebagai obyek penduduk adalah penerima hasil-hasil pembangunan yang

telah dilakukannya. Tujuan penduduk sebagai subyek atau pelaku pembangunan adalah untuk mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; sedangkan penduduk selaku obyek atau penikmat hasil pembangunan berkaitan erat dengan upaya mewujudkan pembangunan sosial yang berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan terencana di segala bidang untuk menciptakan perbandingan ideal antara perkembangan kependudukan dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan serta memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa harus mengurangi kemampuan dan kebutuhan generasi mendatang, sehingga menunjang kehidupan bangsa.

Pembangunan ekonomi yang berhasil seharusnya mempunyai dampak yang besar bagi pembangunan sosial yang selanjutnya dapat dinikmati oleh seluruh penduduk. Disisi lain, pembangunan yang dirancang haruslah pembangunan yang *“population-responsive”*, yaitu pembangunan yang senantiasa mengacu atau merujuk kepada dinamika dan tren perkembangan kependudukan. Kebijakan pembangunan yang responsif kependudukan (*population-responsive policy*) antara lain mencakup hal- hal sebagai berikut :

a. Jumlah dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Kabupaten Kulon Progo jumlah dan laju pertumbuhan penduduknya rendah, namun belakangan terus mengalami peningkatan. Implikasi kebijakan dari fenomena ini adalah dengan melakukan revitalisasi program pengendalian penduduk seperti program Keluarga Berencana, Pembangunan Keluarga, dan Penanganan Mobilitas. Salah satu upaya yang di lakukan adalah : memperkuat kelembangan di Kabupaten Kulon Progo, menyediakan sumber daya manusia (SDM) program memadai, terutama di tingkat lini lapangan, serta menyediakan sarana, prasarana dan anggaran yang juga mencukupi. Salah satu sasarannya adalah meningkatkan pencapaian program seperti tertuang dalam *road map* setiap periode , termasuk dalam rangka memperkecil disparitas antara perdesaan dan perkotaan (wilayah perbatasan dengan kota).

b. Jumlah Penduduk Usia Kerja

Seperti tercermin dari data, jumlah penduduk usia produktif paling besar dibandingkan penduduk usia anak-anak dan lansia. Jumlah angkatan kerja ini sekaligus sebagai tantangan dan peluang bagi pembangunan. Tantangannya adalah bagaimana memanfaatkan tenaga kerja yang besar itu. Sebaliknya tantangan ini bisa menjadi peluang pembangunan ekonomi yang luar biasa apabila dapat diantisipasi dengan baik. Salah satu implikasi kebijakannya adalah penyediaan lapangan kerja melalui investasi dan peningkatan produktivitas.

Dalam ilmu Demografi angkatan kerja yang luar biasa besar dikenal sebagai *demographic bonus*, karena pada kondisi tersebut angka beban ketergantungan menjadi minimal. Berdasarkan hasil proyeksi penduduk di Kabupaten Kulon Progo, potensi bonus demografi akan berlangsung sejak tahun 2014 dan terus berlanjut hingga 2035. Bonus demografi tersebut mencapai puncaknya pada periode 2030-2035 yakni fase jendela peluang (*window of opportunity*). Pada periode tersebut angka ketergantungan menjadi terendah sepanjang masa, yaitu sebesar 45%. Untuk mengantisipasi “*window of opportunity*” ini maka kebijakan yang perlu di ambil adalah penyediaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan dan kualitas sumber daya manusia, serta mempersiapkan kaum perempuan untuk memasuki angkatan kerja.

c. Jumlah Kelompok Penduduk Usia Remaja

Disamping penduduk usia kerja, jumlah penduduk yang termasuk kategori remaja juga besar. Hal ini disebabkan karena fertilitas yang tinggi dimasa lalu, yang sampai saat ini belum sepenuhnya dapat dikendalikan. Implikasi kebijakan yang perlu diambil adalah menyiapkan mereka sebagai generasi penerus bangsa. Untuk kualitas, baik yang menyangkut pendidikan maupun kesehatannya (termasuk kesehatan reproduksinya) harus memperoleh perhatian yang serius.

d. Jumlah Penduduk Lanjut Usia

Disamping penduduk usia kerja dan remaja yang besar, kelompok penduduk usia 60 tahun keatas juga meningkat secara signifikan. Fenomena “aging population” di Kulon Progo telah terjadi dan menjadi masalah utama sebagaimana dihadapi negara-negara maju. Proporsi kelompok ini cenderung meningkat, telah mencapai 10,5% pada tahun 2015 dan terus meningkat menjadi sekitar 15,5% pada tahun 2035. Implikasi kebijakan dari fenomena ini adalah upaya untuk kaum lansia ini dapat hidup lebih sejahtera, melalui pelayanan program dan kegiatan yang lebih ramah lansia.

Disamping harus merujuk dan menjawab dinamika dan tren kependudukan yang ada (*population-responsive*), kebijakan pembangunan harus juga “population-influencing” , yaitu kebijakan pembangunan yang diarahkan untuk membentuk dinamika dan struktur penduduk seperti yang di inginkan. Sebagai contoh dari sisi kuantitas, jumlah dan laju pertumbuhan penduduk indonesia masih cukup besar dengan struktur penduduk yang masih muda. Kebijakan pembangunan yang “population-influencing” adalah melakukan revitalisasi program Keluarga Berencana agar laju pertumbuhan penduduk dapat ditekan dan struktur penduduk menjadi stabil.

2.5.2 Peta Jalan (Road Map) Pembangunan Kependudukan

Grand design pembangunan kependudukan di Kulon Progo ini mencakup kurun waktu 2018 sampai dengan 2035. Pada setiap periode lima tahun dari 2015 akan dibuat semacam road map untuk mengetahui sejauh mana sasaran-sasaran pembangunan kependudukan yang mencakup pengendalian kuantitas penduduk, pembangunan kualitas, pembangunan keluarga, pengarahan mobilitas, dan pembangunan basis data kependudukan. Dengan demikian tujuan dari road map ini adalah agar secara sistematis dan terencana

diketahui sasaran-sasaran yang harus dicapai pada setiap periode, setiap kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan.

BAB III

KONDISI KEPENDUDUKAN KULON PROGO

SAAT INI

3.1 Kuantitas Penduduk

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo (data SIAK) dari tahun 2010-2017, jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2010 jumlah penduduk Kulon Progo tercatat 470.520 jiwa dan naik menjadi 473.622 jiwa pada tahun 2011. Jumlah penduduk tersebut naik menjadi 479.189 pada tahun 2012, namun pada tahun 2013 turun cukup drastis menjadi 416.209 jiwa, hal ini terkait dengan pembersihan data oleh Kementerian Dalam Negeri. Tahun 2014 mengalami sedikit kenaikan sehingga jumlahnya menjadi 417.473 jiwa. Penambahan jumlah penduduk agak banyak terjadi pada tahun 2015 dan 2016 sehingga jumlahnya masing-masing menjadi 436.123 jiwa dan 445.293 jiwa. Hingga akhir Desember 2017 jumlah penduduk Kulon Progo tercatat 446.028 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki 221.380 jiwa (49,63 persen) dan penduduk perempuan 224.648 jiwa (50,37 persen).

Data jumlah penduduk Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2012-2013, menunjukkan pola yang tidak stabil. Pada tahun 2012 jumlah penduduk mencapai 479.189 jiwa turun menjadi 416.209 pada tahun 2013. Jumlah penduduk tersebut kemudian meningkat menjadi 417.473 jiwa di tahun 2014. Setelah tahun 2014, banyaknya penduduk Kulon Progo terus mengalami peningkatan karena kelahiran dan migrasi masuk yang lebih tinggi daripada kematian dan migrasi keluar. Peningkatan jumlah penduduk banyak terjadi di tahun 2015 dan tahun 2016, yakni dari 417.473 jiwa pada tahun 2014 menjadi 436.123 jiwa pada tahun 2015 dan meningkat lagi menjadi 445.293 jiwa pada tahun 2016. Sementara pada tahun 2017 penambahannya hanya relatif sedikit. Data lengkapnya sebagaimana dalam tabel 3.1 di bawah ini.

Tabel 3.1
Banyaknya Penduduk Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2010-2017 Di Kabupaten Kulon Progo

No	Tahun	laki-laki		Perempuan		Jumlah
		Jiwa	%	Jiwa	%	
1	2010	231.672	49,24	238.848	50,76	470.520
2	2011	233.289	49,26	240.333	50,74	473.622
3	2012	236.064	49,26	243.125	50,74	479.189
4	2013	206.546	49,63	209.663	50,37	416.209
5	2014	206.494	49,46	210.979	50,54	417.473
6	2015	216.651	49,68	219.472	50,32	436.123
7	2016	221.220	49,68	224.073	50,32	445.293
8	2017	221.380	49,63	224.648	50,37	446.028

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo

Dilihat dari sebarannya, secara absolut penduduk Kulon Progo banyak yang berdomisili di wilayah Kecamatan Pengasih, Sentolo dan Wates baik pada tahun 2016 maupun tahun 2017. Pada tahun 2016, jumlah penduduk Kecamatan Pengasih mencapai 51.460 jiwa atau 11,56 persen dari total penduduk Kulon Progo sebanyak 445.293 jiwa. Jumlah penduduk sebanyak itu terdiri dari laki-laki 25.435 jiwa dan perempuan 26.025 jiwa. Sementara Kecamatan Sentolo jumlahnya sebanyak 50.224 jiwa atau 11,28 persen dari total penduduk yang terdiri dari 24.992 jiwa laki-laki dan 25.232 perempuan. Sedangkan Kecamatan Wates berjumlah 49.184 jiwa atau 11,05 persen dari total penduduk, yang terdiri dari 24.648 jiwa laki-laki dan 24.536 jiwa perempuan. Pada tahun 2017, jumlah penduduk Kecamatan Pengasih mengalami peningkatan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Yakni dari 51.460 jiwa pada tahun 2016 menjadi 51.461 jiwa pada tahun 2017 sehingga persentasenya meningkat dari 11,56 persen pada tahun 2016 menjadi 11,58 persen pada tahun 2017. Hal yang berbeda terjadi pada Kecamatan Sentolo karena dari sisi jumlah meningkat namun dari sisi persentase menurun. Sementara Kecamatan Wates dari sisi jumlah maupun

persentase keduanya mengalami penurunan. Data lengkapnya sebagaimana dalam tabel 3.2 di bawah ini.

Tabel 3.2
Sebaran Penduduk Kulon Progo Menurut Jenis Kelamin
Tahun 2010-2017

NO	KECAMATAN	2016				2017			
		L	P	JMLH	%	L	P	JMLH	%
1	TEMON	14.395	14.638	29.033	6,52	14.436	14.748	29.184	6,54
2	WATES	24.648	24.536	49.184	11,05	24.495	24.600	49.095	11,01
3	PANJATAN	19.344	19.659	39.003	8,76	19.352	19.681	39.033	8,75
4	GALUR	16.331	16.599	32.930	7,40	16.423	16.620	33.043	7,41
5	LENDAH	20.463	20.717	41.180	9,25	20.557	20.809	41.366	9,27
6	SENTOLO	24.992	25.232	50.224	11,28	25.006	25.245	50.251	11,27
7	PENGASIH	25.435	26.025	51.460	11,56	25.541	26.100	51.641	11,58
8	KOKAP	18.259	18.280	36.539	8,21	18.280	18.339	36.619	8,21
9	GIRIMULYO	12.542	12.674	25.216	5,66	12.475	12.695	25.170	5,64
10	NANGGULAN	15.089	15.617	30.706	6,90	15.149	15.639	30.788	6,90
11	SAMIGALUH	14.436	14.305	28.741	6,45	14.441	14.375	28.816	6,46
12	KALIBAWANG	15.286	15.791	31.077	6,98	15.225	15.797	31.022	6,96
	JUMLAH	221.220	224.073	445.293	100	221.380	224.648	446.028	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo

Pengelompokkan penduduk berdasarkan umur dapat digunakan sebagai dasar dalam menggambarkan kondisi demografis suatu wilayah. Umur penduduk di kelompokkan menjadi tiga yaitu : 1) umur 0-14 tahun : usia muda/usia belum produktif, 2) Umur 15-64 tahun : usia dewasa/usia produktif, dan 3) umur 65 tahun keatas : usia tua/usia tidak produktif. Struktur penduduk tersebut dapat digunakan sebagai dasar perhitungan rasio ketergantungan (*dependency ratio*).

Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografis yang penting. Rasio ketergantungan adalah angka menunjukkan perbandingan antara penduduk yang produktif dengan penduduk yang belum/tidak produktif. Semakin tinggi angka *dependency ratio* menunjukkan semakin besar beban yang harus di tanggung oleh penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum/tidak produktif. Sementara itu, angka *dependency ratio* yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk produktif untuk membiayai penduduk yang belum/tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan digunakan untuk melihat hubungan antara perubahan struktur umur penduduk dengan ekonomi secara kasar.

Data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo sebagaimana terlihat pada Tabel 3.3 menunjukkan bahwa jumlah penduduk menurut kelompok umur belum produktif yaitu 0-14 tahun di Kabupaten Kulon Progo sebanyak 90.317 jiwa pada tahun 2013 atau sekitar 21,70 persen dari total penduduk. Jumlah tersebut mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi 86.000 jiwa atau 20,60 persen dari total penduduk, kemudian naik lagi pada tahun 2015 menjadi 91.283 jiwa atau 20,93 persen dari total penduduk. Namun pada tahun 2016 turun lagi menjadi 90.423 jiwa atau 20,31 persen dari total penduduk, sebelum akhirnya ada sedikit kenaikan dari sisi jumlah pada tahun 2017 menjadi 90.432 jiwa. Namun dari sisi persentase besarnya tetap turun menjadi 20,27 persen dari total penduduk. Hal ini mengindikasikan bahwa tingkat fertilitas penduduk terutama pada periode 2015-2017 mengalami penurunan.

Tabel 3.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur
Tahun 2013-2017 Di Kabupaten Kulon Progo

Kelompok Umur	2013	2014	2015	2016	2017
0-4	29.243	27.039	28.073	27.980	27.007
5-9	30.208	29.480	32.162	31.885	32.075

10-14	30.866	29.481	31.048	30.558	31.350
15-19	29.751	28.952	32.468	32.339	32.266
20-24	27.850	29.097	30.263	31.887	32.129
25-29	26.998	26.659	27.282	27.890	28.525
30-34	30.330	30.069	31.465	31.129	29.741
35-39	29.637	30.203	31.573	32.368	32.666
40-44	30.378	29.018	50.573	31.429	30.894
45-49	31.401	32.024	32.182	32.440	32.123
50-54	28.671	28.424	29.164	30.270	30.934
55-59	23.758	24.967	26.389	27.230	27.789
60-64	18.216	19.430	20.212	21.461	21.945
65-69	15.113	15.555	15.501	16.299	16.948
70-74	14.625	14.645	13.953	14.314	13.387
75+	19.162	22.430	24.031	25.814	26.253
Jumlah	416.209	417.473	436.123	445.293	446.028

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo

Sementara itu, penduduk usia produktif antara 15-64 tahun pada tahun 2013 mencapai 276.992 jiwa atau 66,55 persen dari total penduduk. Pada tahun 2014 jumlah penduduk usia produktif mencapai 278.843 jiwa atau 66,79 persen dari total penduduk. Pada tahun 2015 persentase penduduk usia produktif sedikit mengalami kenaikan menjadi 66.81 persen dari total jumlah penduduk. Pada tahun 2016 jumlah penduduk usia produktif kembali mengalami kenaikan dari sisi jumlah maupun persentase, karena jumlahnya menjadi 308.433 jiwa atau 69,27 persen. Namun pada tahun 2017 jumlah penduduk usia produktif turun menjadi 299.008 jiwa atau 64,16 persen dari total penduduk. Jumlah penduduk usia produktif di Kabupaten Kulon Progo antara Tahun 2013-2017 mengalami peningkatan sebanyak 22.016

jiwa. Pertambahan jumlah penduduk usia produktif tersebut mengindikasikan terjadinya migrasi di Kabupaten Kulon Progo. Jumlah penduduk usia produktif ini dapat menjadi modal dasar yang sangat penting untuk berperan aktif dalam setiap aspek pembangunan di Kabupaten Kulon Progo.

Penduduk Kabupaten Kulon Progo yang masuk dalam kelompok usia lanjut mencapai 48.900 jiwa pada tahun 2013 atau 11,75 persen dari total penduduk. Jumlah tersebut bertambah menjadi 52.630 jiwa pada tahun 2014 atau sebesar 12,61 persen dari total penduduk, dan meningkat lagi menjadi 56.588 jiwa pada tahun 2017 atau sebesar 12,69 persen dari total penduduk. Pertambahan lansia di Kabupaten Kulon Progo ini tergolong tinggi, karena dalam rentang waktu lima tahun yaitu 2013-2017 naik 7.688 jiwa. Kondisi ini juga menjadi indikasi akan adanya migrasi masuk ke Kulon Progo pada kelompok usia lanjut. Meskipun dimungkinkan juga penambahan jumlah penduduk usia lanjut dari penduduk lokal karena derajat kesehatan dan kesejahteraan hidup yang semakin baik.

Seperti telah diuraikan sebelumnya, struktur penduduk antara kelompok belum produktif, produktif, dan lanjut usia dapat digunakan sebagai dasar perhitungan rasio ketergantungan. Berdasarkan pada Tabel 3.3, diketahui bahwa beban ketergantungan penduduk tidak produktif terhadap penduduk produktif mencapai 50,26 pada tahun 2013. Angka tersebut menunjukkan bahwa dari 100 orang penduduk usia produktif yaitu 15-64 tahun harus menanggung sekitar 50 hingga 51 orang penduduk tidak produktif. Angka ini cukup bagus, semakin rendah beban ketergantungan maka potensi ekonomi suatu wilayah semakin baik, dengan dukungan penduduk produktif yang semakin tinggi.

Angka beban ketergantungan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2014 turun menjadi 49,72 kemudian turun lagi pada tahun 2015 menjadi 49,69. Pada tahun 2016 rasio ketergantungan di Kabupaten Kulon Progo turun lagi menjadi 47,61 namun pada tahun 2017

mengalami kenaikan menjadi 49,17. Penurunan rasio ketergantungan tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2013, walau angkanya kecil, menunjukkan kecenderungan berkurangnya beban penduduk usia produktif terhadap penduduk belum/tidak produktif jika dibandingkan dengan tahun 2013.

Gambaran penduduk di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan rasio beban ketergantungan ini menunjukkan produktivitas sumber daya manusianya sudah cukup tinggi dan beban penduduk tidak produktif dalam pembangunan juga tergolong rendah. Dengan demikian, maka pembangunan dapat terus dilakukan karena penduduk usia tidak produktif yang harus di tanggung oleh usia produktif tidak terlalu berat. Dalam istilah demografi, jika dilihat dari *dependency ratio*-nya maka telah terjadi *the window of opportunity* dimana muaranya adalah terjadinya pembangunan yang tinggi. Pada tahun 2030 diharapkan akan terjadi *window of opportunity* tersebut dengan angka ketergantungan mencapai 45-50%. Kondisi rasio beban ketergantungan penduduk Kulon Progo sudah mencapai dibawah 50 yaitu 49,72 pada tahun 2014, kemudian 49,69 pada tahun 2015, selanjutnya 47,61 pada tahun 2016 dan 49,17 pada tahun 2017.

Informasi tentang jumlah keluarga dan komposisi anggota keluarga, diperlukan dalam perencanaan maupun implementasi kebijakan pemenuhan pelayanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, kebutuhan pangan, pengentasan kemiskinan dan sebagainya. Keluarga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang tinggal dalam satu rumah yang masih mempunyai hubungan kekerabatan/hubungan darah karena perkawinan, kelahiran, adopsi dan lain sebagainya. Keluarga dapat dibagi menjadi 2 (dua) tipe, yaitu :

- a. keluarga inti (*nuclear family*), yaitu keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak kandung, anak angkat maupun adopsi yang belum kawin, atau ayah dengan anak-anak yang belum kawin atau ibu dengan anak-anak yang belum kawin.

b. keluarga luas (*extended family*), adalah keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak-anak baik yang sudah kawin atau belum, cucu, orang tua, mertua maupun kerabat-kerabat lain yang menjadi tanggungan kepala keluarga.

Berdasarkan data SIAK dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo dapat diketahui bahwa jumlah kepala keluarga (KK) dari tahun 2010-2017 menunjukkan kecenderungan terjadinya peningkatan meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2013 (Tabel 3.4). Kenaikan jumlah KK paling tinggi terjadi antara tahun 2014-2015 sebesar 4,4 persen. Apabila dihitung rata-rata kenaikan jumlah KK per tahun 2010-2017 dalam kisaran 2 persen. Dari sisi jumlah anggota keluarga, banyaknya jumlah anggota keluarga dapat digunakan untuk menggambarkan kondisi lingkungan dan kesejahteraan dalam satu keluarga. Dapat diasumsikan bahwa semakin kecil jumlah keluarga biasanya akan semakin baik tingkat kesejahteraannya.

Rata-rata jumlah keluarga biasanya digunakan untuk melihat perubahan paradigma dari keluarga besar menjadi keluarga kecil. Dalam rentang waktu 2010-2017 terjadi pola yang cenderung linier, dimana dari tahun 2010-2017 terjadi penurunan rata-rata jumlah jiwa dalam satu keluarga. Namun pada tahun 2014-2015 dan 2016-2017 rata-rata jumlah jiwa dalam keluarga mengalami terjadi stagnasi.

Tabel 3.4
Banyaknya KK Dan Rata-Rata Jiwa Dalam Keluarga
Tahun 2010-2017 Di Kabupaten Kulon Progo

No	Jenis Data	Tahun							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Banyaknya Kepala Keluarga (KK)	136.102	140.584	144.578	135.155	138.985	145.152	148.879	149.265
2	Rata-rata Jumlah jiwa dalam keluarga (orang)	3,46	3,37	3,31	3,08	3,00	3,00	2,99	2,99

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo

Berdasarkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Kulon Progo periode 1980-2016 menurut data BPS menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Kulon Progo selalu mengalami kenaikan. Jika dicermati dari tahun ke tahun kenaikan laju pertumbuhan penduduk tersebut mengalami percepatan. Peningkatan yang paling besar terjadi antara tahun 2010-2016 yaitu sebesar 0,5%. Kondisi ini menjadi indikasi terjadinya peningkatan tingkat fertilitas maupun migrasi masuk di Kabupaten Kulon Progo.

Tabel 3.5
Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kulon Progo
Tahun 1971-2016

No	Jenis Data	tahun				
		1971-1980	1980-1990	1990-2000	2000-2010	2010-2016
1	Laju Pertumbuhan Penduduk (%/th)	0,29	-0,22	-0,04	0,48	0,98*)

Sumber : Badan Pusat Statistik

*) Profil Kependudukan dan KB Kabupaten Kulon Progo

Kepadatan penduduk merupakan kondisi yang mengalami perubahan dari tahun ke tahun, karena perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah, baik secara alami maupun karena perpindahan penduduk dari daerah satu ke daerah lainnya. Indikator kepadatan penduduk berguna untuk melihat kerapatan jumlah penduduk dalam satu satuan keruangan, sedangkan persebaran (distribusi) penduduk adalah kondisi sebaran penduduk menurut keruangan.

Berdasarkan data yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo, memperlihatkan persentase persebaran penduduk Kabupaten Kulon Progo menurut kecamatan paling tinggi adalah Kecamatan Pengasih sebesar 11,56 persen terhadap total penduduk di tahun 2016. Angka tersebut mengalami sedikit kenaikan di tahun

2017 menjadi 11,58 persen dan Pengasih tercatat sebagai kecamatan dengan persentase penduduk tertinggi di Kulon Progo. Wilayah dengan persentase penduduk terendah adalah Kecamatan Girimulyo yang hanya 5,66 persen dari total penduduk Kulon Progo di tahun 2016 dan sedikit mengalami penurunan di tahun 2017 menjadi 5,64 persen. Hal ini dimungkinkan oleh adanya migrasi penduduknya yang keluar dari kecamatan atau bahkan pindah kabupaten lain karena adanya daya tarik daerah lain yang dianggap lebih menjanjikan penghidupan yang layak.

Tabel 3.6
Luas Wilayah dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2016 Dan 2017

No	Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Persen Luas Wilayah	Persen Persebaran Penduduk		Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	
				2016	2017	2016	2017
1	Temon	36,30	6.19	6,52	6,54	799,83	803,99
2	Wates	32,00	5,46	11,05	11,01	1536,89	1534,10
3	Panjatan	44,59	7,61	8,76	8,75	879,66	875,33
4	Galur	32,91	5,61	7,40	7,41	1000,54	1003,97
5	Lendah	35,59	6,07	9,25	9,27	1157,00	1162,23
6	Sentolo	52,65	8,98	11,28	11,27	953,86	954,37
7	Pengasih	61,66	10,52	11,56	11,58	834,51	837,45
8	Kokap	73,80	12,59	8,21	8,21	495,11	496,20
9	Girimulyo	54,90	9,36	5,66	5,64	459,27	458,43
10	Nanggulan	39,61	6,76	6,90	6,90	775,27	777,34
11	Samigaluh	52,96	9,03	6,45	6,46	542,65	544,07
12	Kalibawang	69,29	11,82	6,98	6,96	448,49	447,69
KAB. KULON PROGO		586,28	100,00	100,00	100	759,52	760,77

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo

Kepadatan penduduk Kabupaten Kulon Progo jika dibandingkan dengan wilayah lain di DIY menduduki posisi keempat setelah Kota Yogyakarta, Sleman, dan Bantul. Pada tahun 2016, kepadatan penduduk Kabupaten Kulon Progo mencapai 759,52 jiwa per km². Dalam kurun waktu satu tahun telah terjadi kenaikan kepadatan penduduk sebesar 0,2 persen. Fakta tersebut menjadi salah satu indikasi bahwa terjadi migrasi masuk ke Kabupaten Kulon Progo yang belum cukup tinggi.

Sementara itu, kepadatan penduduk menurut kecamatan diketahui paling padat penduduknya adalah Kecamatan Wates yaitu 1.536 jiwa per km² ditahun 2016. Namun demikian, pada tahun 2017 kepadatannya turun menjadi 1534,10 pada tahun 2017. Hal yang sebaliknya yaitu kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah di Kabupaten Kulon Progo adalah Kecamatan Kalibawang yang hanya mencapai 448,49 jiwa perkm² (2016) dan turun setahun berikutnya menjadi 447,69 jiwa per km² (2017)

Penduduk Kulon Progo menurut daerah tempat tinggal, pada tahun 2010 tercatat sebanyak 22,21 persen tinggal di wilayah perkotaan, dan sisanya sebesar 77,79 persen tinggal di perdesaan. Dengan kondisi tersebut, Kabupaten Kulon Progo menempati posisi keempat di DIY dari sisi persentase penduduknya yang tinggal di perkotaan setelah Kota Yogyakarta, Sleman dan Bantul. Perkembangan perkotaan di Kabupaten Kulon Progo hanya berkembang pada kecamatan-kecamatan di dataran rendah seperti di Kecamatan Wates, Kecamatan Temon, Kecamatan Pengasih, dan Kecamatan Sentolo.

Keberadaan fasilitas pendidikan seperti UNY, IKIP PGRI, Universitas Janabadra, dan Sekolah Tinggi Teknik Lingkungan (STTL) dan perguruan tinggi lainnya telah pula mendorong perkembangan perkotaan di Kulon Progo.

Tabel 3.7
Persentase Penduduk Kabupaten Kulon Progo Dibandingkan Dengan Kabupaten/Kota Lain Di DIY Dan Daerah Tempat Tinggal, 2010

Kab/Kota	Perkotaan			Perdesaan		
	L	P	Total	L	P	Total
1	2	3	4	5	6	7
Kulon Progo	22,1	22,3	22,21	77,88	77,7	77,79
Bantul	83,7	83,37	83,53	16,3	16,63	16,47
Gunung Kidul	9,4	9,16	9,28	90,6	90,84	16,47
Sleman	92,5	91,16	91,32	8,53	8,84	90,72
Yogyakarta	100,0	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0
DIY	36,92	65,98	66,44	33,08	34,02	33,56

Sumber : BPS Kabupaten Kulon Progo

3.2 Kualitas Penduduk

3.2.1 Pendidikan

Pendidikan diperlukan untuk meningkatkan kualitas penduduk. Tingginya permintaan jasa pendidikan menuntut penyelenggara pendidikan yang makin bermutu. Secara nasional, pendidikan diselenggarakan baik oleh pemerintah maupun swasta. Dalam pembahasannya akan dilihat angka partisipasi sekolah, angka partisipasi sekolah murni, jumlah sekolah, jumlah murid, jumlah guru, serta ratio antara jumlah murid dan guru.

Kondisi pendidikan suatu wilayah dapat dilihat dari besarnya Angka Partisipasi Sekolah (APS). Semakin mendekati angka 100 persen semakin bagus pencapaian partisipasi sekolah di suatu wilayah. APS merupakan gambaran proporsi anak yang bersekolah pada suatu kelompok usia sekolah jenjang pendidikan tertentu. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2010-2017 menunjukkan bahwa APS di Kabupaten Kulon Progo nilainya mendekati 100 persen

Tabel 3.8
Angka Partisipasi Sekolah (APS) di Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2010-2017

No	Jenjang Pendidikan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka Melek Huruf	90,40	74,40	97,50	94,60	93,60	92,80	96,90	96,62
2	Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	7,85	7,88	7,93	8,02	8,20	8,40	8,50	8,54
3	APS SD/MI	97,26	97,47	98,26	97,72	102,90	101,59	101,59	91,55
4	APS SMP/MTs	85,17	85,22	97,63	100,00	97,00	99,04	102,86	101,07
5	APS SMA/MA/SMK	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	92,44	98,71	105,53	88,33	69,96

Sumber: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Kulon Progo

Indikator lain yang dapat digunakan untuk melihat kondisi pendidikan suatu wilayah adalah Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM). Berdasarkan

data dari Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo, APK jenjang SD sederajat dari 2010-2017 menunjukkan kecenderungan kenaikan, hanya pada 2012 dan 2013 sedikit mengalami penurunan. Namun pada tahun 2014 kembali mengalami kenaikan, walaupun tahun 2015 kembali sedikit mengalami penurunan dan stagnan di tahun 2016 yang kemudian naik lagi di tahun 2017. Sementara APK untuk jenjang SMP sederajat relatif fluktuatif, yaitu terjadinya kenaikan dan penurunan. Dari tahun 2010-2017 terjadi penurunan atau minus 8,74 persen. Pada tahun 2016-2017 terjadi sedikit kenaikan sebesar 0,01 persen. Dalam rentang waktu 2014-2015 APK untuk SMP sederajat di Kulon Progo mengalami penurunan yang cukup besar hingga 4,05 persen.

Tabel 3.9

APK Dan APM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010-2017

No	Uraian	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Angka Partisipasi Kasar								
	SD dan MI	104,21	104,78	98,17	97,72	103,53	101,59	101,59	100,65
	SMP dan MTS	108,16	109,35	100,00	97,09	101,20	97,15	98,72	98,71
	SMA, SMK,dan MA	100,74	88,07	99,12	92,82	96,88	105,53	91,62	88,90
2	Angka Partisipasi Murni								
	SD dan MI	89,36	96,78	97,89	84,44	99,75	99,76	92,49	97,45
	SMP dan MTS	81,76	98,77	98,99	73,14	97,88	97,90	76,64	92,44
	SMA, SMK,dan MA	69,69	83,47	97,63	69,20	88,71	98,78	67,22	61,94

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo

Untuk jenjang SMA sederajat berbeda dengan SD dan SMP, diketahui APK-nya kurang dari 100 persen, kecuali di tahun 2010 dan 2015 yang besarnya masing-masing 100,74 persen dan 105,53 persen. Dilihat perkembangannya dari tahun ke tahun menunjukkan kecenderungan fluktuatif atau naik turun. Dari 2010-2011 terjadi penurunan sebesar 12,67 persen, tahun 2011-2012 kembali terjadi kenaikan meskipun tidak sebanyak penurunan tahun sebelumnya yakni 11,05 persen. Dalam rentang waktu 2012-2013 kembali

mengalami penurunan yakni 6,3 persen. Pola yang sama terjadi untuk APM di Kabupaten Kulon Progo, baik dari jenjang SD, SMP, dan SMA.

Kemajuan indikator pendidikan di Kabupaten Kulon Progo di dukung oleh banyaknya fasilitas pendidikan di tingkat dasar dan menengah. Terdapat kecenderungan jumlah sekolah pada tingkat pendidikan dasar dan menengah meningkat pada periode 2010-2017. Pada periode tersebut, terdapat peningkatan rasio SD/M terhadap penduduk usia sekolah tahun 2012 dibandingkan tahun 2011, yakni dari 77,39 di tahun 2011 menjadi 81,38. Rasio tersebut naik menjadi 82,57 di tahun 2015. Di Tingkat SMP/MTS, rasio SMP/MTS terhadap penduduk usia sekolah mengalami kenaikan dari 27,81 pada 2011 menjadi 32,85 pada tahun 2012. Kondisi ini semakin membaik di tahun 2015 yang besarnya rasio menjadi 34,72

Pada tingkat pendidikan yang lebih tinggi yakni SMA besarnya rasio cenderung menurun dari 32,66 di tahun 2014 menjadi 30,40 di tahun 2015. Pada tahun 2016 rasio turun lagi menjadi 29,39 dan menjadi 27,42 di tahun 2017 (Tabel 3.10). Begitu pula pada rasio guru dan murid, semakin tinggi tingkat pendidikan yakni ditingkat pendidikan SMP dan SMA terdapat kecenderungan ketersediaan guru semakin baik. Hal ini ditandai dengan rasio guru murid yang lebih tinggi (Tabel 3.11).

Tabel 3.10
Ketersediaan Sekolah Dan Penduduk Usia Sekolah Tahun 2010-2017
Kabupaten Kulon Progo

No	Jenjang Pendidikan	Tahun							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio SD/MI	94,92	77,39	81,38	81,52	94,83	82,57	96,73	94,88
2	Rasio SMP/Mts	34,96	27,81	32,85	31,76	32,44	34,72	42,49	42,28
3	Rasio SMA/MA/SMK	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	Data tidak tersedia	31,77	32,66	30,40	29,39	27,42

Sumber : Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo

Tabel 3.11
Rasio Guru dan Murid Jenjang Pendidikan Dasar Tahun 2010-2017
Kabupaten Kulon Progo

No	Jenjang Pendidikan	Tahun							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio SD/MI	1157,51	1014,92	970,30	980,34	1.054,74	1106,30	1136,81	977,55
2	Rasio SMP/Mts	1238,32	1234,79	1121,08	1140,27	1.180,82	1.1232,72	888,23	1114,05
3	Rasio SMA/MA/SMK	9145,45	9175,67	9223,23	9146,13	8842,11	10518,28	10940,85	1131,13

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kulon Progo

3.2.2 Kesehatan

Gambaran Kesehatan Kulon Progo dapat dilihat dari capaian indikator Kesehatan dari tahun 2016-2017. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo, diketahui rasio antara posyandu per satuan balita menunjukkan penurunan meskipun tidak terlalu besar. Pada 2016, rasio Posyandu per satuan balita menunjukkan angka 1: 2.678 yang artinya setiap Posyandu harus melayani 2.678 balita, sementara pada tahun 2017 rasionya mengalami sedikit penurunan menjadi 1: 2.616. Hal ini tentunya menunjukkan bahwa Posyandu lebih efektif dalam melayani balita karena berkurangnya beban jumlah balita yang harus dilayani. Sementara rasio Puskesmas per satuan penduduk di Kulon Progo menunjukkan semakin meningkatnya beban pukesmas dalam melayani penduduk. Tahun 2014 untuk setiap pukesmas harus melayani sebanyak 21.204 penduduk dan justru meningkat menjadi 21.239 penduduk ditahun 2017. Tentu saja hal ini perlu disikapi secara serius, bahwa pertumbuhan penduduk di Kulon Progo kurang di imbangi dengan fasilitas kesehatan yaitu Puskesmas. Perlu dibangun Puskesmas baru agar beban Puskesmas dalam melayani masyarakat tidak terlalu berat. Hal yang sama juga terjadi dengan Puskesmas Pembantu yang memiliki rasio 1:7.068 ditahun 2016 menjadi 1:7.397 di tahun 2017.

Tabel 3.12**Capaian Indikator Kesehatan Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 dan 2017**

No	Fasilitas Kesehatan	2016	2017
1	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	26,78	26,16
2	Rasio Pukesmas Per Satuan Penduduk	21.204	21.239
3	Rasio Pustu Per Satuan Penduduk	7.068	7.397
4	Rasio Rumah Sakit Per Satuan Penduduk	55.662	55.754
5	Rasio Dokter Per Per Satuan Penduduk	3.071	3.214
6	Rasio Tenaga Medis Per Satuan Penduduk	898	899

Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Kulon Progo

Kondisi yang belum baik terlihat untuk rumah sakit, dimana rasio setiap penduduk Kulon Progo menunjukkan kecenderungan terjadi kenaikan. Jika pada 2016 setiap rumah sakit harus melayani 55.662 jiwa naik menjadi 55.754 di 2017. Selama tahun 2016 tidak terdapat penambahan rumah sakit yang ada di Kulon Progo sehingga beban setiap rumah sakit untuk melayani penduduk juga semakin bertambah. Hal yang sama terjadi dengan rasio dokter persatuan penduduk yang mengalami peningkatan dari 1 : 3.071 tahun 2016 menjadi 1: 3.214 di tahun 2017 seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Disisi lain, penambahan jumlah dokter tidak mampu mengimbangi penambahan jumlah penduduk. Beban yang semakin berat dialami oleh tenaga medis secara keseluruhan termasuk dokter, bidan, perawat, dan mantri kesehatan. Pada tahun 2016 rasio antara tenaga medis per satuan penduduk masih mencapai 1 : 898 naik menjadi 1 : 899 di tahun 2017.

Indikator pokok penentu tingkat kesehatan masyarakat adalah rata-rata angka harapan hidup waktu lahir (*life expectancy at birth*). Telah disebutkan oleh para ahli kesehatan bahwa angka harapan hidup waktu lahir adalah angka yang menunjukkan keseluruhan kesehatan masyarakat, baik tingkat kesehatan bayi, balita, kesehatan ibu, dan kesehatan penduduk

secara umum. Semakin tinggi harapan hidup waktu lahir, maka indikator kesehatan dasar lainnya seperti angka kematian bayi, angka kematian balita, angka kematian maternal rendah.

Tabel 3.13
Indikator Kesehatan Tahun 2010-2017 Kabupaten Kulon Progo

No									
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Usia Harapan Hidup	74,84	74,86	74,87	74,89	74,90	75	75,03	75,03
	▪ Laki-Laki	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	73,12	72,92	Tidak ada data	Tidak ada data
	▪ Perempuan	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	Tidak ada data	76,77	76,95	Tidak ada data	Tidak ada data
2	Angka Kematian Bayi /1000 KH	9,8	12,8	12,1	14,84	11,49	9,17	9,58	8,38
3	Kematian Ibu Melahirkan/100.000 KH	69,97	105,00	52,67	131,52	94,25	38,22	136,48	59,90
4	Persentase Balita Gizi Buruk	0,88	0,89	0,81	0,79	0,93	0,81	0,98	0,89
5	Universal Child Immunization/UCI (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
6	Balita Dengan Gizi Buruk Mendapat Perawatan	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan	99,2	99,60	99,80	89,70	99,94	99,90	99,94	99,90
8	Cakupan Rumah Tangga Sehat(%)	28,26	27,90	24,80	30,51	32,99	34,52	43,57	37,90
9	Cakupan Penggunaan Air Bersih(%)	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Cakupan Penggunaan Jamban Keluarga (%)	54	55	78	84	90,27	96,88	99,21	100
11	Cakupan SPAL	31	31	64	Tidak ada data				

Sumber: Dinas kesehatan Kabupaten Kulon Progo

Tabel 3.13 menunjukkan indikator kesehatan di Kabupaten Kulon Progo secara menyeluruh baik indikator pada tingkat individu seperti angka harapan hidup, angka kematian bayi, angka kematian maternal maupun indikator pada tingkat rumah tangga seperti rumah tangga sehat, penggunaan air bersih, dan jamban keluarga. Secara umum, tingkat kesehatan di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan berbagai indikator tersebut telah menunjukkan kondisi yang baik. Usia angka harapan hidup telah sangat baik, berada pada angka sekitar 75 tahun pada periode 2015-2016. Angka ini lebih tinggi daripada angka

nasional yang berada pada angka 70 tahun, dan juga angka provinsi pada angka 73 tahun. Kondisi ini akan terus membaik, cenderung meningkat hingga mencapai 76,3 pada tahun 2035.

Kondisi indikator kesehatan yang lain pun sangat bagus, jauh lebih baik dari angka nasional. Angka kematian bayi telah berada pada angka yang sangat rendah, sebagaimana terjadi di negara maju, yakni pada angka dibawah 10 kematian dari 1000 kelahiran hidup. Angka kematian bayi berada dibawah 10 telah dicapai sejak tahun 2015, hanya dicapai oleh negara maju di Eropa dan Amerika. Begitu pula dengan kematian maternal, angka ini yang paling sulit untuk diturunkan. Angka kematian maternal di Kabupaten Kulon Progo telah rendah, yakni dibawah 100 kematian setiap 100.000 kelahiran hidup. Ini merupakan angka yang rendah bahkan diperkirakan terendah dari seluruh kabupaten di Indonesia.

Indikator pada tingkat rumah tangga juga menunjukkan tingkat kesehatan yang baik. Cakupan kesehatan rumah tangga yang baik. Hal ini didukung dengan kualitas penggunaan air bersih yang telah tinggi, mencapai hampir 100 persen sejak tahun 2010. Pemanfaatan jamban keluargapun meningkat pesat dari sekitar 54 persen pada tahun 2010 menjadi sekitar 100 persen pada 2017. Secara umum ini semua menunjukkan tingkat kesehatan keluarga yang baik.

Tabel 3.14
Capaian Indikator Kesehatan Tahun 2010-2017 Di Kabupaten Kulon Progo

No	Indikator	Tahun							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Rasio Posyandu Per Satuan Balita	-	-	-	-	-	33,77	31,09	32,54
2	Rasio Pukesmas Per Satuan Penduduk	-	-	-	-	-	131,24	132,13	151,01
	Rasio Pustu Per Satuan Penduduk	-	-	-	-	-	5,03	4,80	4,71
3	Rasio RS Per Satuan Penduduk	-	-	-	-	-	1,92	1,83	1,80
4	Rasio Dokter Per Satuan Penduduk	-	-	-	-	-	125,01	122,30	111,30
5	Rasio Tenaga Mendis Per Satuan Penduduk	-	-	-	-	-	33,77	31,09	32,54
6	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan Yang Memilik Kompetensi Kebidanan (%)	99,2	99,9	99,80	99,70	99,94	99,90	99,94	99,90

7	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
8	Cakupan Balita Guzi Buruk Mendapat Perawatan (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
9	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita TBC BTA (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
10	Cakupan Penemuan Dan Penanganan Penderita DBD (%)	100	100	100	100	100	100	100	100
11	Cakupan Pelayanan Kesehatan Rujukan Pasien Masyarakat Miskin(%)	100	100	100	100	100	100	100	100
12	Cakupan Kunjungan Bayi (%)	100	91,9	91,3	92,9	97	93,09	94,85	100
13	Jumlah pukesmas	21	21	21	21	21	21	21	21
14	Jumlah pukesmas pembantu	63	63	63	63	63	63	63	63

Sumber : Dinas Kesehatan

Capaian indikator kesehatan Kabupaten Kulon Progo antara tahun 2010 sampai tahun 2017 menunjukkan hasil yang cukup baik. Misalnya dalam cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki yang juga sangat baik adalah cakupan desa/kelurahan *universal child immunization* (UCI), cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan, cakupan penemuan dan penanganan penderita DBD, cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin telah mencapai 100 persen. Hal yang perlu ditingkatkan dalam bidang kesehatan di Kabupaten Kulon Progo adalah penyediaan sarana dan prasarana kesehatan. Jumlah puskesmas, pusku, RS, dokter, dan tenaga medis rasionya masih tinggi per satuan penduduk. Kondisi tersebut menyebabkan pelayanan kesehatan belum bisa dilakukan secara efektif karena keterbatasan sarana dan prasarana kesehatan tersebut.

3.2.3 Ekonomi

3.2.3.1 Kemiskinan

Pendapatan merupakan salah satu ukuran yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat. Menurut ukuran bank dunia penduduk dengan pendapatan kurang dari US \$ 1,25 perhari dikategorikan sebagai penduduk yang berada di bawah garis

kemiskinan. Jumlah pendapatan penduduk kurang dari US \$ 1 per hari ini menunjukkan bahwa standar hidup penduduk yang sangat rendah.

Penduduk dibawah garis kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo pada Tahun 2016 adalah 14,48 persen lebih kecil dibandingkan kondisi pada tahun 2014 sebesar 16.74 persen. Angka tersebut masih berada di atas rerata nasional sebesar 13,33 persen. Berarti, angka ini belum mencapai target MDGs nasional tahun 2015 sebesar 10,30 persen. Berdasarkan kondisi tersebut perlu dilakukan kerja keras untuk menurunkannya. Kabupaten Kulon Progo menempati urutan ke lima dari 5 kabupaten/kota di DIY. Kota Jogja menempati urutan pertama (8,90 persen), diikuti Sleman (9,82 persen), Bantul (16,00 persen), Gunung Kidul (21,74 persen) dan Kulon Progo (22,27 persen).

Garis kemiskinan di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2016 sebesar RP 306.061 per kapita per bulan. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya sebesar RP. 281.644 perkapita per bulan. Jika dilihat dari jumlah, maka jumlah penduduk miskin (penduduk yang konsumsinya berada di bawah garis kemiskinan) pada tahun 2016 sebanyak 21.820 ribu orang, berarti jumlah penduduk miskin mengalami penurunan dalam satu tahun. Perkembangan angka kemiskinan Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2011 sampai dengan 2016 menunjukkan tren seperti Tabel 3.15.

Tabel 3.15

Persentase Kemiskinan Tahun 2010-2016 Kabupaten Kulon Progo

Kecamatan	Tahun						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Temon		13,31		19,21	15,37	13,00	13,79
Wates		12,78		13,63	14,19	7,84	8,04
Panjatan		22,23		19,00	11,58	10,01	11,14
Galur		19,93		18,64	18,56	16,19	17,19
Lendah		24,30		19,58	16,45	13,39	14,00
Sentolo		26,96		25,59	17,24	14,79	17,00
Pengasih		22,58		17,72	16,64	10,66	12,40

Kokap		38,63		34,14	23,38	20,50	20,60
Girimulyo		39,21		33,52	21,04	16,68	16,60
Nanggulan		27,01		20,29	9,29	8,41	13,17
Samigaluh		30,25		30,65	19,99	14,39	14,51
Kalibawang		26,82		17,12	19,03	14,58	18,79
Kab. Kulon Progo		24,64		22,54	16,74	13,11	14,48

Sumber Data : Bappeda Kulon Progo

Pada tabel 3.16 menunjukkan bahwa jumlah keluarga miskin di Kabupaten Kulon Progo memiliki kecenderungan penurunan dari tahun 2011-2016. Jumlah penduduk miskin dalam rentang waktu 2011-2016 turun sebesar 10,16 persen. Angka tersebut tergolong cukup tinggi karena jumlah penduduk miskin berkurang sepertiga dalam kurun waktu enam tahun.

Dari wilayah di ketahui Kecamatan Kokap memiliki jumlah penduduk miskin paling banyak diantara kecamatan yang lain di Kulon Progo yakni mencapai 4.340 KK di tahun 2011. Namun pada tahun 2016, jumlah KK miskin di Kecamatan Kokap tersebut turun hingga 41 persen menjadi 2.557 KK dan menempati posisi kedua terbanyak setelah Kecamatan Sentolo. Sementara jumlah penduduk miskin di Kecamatan Sentolo pada tahun 2011 tercatat sebanyak 3.952 KK dan menempati urutan kedua setelah Kecamatan Kokap. Pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin di Sentolo turun sebanyak 29 persen menjadi 2.805 KK. Meskipun mengalami penurunan, jumlah penduduk miskin di Kecamatan Sentolo pada tahun 2016 tersebut menempati urutan tertinggi di Kabupaten Kulon Progo menggeser Kecamatan Kokap. Dari jumlah penduduk miskin antar kecamatan di Kabupaten Kulon Progo terlihat angkanya selaras dengan angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin memperlihatkan disparasi yang cukup tinggi antar kecamatan.

Tabel 3.16
Sebaran Jumlah Penduduk Miskin Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 - 2016

Kecamatan	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Temon		1296		1812	1472	1264	1413
Wates		1913		2051	2203	1229	1332
Panjatan		2674		2329	1440	1258	1472
Galur		2132		2002	2030	1771	1967
Lendah		3121		2594	2218	1821	1986
Sentolo		3952		3869	2672	2324	2805
Pengasih		3495		2808	2675	1726	2107
Kokap		4340		3924	2737	2428	2557
Girimulyo		3089		2682	1715	1370	1428
Nanggulan		2446		1907	889	810	1338
Samigaluh		2848		2812	1876	1362	1423
Kalibawang		2783		2664	1918	1471	1992
Kab. Kulon Progo		34.089		31.454	23.845	18.834	21.820

Sumber Data : Bappeda Kulon Progo

3.2.3.2 Produk Domestik Regional Bruto

Definisi Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar menurut BPS adalah jumlah nilai tambah Bruto (*grass value added*) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah. Nilai tambah adalah nilai yang di tambahkan dari kombinasi faktor produksi dan bahan baku dalam proses produksi. Perhitungan nilai produksi (output) dikurangi biaya antara. Nilai tambah bruto disini mencakup komponen-komponen pendapatan faktor (upah dan gaji, pajak, sewa tanah dan keuntungan), penyusutan dan pajak tidak langsung neto. Jadi dengan menjumlahkan nilai tambah bruto masing-masing sektor dan menjumlahkan nilai tambah bruto dari seluruh sektor tadi, akan di peroleh Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga pasar.

Tabel 3.17 memperlihatkan pertumbuhan berbagai sektor dan PDRB di Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016. Laju pertumbuhan PDRB Kulon Progo dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 mengalami kenaikan yang cukup tinggi dari. Berdasarkan sektor, jasa merupakan sektor yang paling stabil pertumbuhannya karena tidak pernah mengalami penurunan dari tahun 2011 sampai tahun 2016. Disamping itu, sektor jasa menjadi penyumbang terbesar bagi PDRB Kulon Progo tahun 2016.. Sektor lain yang juga memberikan kontribusi cukup besar bagi PDRB Kulon Progo adalah Bangunan, Perdagangan, Hotel, dan Restoran dan listrik, Gas, dan Air Bersih.

Tabel 3.17
Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen) Tahun 2010-2016

Lapangan Usaha	Laju Pertumbuhan PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (Persen)					
	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.29	5.41	2.45	-0.99	1.67	1.74
Pertambangan dan Penggalian	10.47	3.7	4.6	1.49	0.55	1.72
Industri Pengolahan	4.44	-4.09	7.37	8.55	3.52	5.28
Pengadaan Listrik dan Gas	5.53	10.1	6.5	5.47	2.96	14.42
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	-0.06	4.14	1.06	1.21	2.18	2.54
Konstruksi	5.38	5.73	4.21	5.17	4.3	6.48
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.01	8.77	5.33	5.22	6.52	6.2
Transportasi dan Pergudangan	1.06	1	3.19	2.05	3.61	2.66
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4.2	5.2	7.39	4.78	5.37	5.93
Informasi dan Komunikasi	8.86	7.88	6.15	7.37	5.44	7.92
Jasa Keuangan dan Asuransi	5.99	4.56	13.62	11.24	8.09	4.41
Real Estate	5.71	6.39	4.48	5.27	6.25	5.53
Jasa Perusahaan	5.14	3.9	4.03	6.72	6.79	3.46
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4.3	7.68	5.11	6.02	5.02	6.16
Jasa Pendidikan	7.17	6.46	3.96	7.08	7.24	3.9
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	6.67	8.51	6.27	7.08	7.14	5.66
Jasa Lainnya	5.02	-1.02	4.55	5.89	8.02	5.48
Produk Domestik Regional Bruto	4.23	4.37	4.87	4.57	4.62	4.76

Sumber: BPS Kulon Progo

Tabel 3.18 menunjukkan PDRB atas dasar harga konstan 2010 di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2010 tercatat Rp 5.033.073.640.000,- dan naik menjadi Rp 6.580.776.970.000,- pada tahun 2016 atau terjadi kenaikan sebesar 30,75 persen selama

kurun waktu enam tahun. Sektor yang paling besar memberikan sumbangan bagi PDRB Kulon Progo tahun 2016 adalah pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang Rp. 1.158.714.130.000,- atau 17,61 persen. Sektor selanjutnya adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang memberikan kontribusi sebesar Rp. 901.270.620.000,- atau 13,69 persen. Sektor lainnya yang juga memberikan kontribusi yang cukup berarti adalah industri pengolahan yang menyumbang sebanyak Rp. 823.768.210.000,- atau 12,52 persen. Berikutnya adalah sektor pertanian yang menyumbang sebesar Rp. 565.132.810.000,- atau 8,59 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih tetap menjadi sektor unggulan dalam memberikan sumbangan terhadap PDRB.

Tabel 3.18
PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1034385.26	1047681.39	1104309.35	1131360.53	1120167.94	1138920.24	1158714.13
Pertambangan dan Penggalian	75230.98	83104.62	86177.55	90140.20	91487.50	91992.76	93577.01
Industri Pengolahan	647422.83	676192.25	648522.88	696306.88	755840.41	782466.66	823768.21
Pengadaan Listrik dan Gas	4617.90	4873.30	5365.44	5714.22	6026.66	6205.32	7100
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	7835.80	7831.08	8154.94	8241.53	8341.53	8523.55	8739.99
Konstruksi	416742.67	439159.43	464304.22	483855.75	508855.75	530760.30	565132.81
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	629403.95	660920.55	718882.82	757217.69	796717.69	848655.92	901270.62
Transportasi dan Pergudangan	476989.48	482028.83	486869.91	502391.57	512691.34	531194.16	545330.79
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	177852.26	185323.74	194959.37	209359.38	219373.88	231152.40	244855.30
Informasi dan Komunikasi	282450.70	307486.94	331730.43	352124.32	378089.96	398651.24	430223.02
Jasa Keuangan dan Asuransi	125488.10	132998.62	139057.38	157991.97	175745.08	189970.43	198342.09
Real Estate	172644.02	182504.82	194168.98	202865.31	213562.36	226908.25	239462.01
Jasa Perusahaan	16128.63	16957.37	17618.14	18328.69	19560.46	20889.15	21612.53
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	390597.33	407381.53	438666.19	461077.71	488812	513344.61	544978
Jasa Pendidikan	297643.40	318983.41	339595.56	353043.89	378043.89	405420.46	421214.17
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	69094.45	73705.47	79975.57	84986.05	91000	97499.81	103017.32

Jasa Lainnya	208545.89	219013.44	216789.46	226654.60	240000	259240.49	273438.99
Produk Domestik Regional Bruto	5033073.64	5246146.78	5475148.20	5741660.29	6004316.44	6281795.76	6580776.97

Sumber: BPS Kulon Progo

Tabel 3.19 menunjukkan PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2010 tercatat Rp 5.033.073.640.000,- dan naik menjadi Rp 8.312.454.620.000,- pada tahun 2016 atau naik 65,16 persen dalam kurun waktu enam tahun. Sektor yang paling besar memberikan sumbangan bagi PDRB Kulon Progo tahun 2016 adalah pertanian, kehutanan dan perikanan menyumbang Rp. 1.658.813.370.000,- atau 19,96 persen. Sektor selanjutnya adalah perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor yang memberikan kontribusi Rp. 1.008.690.030.000,- atau 12,13 persen. Sektor lainnya yang juga memberikan kontribusi cukup berarti adalah industri pengolahan yang menyumbang sebanyak Rp. 925.813.920.000,- atau 11,14 persen. Berikutnya adalah sektor konstruksi sebesar Rp. 710.844.130.000,- atau 8,55 persen. Hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi sektor unggulan dalam memberikan sumbangan terhadap PDRB Kulon Progo.

Tabel 3.19
PDRB Kulon Progo Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2010-2016

Lapangan Usaha	PDRB Kabupaten Kulon Progo Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (Juta Rupiah)						
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1034385.26	1135300.45	1255673.35	1373634.98	1442659.9	1566769.25	1658813.37
Pertambangan dan Penggalian	75230.98	88650.58	93035.5	98940.17	101818.07	109892.09	115601.79
Industri Pengolahan	647422.83	708160.3	692120.23	780587.01	871865.3	925813.92	1014200.25
Pengadaan Listrik dan Gas	4617.9	4411.86	4394.82	4193.61	4859.84	5658.49	6824.11
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	7835.8	7978.48	8337.28	9007.66	10007.66	10522.21	11195.53
Konstruksi	416742.67	462253.25	509534.51	561695.75	602695.75	649776.42	710844.13
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	629403.95	702917.19	788515.2	843413.43	928413.43	1008690.03	1131565.1
Transportasi dan Pergudangan	476989.48	495997.96	510228.95	547288.37	593001.41	636391.39	669410.86
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	177852.26	193239.6	214343.24	242861.21	267891.21	296720.55	324991.3
Informasi dan Komunikasi	282450.7	305485.79	323840.16	342993.77	364480.93	382516.59	413772.07
Jasa Keuangan dan Asuransi	125488.1	140571.73	161616.97	205582.72	229410.74	255816.33	271629.1
Real Estate	172644.02	186572.39	199343.3	213830.04	233583.01	256043.69	281442.35
Jasa Perusahaan	16128.63	16898	17727.76	18108.02	20295.75	22111.88	23424.71
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	390597.33	422241.98	483947.73	548399.23	615523	684126.51	760654.81
Jasa Pendidikan	297643.4	330043.38	344812.2	369065.84	409065.84	461616.87	491522.68
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	69094.45	78045.1	86283.52	82253.06	100500	112612.98	119451.29

Jasa Lainnya	208545.89	221482.71	222819.31	237728.86	260500	286474.78	307111.17
Produk Domestik Regional Bruto	5033073.64	5500250.75	5916574.03	6489593.73	7056571.83	7671547.97	8312454.62ss

Bila Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk pertengahan tahun yang tinggal di suatu wilayah, akan diperoleh angka PDRB per kapita. PDRB per kapita Kabupaten Kulon Progo menurut harga berlaku dan harga konstan menunjukkan kecenderungan kenaikan dari tahun 2012 sampai tahun 2016. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku pada tahun 2012 tercatat Rp. 14.879.000,- naik menjadi Rp. 16.165.000,- pada tahun 2013. Kenaikan yang sama terjadi pada tahun 2014 dan 2015 dengan nilai masing-masing Rp. 17.414.000,- dan Rp. 18.759.000,-. Di tahun 2016 kenaikan menyentuh angka Rp. 20.145.000,-. Sementara PDRB per kapita atas dasar harga konstan pada tahun 2012 tercatat Rp. 13.769.000,- naik menjadi Rp. 15.949.000,- atau naik 15,83 persen. Angka ini menunjukkkn perkembangan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo cukup baik.

Tabel 3.20
PDRB Per Kapita Tahun 2012-2017 Kabupaten kulon Progo

No	PDRB	Nilai (Juta Rp)					
		2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Hb	14.879	16.165	17.414	18.759	20.145	Data belum tersedia
2	Hk	13.769	14.302	14.817	15.360	15.949	Data belum tersedia

Sumber : BPS Kabupaten Kulon Progo

3.2.3.3 Inflasi

Menurut Bank Indonesia, secara sederhana inflasi diartikan sebagai meningkatnya harga-harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga dari satu atau dua barang saja tidak dapat di sebut inflasi kecuali bila kenaikan itu meluas (mengakibatkan kenaikan harga) pada barang lainnya. Kebalikan dari inflasi disebut deflasi (<http://www.bi.go.id/id>).

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang di konsumsi masyarakat. Sejak Juli 2008, paket barang dan jasa dalam keranjang IHK telah dilakukan atas dasar Survei Biaya Hidup (SBH) Tahun 2007 yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kemudian, BPS akan memonitor perkembangan harga dari barang dan jasa tersebut secara bulanan di beberapa kota, dipasar tradisional dan modern terhadap beberapa jenis barang/jasa di setiap kota. Indikator inflasi lainnya berdasarkan internasional best practice antara lain

1. Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB). Harga Perdagangan Besar dari suatu komoditas ialah harga transaksi yang terjadi antara penjual/pedagang besar pertama dengan pembeli/pedagang besar berikutnya dalam jumlah besar pada pasar pertama atas suatu komoditas. (Penjelasan lebih detail mengenai IHPB dapat dilihat pada web site Badan Pusat Statistik [ww.bps.go.id](http://www.bps.go.id))
2. Deflator Produk Domestik Bruto (PDB) menggambarkan pengukuran level harga barang akhir (*final goods*) dan jasa yang di produksi di dalam suatu ekonomi (negeri). Deflator PDB dihasilkan dengan membagi PDB atas dasar Harga Nominal dengan PDB atas dasar Harga Konstan.

Inflasi yang diukur dengan IHK di Indonesia dikelompokkan kedalam tujuh kelompok pengeluaran (berdasarkan *the Classification Of Individual Consumption by Purpose – COICOP*), yaitu :

1. Kelompok Bahan Makanan
2. Kelompok Makanan Jadi, Minuman Dan Tembakau
3. Kelompok Perumahan
4. Kelompok Sandang
5. Kelompok Kesehatan

6. Kelompok Pendidikan dan Olah Raga
7. Kelompok Transportasi Dan Komunikasi

Inflasi Kabupaten Kulon Progo dari tahun 2010 sampai tahun 2017 mengalami pasang surut. Tahun 2010 inflasi tercatat sebesar 5,47 kemudian turun menjadi 2,60 pada tahun 2011 atau terjadi penurunan 52,46 persen. Kenaikan inflasi terjadi antara tahun 2011-2013 dari 3,39 menjadi 7,32 (115,93 persen) dan kembali turun menjadi 6,59. Terjadi penurunan kembali rentang waktu 2015-2016 yaitu sekitar 25,89 persen yakni dari 3,09 menjadi 2,29.

Tabel 3.21

Nilai Inflasi Rata-Rata Tahun 2010-2017 Kabupaten Kulon Progo

Uraian	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Inflasi	5,47	2,60	3,39	7,32	6,59	3,09	2,29	4,2

Sumber : BPS

Catatan: Inflasi mengacu Kota Yogyakarta, Kulon Progo tidak mempunyai angka inflasi

Inflasi menurut kelompok pengeluaran di Kabupaten Kulon Progo di tahun 2010 yang paling tinggi adalah bahan makanan yang mencapai 12,88 persen. Berikutnya adalah kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau yang besarnya mencapai 5,38 persen dan ketiga terbesar adalah kelompok transportasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 5,01 persen. Sementara inflasi terendah menurut kelompok pengeluaran adalah pendidikan, rekreasi dan olah raga sebesar 1,54 persen

Tabel 3.22
Inflasi Menurut Kelompok Pengeluaran Tahun 2010-2017
Kabupaten Kulon Progo

No	Kelompok Pengeluaran	Tingkat Inflasi							
		2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Bahan Makanan	12,88	0,65	5,68	7,34	Data tidak tersedia	4,64	4,77	2,71
2	Makanan, Minuman, Rokok dan Tembakau	5,38	4,68	5,69	7,58	Data tidak tersedia	5,04	3,84	2,79
3	Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar	5,01	3,57	2,90	2,65	Data tidak tersedia	4,41	1,64	5,63
4	Sandang	2,14	9,79	2,81	-0,77	Data tidak tersedia	5,87	3,04	3,84
5	Kesehatan	1,99	1,42	1,05	4,15	Data tidak tersedia	4,21	4,17	2,76
6	Pendidikan, Rekreasi, dan Olah Raga	1,54	1,67	0,50	0,68	Data tidak tersedia	1,36	2,40	2,81
7	Transportasi, komunikasi, dan Jasa Keuangan	1,55	0,42	0,68	7,67	Data tidak tersedia	2,51	-2,06	6,72
	Umum	5,47	2,60	3,39	5,25	Data tidak tersedia	3,09	2,29	4,2

Sumber : BPS Kabupaten Kulon Progo

3.2.3.4 Indeks Gini

Indeks Gini atau koefisiensi Gini merupakan indikator yang menunjukkan tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Koefisien Gini berkisar antara 0 hingga 1. Koefisiensi Gini bernilai 0 menunjukkan adanya pemerataan pendapatan yang sempurna, atau setiap orang memiliki pendapatan yang sama. Sedangkan, koefisien gini bernilai 1 menunjukkan ketimpangan yang sempurna, atau satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa. Dengan kata lain, koefisiensi gini diupayakan agar mendekati 0 untuk menunjukkan adanya pemerataan distribusi pendapatan antar penduduk (www.sipd.bangda.kemendagri.go.id).

Indeks Gini di Kabupaten Kulon Progo dalam kurun waktu 2010 sampai dengan tahun 2012 memperlihatkan kecenderungan terjadinya peningkatan yaitu dari 0,24 naik menjadi 0,42. Dapat dikatakan dalam rentang waktu 2010-2012 ketimpangan pendapatan yang terjadi

di Kulon Progo semakin tinggi. Namun pada tahun 2013 nilai indeks gini di Kabupaten Kulon Progo mengalami penurunan menjadi 0,31 dan sedikit naik pada tahun 2014 menjadi 0,38. Angka indeks tahun 2015 mengalami penurunan kembali menjadi 0,37, artinya ketimpangan pendapatan mengecil.

Tabel 3.23
Indeks Gini Tahun 2010-2017 Kabupaten Kulon Progo

No	Tahun	Indeks Gini
1	2010	0,24
2	2011	0,39
3	2012	0,42
4	2013	0,31
5	2014	0,38
6	2015	0,37
7	2016	Data belum tersedia
8	2017	Data belum tersedia

Sumber : BPS

3.2.4 Ketenagakerjaan

Jumlah angkatan kerja di Kabupaten Kulon Progo dari kurun waktu 2013-2017 menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2013 jumlah angkatan kerja masih tercatat sebanyak 235.270 jiwa naik menjadi 247.995 jiwa atau naik sebesar 5,4 persen. Sedangkan dari sisi jenis kelamin angkatan kerja tersebut menunjukkan perbedaan proporsi yang cukup besar antara laki-laki dan perempuan. Tahun 2013 proporsi angkatan kerja laki-laki mencapai 55,2 persen. Tahun 2017 tidak terjadi perubahan komposisi angkatan angkatan kerja antar laki-laki dan perempuan karena proporsinya sama persis dengan kondisi di tahun 2017, yaitu lebih tinggi laki-laki (54,5 persen) di banding perempuan (45,5 persen).

Angkatan kerja dapat dibagi menjadi dua kelompok yaitu bekerja dan tidak bekerja/menganggur, jumlah angkatan kerja yang berstatus bekerja semakin meningkat dari

tahun 2013-2017. Diketahui pada tahun 2013 jumlah angkatan kerja yang statusnya bekerja mencapai 97,2 persen (228,572 jiwa) dan status tidak bekerja hanya 2,8 persen (6.698 jiwa). Jumlah tersebut meningkat cukup pesat di tahun 2016, dimana jumlah angkatan kerja yang statusnya bekerja naik menjadi 97,6 persen (240.182 jiwa) dan tidak bekerja turun menjadi 2,4 persen (5,821 jiwa).

Tabel 3.24
Penduduk Dan Angkatan Kerja Tahun 2013-2017 Kabupaten Kulon Progo

No	Uraian	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jumlah Penduduk					
	▪ Laki-Laki	206.546	206.494	216.651	216.902	221.380
	▪ Perempuan	209.663	210.979	219.472	220.539	224.648
	▪ Jumlah	416.209	417.473	436.123	437.441	446.028
2	Jumlah Angkatan Kerja					
	▪ Laki-Laki	129.778	133.068	133.145	130.913	135.270
	▪ Perempuan	105.492	110.473	108.011	115.090	112.725
	▪ Jumlah	235.270	243.541	241.156	246.003	247.995
3	Angkatan Kerja Bekerja					
	a. Laki-Laki	124.860	128.847	128.324	128.965	Data belum tersedia
	▪ Perempuan	103.712	107.689	103.866	111.217	Data belum tersedia
	▪ Jumlah	228.572	236.536	232.190	240.182	Data belum tersedia
4	Tidak Bekerja/Menganggur					
	▪ Laki-Laki	4.918	4.221	4.821	1.948	Data belum tersedia
	▪ Perempuan	1.780	2.784	4.145	3.873	Data belum tersedia
	▪ Jumlah	6.698	7.005	8.966	5.821	Data belum tersedia

Sumber : Dinas Nakertrans Kabupaten Kulon Progo

Menurut lapangan usaha yang ditekuni oleh penduduk Kulon Progo berusia 15 tahun ke atas yang paling banyak adalah pertanian. Pada tahun 2011 sebanyak 42,51 persen bekerja yang di sektor pertanian meningkat menjadi 50,02 persen pada tahun 2014 atau naik sebesar 7,51 persen. Lapangan usaha lainnya yang juga cukup besar adalah sektor industri pengolahan dan tercatat pada tahun 2011 sebanyak 15,28 persen turun menjadi 12,70 persen.

Secara persentase kenaikan yang terjadi sektor jasa lebih tinggi dibandingkan dengan semua sektor. Sementara lapangan usaha yang paling rendah adalah sektor listrik, gas, dan air bersih yaitu hanya 0,21 persen di tahun 2011.

Tabel 3.25
Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2011 – 2014 Kabupaten Kulon Progo

No	Lapangan Usaha	2011	2012	2013	2014
1	Pertanian	42,51	44,18	50,24	50,02
2	Pertambangan dan Penggalian	0,57	0	0	0
3	Industri Pengolahan	15,28	20,89	11,61	12,70
4	Listrik, Gas, dan Air Bersih	0,21	0	0	0
5	Bangunan	6,22	0	0	0
6	Perdagangan dan Hotel	18,35		17,80	16,42
7	Angkutan dan Komunikasi	1,73	0	0	0
8	Keuangan dan Jasa Perusahaan	1,96	0	8,18	9,39
9	Jasa-Jasa	13,37	34,92	12,17	11,45
	Jumlah	100	100	100	100

Sumber : BPS

Perkembangan ketenagakerjaan di Kabupaten Kulon Progo dapat dilihat pada tabel 3.25. Data yang menarik adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) dari tahun 2012-2017 menunjukkan pola yang tidak tetap, dimana antara tahun 2012 dan 2013 memperlihatkan kenaikan. Kemudian terjadi penurunan dari tahun 2013 sampai 2014 yang mencapai 4,33 persen. Pola yang hampir sama terjadi pada tingkat pengangguran terbuka yang cenderung naik turun. Dari tahun 2011 hingga tahun 2013 tingkat pengangguran terbuka memperlihatkan penurunan dari 7.051 jiwa menjadi 6.698 jiwa, tetapi dari tahun 2014-2015 terjadi kenaikan yang cukup tinggi yakni mencapai 27,99 persen. Akan tetapi angka tersebut kembali turun pada tahun 2017 yaitu sebesar 45,65 persen. Naik turunnya TPAK dan

pengangguran terbuka memberikan gambaran belum tersedianya lapangan pekerjaan yang mampu menampung angkatan kerja yang ada.

Tabel 3.26
Perkembangan Ketenagakerjaan Tahun 2012-2017 Kabupaten Kulon Progo

No	Uraian	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1	Penduduk Usia Kerja	307.797	311.148	314.513	318.886	Tidak ada sampelnya	327.583
	Angkatan Kerja	232.088	235.270	243.541	241.156	Tidak ada sampelnya	244.415
	Bekerja	225.037	228.572	236.536	232.150	Tidak ada sampelnya	239.542
2	Pengangguran Terbuka	7.051	6.698	7.005	8.966	Tidak ada sampelnya	4.873
3	Bukan Angkatan Kerja						
4	TPAK	75,40	75,61	71,28	75,62	Tidak ada sampelnya	74,61
5	Tingkat Pengangguran Terbuka	3,04	2,85	2,88	3,72	Tidak ada sampelnya	1,99

Sumber : BPS Kabupaten Kulon Progo

3.3.5 Indeks Pembangunan Manusia

Variabel penyusun Indeks Pembangunan Manusia (IPM) terdiri atas tiga komponen utama yaitu kesehatan, pendidikan dan pendapatan. Komponen kesehatan diukur dari Angka Harapan Hidup (AHH), Sedangkan pendidikan terdiri atas dua komponen yaitu Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah. Sementara komponen pendapatan diukur dari konsumsi riil per kapita (dalam rupiah). Berdasarkan rata-rata ketiga indeks yang menjadi penyusun IPM, diperoleh nilai IPM Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2010 sebesar 68,83. Dari tahun ke tahun, nilai IPM Kabupaten Kulon Progo terus meningkat, yang bisa diartikan telah terjadi perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Indeks pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kulon Progo menempati peringkat keempat tertinggi di DIY setelah Kota Yogyakarta, Sleman dan Bantul. Nilai IPM Kabupaten Kulon Progo termasuk dalam kategori tinggi (IPM 70 - 80). Tabel 3.27 berikut ini menggambarkan indikator IPM.

Tabel 3.27

Indikator Penyusunan IPM Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010-2017

Uraian	Tahun							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Indikator Penyusunan IPM								
1. Angka Harapan Hidup (tahun)	74,84	74,86	74,87	74,89	74,90	75,00	75,03	75,06
2. Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,20	12,75	12,87	13,00	13,27	13,55	13,97	14,23
3. Rata-rata lama sekolah (tahun)	7,85	7,88	7,93	8,02	8,20	8,40	8,50	8,64
4. Pengeluaran Perkapita Rill Sehari Disesuaikan	8.274	8.330	8.342	8.468	8.480	8.688	8.938	9.277
Indeks IPM								
1. Indeks Kesehatan	Tidak dipublish							
2. Indeks Pengetahuan	Tidak dipublish							
Indeks Harapan Lama Sekolah	Tidak dipublish							
Indeks Rata-rata Lama Sekolah	Tidak dipublish							
3. Indeks Pendapatan	Tidak dipublish							
IPM	68,83	69,53	69,74	70,14	70,68	71,52	72,38	73,23

Sumber : BPS Kabupaten Kulon Progo

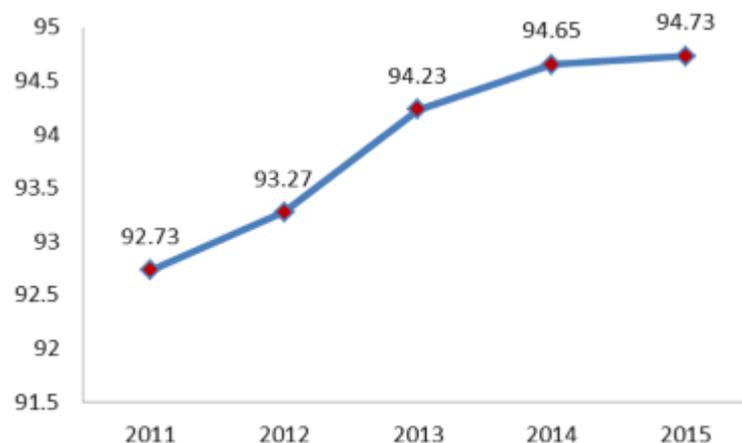
3 . 2 . 6 Indeks Pembangunan Gender

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai penggabungan beberapa indikator yang telah dibahas sebelumnya menjadi satu indeks komposit yang dikenal sebagai Indeks Pembangunan Gender (IPG). IPG mengukur angka rata-rata pencapaian dalam kemampuan dasar sama seperti dalam IPM yaitu kesehatan (angka harapan hidup), pendidikan (angka melek huruf rata-rata lama sekolah), dan ekonomi (kontribusi pendapatan) tetapi dengan penyesuaian untuk memperhitungkan ketimpangan gender.

Titik berat pembangunan gender adalah berupaya memberdayakan manusia tanpa membedakan gender sehingga mereka memiliki pilihan yang lebih luas dalam menjalani kehidupan. Upaya tersebut dijabarkan melalui akses yang lebih luas bagi penduduk untuk meningkatkan derajat kesehatan, memperoleh pengetahuan dan keterampilan, dan peluang menaikkan taraf ekonomi rumah tangga yang pada akhirnya akan mendorong partisipasi mereka dalam pelaksanaan pembangunan.

Nilai IPG berkisar antara 0 hingga 100. Apabila nilai IPG sama dengan IPM artinya tidak ada ketimpangan gender. Nilai IPG yang lebih rendah dari IPM menunjukkan adanya ketimpangan gender. Sebagai indikator komposit, IPG hanya memberikan gambaran secara agregat, sedangkan implementasi hasil perhitungan IPG dalam program pembangunan membutuhkan kajian lebih jauh pada indikator atau variable yang terkait dengan komponen penyusun IPG.

Gambar 3.2 menunjukkan perkembangan IPG Kabupaten Kulon Progo tahun 2011-2015. Pada tahun 2015 menunjukkan perubahan yang signifikan dibandingkan tahun 2011 yaitu dari 92,73 menjadi 94,73. Hasil perhitungan IPG pada tahun 2016 sudah mencapai angka 94,42, hal ini menunjukkan kenaikan dibanding tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun 2014, untuk wilayah DI Yogyakarta, nilai IPG Kabupaten Kulon Progo berada di peringkat 4 setelah Kota Yogyakarta, Sleman dan Bantul.



Gambar 3.2. Perkembangan IPG Kabupaten Kulon Progo Tahun 2011 - 2015

Selain memperhatikan perubahan angka indeksnya, mengingat IPG merupakan indeks komposit maka perlu dikaji juga beberapa perubahan pada komponen pembentuknya. Komponen kesehatan dan pendidikan mengalami perkembangan cukup tinggi, sedangkan ekonomi (variable pendapatan) relatif tidak mengalami perubahan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perempuan di dunia kerja masih perlu terus ditingkatkan.

Tabel 3.28
Indikator Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2015-2016

Uraian	2015	2016
Komponen IPG		
1. Angka Harapan Hidup (tahun)	75,00	75,03
2. Harapan Lama Sekolah (tahun)	13,55	13,97
3. Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	8,40	8,50
4. Kontribusi perempuan terhadap Pendapatan (000 Rp)	-	-
Indeks IPG		
1. Kesehatan	-	-
2. Pendidikan	-	-
3. Pendapatan	-	-
IPM Perempuan	94,73	94,42
IPG		

Sumber: BPS Kulon Progo

Pada tabel 3.29 dibawah ini terlihat bahwa nilai IPG semua kabupaten/kota di D.I Yogyakarta pada tahun 2015. Tahun 2015 nilai IPG Kabupaten Kulon Progo menduduki peringkat ketiga setelah Kota Yogyakarta dan Sleman.

Tabel 3.29
Indeks Pembangunan Gender (IPG) D.I Yogyakarta Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2015

KABUPATEN/KOTA	IPM	IPG
Kulon Progo	71,52	94,73
Bantul	77,99	94,42
Gunung Kidul	67,41	83,10
Sleman	81,20	96,08
Kota Yogyakarta	84,56	98,78
D.I. Yogyakarta	77,59	94,41

Sumber: BPS Kulon Progo

Dari Tabel 3.30 terlihat bahwa nilai IPG Kabupaten Kulon Progo sejak tahun 2011 hingga tahun 2016 terus mengalami peningkatan. Di tahun 2011 nilai IPG Kulon Progo mencapai 92,73, meningkat menjadi 93,27 di tahun 2012 dan menjadi 94,23 di tahun 2013. Peningkatan yang sama terjadi pada tahun 2014, 2015 dan 2016 dengan nilai IPG masing-masing 94,65, 94,73 dan 94,42.

Tabel 3.30

Capaian IPM dan IPG Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010-2017

Tahun	Nilai IPM	Nilai IPG
(1)	(2)	(3)
2010	68,83	Data tidak tersedia
2011	69,53	92,73
2012	69,74	93,27
2013	70,14	94,23
2014	70,68	94,65
2015	71,52	94,73
2016	72,38	94,42
2017	73,23	Data belum tersedia

Sumber : BPS Kabupaten Kulon Progo

3.2.7 Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Pandangan masyarakat telah banyak mengalami pergeseran ke arah kemajuan seiring dengan perkembangan iklim social budaya yang semakin kondusif. Saat ini semakin banyak perempuan yang ikut dalam menentukan arah dan gerak pembangunan bangsa. Perempuan telah banyak berpartisipasi dalam sector public, baik bidang legislatif, eksekutif, yudikatif, atau di ranah politik.

3.2.7.1 Partisipasi dalam bidang legislatif

Seberapa besar azas demokrasi telah diterapkan di suatu daerah dapat tercermin dari komposisi anggota DPR menurut jenis kelamin di daerah tersebut. Dalam kondisi ideal,

komposisi penduduk yang hampir berimbang antara jumlah laki-laki dan perempuan maka komposisi anggota DPRD-nya semestinya seimbang.

Tabel 3.31
Banyaknya Anggota DPRD Menurut Jenis Kelamin Di Kabupaten Kulon Progo
Tahun 2009-2014 Dan 2014-2019

Jenis Kelamin	2009-2014		2014-2019	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	2	3	4	5
Perempuan	5	14,29	7	17,50
Laki-Laki	35	85,71	33	82,5
Jumlah	40	100	40	100

Sumber : Setwan Kabupaten Kulon Progo

Namun kenyataannya yang terjadi di beberapa daerah masih jauh dari harapan tersebut. Jumlah anggota DPRD Kabupaten Kulon Progo saat ini masih didominasi oleh laki-laki, yaitu sebesar 84 persen dari seluruh anggota, sementara jumlah perempuan hanya 16 persen. Tabel 3.31 diatas menunjukkan bahwa persentase perempuan sebagai anggota legislatif masih tergolong rendah. Rendahnya anggota legislatif perempuan dikarenakan masih kurangnya kemampuan dalam menyampaikan pendapat, kurangnya kepercayaan diri, minat dan kesempatan perempuan dibidang politik.

3.2.7.2 Partisipasi dalam Bidang Eksekutif

Selain sebagai politisi di lembaga legislatif, dalam kehidupan publikpun perempuan dapat berperan, seperti di lembaga eksekutif sebagai Aparatur Sipil Negara.

Tabel 3.32
Jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo
Menurut Jenis Kelamin Tahun 2016 Dan 2017

Jenis Kelamin	2016		2017	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	2	3	4	5
Perempuan	3509	53%	3930	52%
Laki-Laki	3109	47%	3694	48%
Jumlah	6618	1005	7624	100

Sumber : BKPP Kabupaten Kulon Progo

Data dari Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Kabupaten Kulon Progo menunjukkan bahwa pada tahun 2016 proporsi perempuan yang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo lebih besar dibandingkan laki-laki yaitu 53% persen berbanding 47% persen. Pada tahun 2017, proporsi perempuan ASN Pemerintahan Kabupaten Kulon Progo menurun menjadi 52 persen, sehingga proporsi laki-laki meningkat menjadi 48 persen. Dari tabel 3.32 di atas juga menunjukkan bahwa seks rasio ASN di Kabupaten Kulon Progo pada tahun 2017 adalah 93,99. Dengan demikian maka dapat dikatakan bahwa terdapat sekitar 94 orang ASN laki-laki untuk setiap 100 orang PNS perempuan.

Pada paragraf sebelumnya telah dijelaskan bahwa jumlah ASN perempuan lebih banyak dibanding laki-laki. Akan tetapi apabila diperhatikan lebih jauh, ternyata jumlah perempuan yang memegang jabatan (terutama Eselon tiga keatas) atau menjadi pimpinan masih sangat timpang jumlahnya. Perempuan yang memegang jabatan, dari sisi jumlah maupun persentase terlihat lebih kecil dibandingkan dengan laki-laki. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 3.32 berikut :

Tabel 3.33
Jumlah Pejabat Menurut Jenis Jabatan Dan Jenis Kelamin Di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2017

Jenis Jabatan	Perempuan		Laki-Laki		Perempuan+Laki-Laki	
	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1	2	3	4	5	6	7
Eselon IIa	-		1	100%	1	100
Eselon IIb	4	15%	22	85%	26	100

Eselon IIIa Camat	1	8%	11	92%	12	100
Eselon IIIa Non Camat	7	17%	34	83%	41	100
Eselon IIIb	27	30%	64	70%	91	100
Eselon IVa	154	40%	230	60%	384	100
Eselon IVb	24	38%	39	62%	63	100
Jumlah	217	35%	401	65%	618	100

Sumber : BKPP Kabupaten Kulon Progo

Pada tahun 2017, Jumlah Jabatan Eselon IVa sebanyak 150 jabatan dan 40 persen dipegang oleh perempuan. Jumlah jabatan eselon IVa sebanyak 384, sedangkan perempuan yang menduduki Jabatan Eselon IVb sebanyak 24 orang atau sekitar 38 persen dari 63 jabatan yang tersedia. Jumlah perempuan yang menduduki Eselon IIIa Non Camat sebanyak 7 dari 41 jabatan yang tersedia, atau sekitar 17 persen. Dominasi laki-laki terhadap perempuan sangat terlihat dari jumlah camat. Dari 12 kecamatan, 11 jabatan di pegang oleh camat laki-laki dan hanya 1 camat perempuan. Jumlah perempuan yang menduduki jabatan Eselon IIIb sebanyak 27 orang dari 91 jabatan yang tersedia atau 30 persen. Sementara itu, perempuan yang menduduki jabatan Eselon Iib adalah 4 orang (15 persen) dari 26 jabatan. Sedangkan jabatan Eselon Iia yang hanya 1 orang dijabat oleh laki-laki.

3.3 Pembangunan Keluarga

Keluarga mempunyai peran baik fungsi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Fungsi ekonomi diharapkan dapat mendorong keluarga agar dapat membina kualitas kehidupan ekonomi keluarga, sekaligus dapat bersikap realistis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan keluarga. Fungsi pendidikan, bukan hanya berhubungan dengan kecerdasan, melainkan juga termasuk pendidikan emosional dan juga pendidikan spiritualnya. Fungsi kesehatan diartikan bahwa setiap keluarga dapat menerapkan cara hidup sehat dan mengerti tentang kesehatan reproduksinya. Termasuk di dalamnya adalah pemahaman tentang alat kontrasepsi maupun pengetahuan penyiapan kehidupan berkeluarga bagi para remaja.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), fungsi keluarga dibagi menjadi delapan. Fungsi keluarga yang dikemukakan oleh BKKBN ini senada dengan fungsi keluarga menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga Pasal 7 ayat (2), yaitu :

1. Fungsi keagamaan, yaitu memperkenalkan dan mengajak anak dan anggota keluarga yang lain dalam kehidupan beragama, dan tugas kepala keluarga untuk menanamkan bahwa ada kekuatan lain yang mengatur kehidupan ini dan ada kehidupan lain setelah di dunia.
2. Fungsi sosial budaya, dilakukan dengan membina sosialisasi pada anak, membentuk norma-norma dan tingkah laku sesuai dengan tingkat perkembangan anak, meneruskan nilai-nilai budaya keluarga.
3. Fungsi cinta kasih, diberikan dalam bentuk memberikan kasih sayang dan rasa aman, serta memberikan perhatian di antara anggota keluarga.
4. Fungsi perlindungan, bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan-tindakan yang tidak baik, sehingga anggota keluarga merasa terlindung dan merasa aman.
5. Fungsi reproduksi, merupakan fungsi yang bertujuan untuk meneruskan keturunan, memelihara dan membesarkan anak, memelihara dan merawat anggota keluarga
6. Fungsi sosialisasi dan pendidikan, merupakan fungsi dalam keluarga yang dilakukan dengan cara mendidik anak sesuai dengan tingkat perkembangannya, menyekolahkan anak. Sosialisasi dalam keluarga juga dilakukan untuk mempersiapkan anak menjadi anggota masyarakat yang baik.
7. Fungsi ekonomi, adalah serangkaian dari fungsi lain yang tidak dapat dipisahkan dari keluarga. Fungsi ini dilakukan dengan cara mencari sumber-sumber penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, pengaturan penggunaan penghasilan keluarga

untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dan menabung untuk memenuhi kebutuhan keluarga dimasa datang.

8. Fungsi pembinaan lingkungan

Merupakan fungsi keluarga untuk menciptakan lingkungan hidup baik fisik maupun non fisik yang sejuk, sehat dan penuh dengan kenyamanan.

Tidak berfungsinya keluarga secara baik terutama disebabkan oleh masih banyaknya keluarga yang hidup di bawah garis kemiskinan. Dampak dari tidak berfungsinya keluarga secara optimal adalah munculnya beberapa permasalahan dari sisi internal maupun eksternal.

Dari sisi internal keluarga, beberapa dampak yang teridentifikasi adalah sebagai berikut

- Penyikapan terhadap pola berkeluarga
Sebagian keluarga belum memahami pola keluarga yang ideal sehingga ketidapahaman ini menghambat implementasi pola keluarga ideal
- Pemenuhan hak dasar keluarga
Pemenuhan hak dasar keluarga, seperti partisipasi dalam pendidikan serta akses terhadap pelayanan kesehatan, perumahan dan sosial, belum sepenuhnya tercapai.
- Berkaitan dengan ketahanan keluarga
 - Tingginya kasus ketidakharmonisan dan perceraian keluarga yang disebabkan terutama oleh faktor sosial ekonomi
 - Tingginya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)
 - Adanya konflik antar kelompok. Potensi konflik juga terjadi antara penduduk asli dengan penduduk pendatang utamanya di perumahan
 - Rendahnya partisipasi keluarga untuk terlibat dalam organisasi di masyarakat

- Rendahnya kemampuan keluarga dalam memelihara kearifan lokal dan mengelola sumber daya

Dampak eksternal keluarga yang dapat dicatat adalah sebagai berikut:

- Daya dukung lingkungan

Pertambahan penduduk yang meningkat akhir-akhir ini menyebabkan daya dukung lingkungan berkurang, seperti beralih fungsinya lahan produktif (sawah dan perkebunan) untuk permukiman dan makin berkurangnya ketersediaan air bersih. Penduduk yang bertambah mengakibatkan mobilitas yang tinggi dan meningkatkan jumlah transportasi. Hal ini menyebabkan pencemaran udara yang berpengaruh pada gangguan kesehatan. Pertambahan penduduk meningkatkan jumlah limbah rumah tangga/indusru dan sampah sehingga pencemaran lingkungan yang akan menyebabkan gangguan kesehatan.

- Penyikapan terhadap program yang prokeluarga. Kebijakan dan program pendukung kesejahteraan keluarga yang dilakukan oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat belum terintegrasi dan terkoordinasi.

Mengacu kepada UU No 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga bahwa pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Pasal 1 ayat 10 menyebutkan bahwa keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, maju, sehat, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan YME.

Tidak berfungsinya sistem keluarga secara baik yang masuk disebabkan oleh keluarga miskin, keluarga kurang sejahtera dan kurang berketahanan sosial. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.34

Tabel 3.34

Keluarga Miskin Menurut Kecamatan Dan Lapangan Pekerjaan Utama Kepala Keluarga Di Kabupaten Kulon Progo 2017

Kecamatan	Lapangan Pekerjaan Utama							
	Tidak Bekerja	pertanian dan palawija	pertanian lainnya	industri	perdagangan	jasa	lainnya	jumlah
Temon	2320	3620		2	138	356	4845	11281
Wates	3606	2921		4	562	1953	6997	16043
Panjatan	4347	6274		4	179	402	6283	17489
Galur	3032	4282		2	259	835	5740	14150
Lendah	2653	5287		4	174	1143	7925	17186
Sentolo	5066	7089		7	93	3741	9632	25628
Pengasih	5268	6536		7	578	2500	10160	25049
Kokap	3868	9471		0	104	878	6950	21271
Girimuyo	1932	6802		1	70	120	4857	13782
Nanggulan	2482	5497		1	206	713	6414	15313
Samigaluh	2657	6963		2	189	210	6169	16190
Kalibawang	2583	8979		1	45	102	5283	16993
Jumlah	39814	73721		35	2597	12953	81255	210375

Sumber : Bappeda Kulon Progo

Tabel 3.35 menunjukkan bahwa di Kabupaten Kulon Progo terdapat 39.814 KK miskin yang tidak bekerja. KK miskin yang tidak bekerja paling banyak di Kecamatan Pengasih (5.268 KK) paling rendah di Kecamatan Girimulyo (1932 KK). Berdasarkan kondisi tersebut maka diperlukan suatu kebijakan terkait dengan penciptaan lapangan kerja terutama pada masyarakat miskin. Sebagian keluarga miskin tersebut bekerja di sektor pertanian dan palawija (73.721 KK) kemudian di sektor jasa (12.953 KK). Rumah tangga miskin yang bekerja di sektor jasa paling banyak ada di kecamatan Sentolo yaitu 3.741 KK, kemudian Kecamatan Pengasih 2.500 KK dan yang paling rendah adalah Kecamatan Kalibawang 102 KK.

Tabel 3.35
Persentase Keluarga Miskin Menurut Kecamatan Dan Lapangan Pekerjaan Utama Kepala Keluarga Di Kabupaten Kulon Progo 2017

Kecamatan	Lapangan Pekerjaan Utama (%)
-----------	------------------------------

	Tidak Bekerja	pertanian dan palawija	pertanian lainnya	industri	perdagangan	jasa	lainnya	jumlah
Temon	1,10	1,72		0,001	0,07	0,17	2,30	5,36
Wates	1,71	1,39		0,002	0,27	0,93	3,33	7,63
Panjatan	2,07	2,98		0,002	0,09	0,19	2,99	8,31
Galur	1,44	2,04		0,001	0,12	0,40	2,73	6,73
Lendah	1,26	2,51		0,002	0,08	0,54	3,77	8,17
Sentolo	2,41	3,37		0,003	0,04	1,78	4,58	12,18
Pengasih	2,50	3,11		0,003	0,27	1,19	4,83	11,91
Kokap	1,84	4,50		0	0,05	0,42	3,30	10,11
Girimuyo	0,92	3,28		0,0005	0,03	0,06	2,31	6,55
Nanggulan	1,18	2,61		0,0005	0,10	0,34	3,05	7,28
Kalibawang	1,26	3,31		0,001	0,09	0,10	2,93	7,70
Samigaluh	1,23	4,27		0,0005	0,02	0,05	2,51	8,08
Jumlah	18,93	35,04		0,017	1,23	6,16	38,62	100,00

Sumber : Bappeda Kulon Progo

Persentase penduduk miskin berdasarkan lapangan kerja utama menunjukkan bahwa 35,04 persen dari lapangan kerja yang diterapkan oleh rumah tangga miskin ada sektor pertanian dan palawija. Sementara sektor jasa terdapat sebanyak 6,16 persen rumah tangga miskin. Berdasarkan sebaran wilayah per kecamatan, sektor pertanian banyak berada di Kecamatan Kokap (4,50 persen) dan yang paling rendah adalah Kecamatan Wates yaitu 1,39 persen (lihat tabel 3.34). selain sektor pertanian dan jasa, sebagian rumah tangga miskin bekerja pada sektor perdagangan (1,32 persen), industri (0,017 persen), dan sektor lainnya (38,62 persen).

3.4 Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Sebagai daerah yang berkembang, Kulon Progo dihadapkan pada masalah mobilitas penduduk. Kesenjangan pembangunan antar wilayah merupakan salah satu penyebab terjadinya permasalahan persebaran penduduk. Kecenderungannya adalah arus mobilitas penduduk berasal dari daerah yang belum maju ke daerah yang lebih maju. Di pihak lain, mobilitas penduduk semakin meningkat seiring dengan peningkatan sarana dan prasarana

transportasi, komunikasi, industrialisasi, dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa faktor tersebut turut menjadi penentu arah, arus, dan volume mobilitas penduduk.

Migrasi masuk ke Kulon Progo pada tahun 2016 diketahui sebanyak 4.689 jiwa perician 3.107 laki-laki dan 1.582 perempuan. Sementara migrasi keluar dari Kulon Progo pada 2016 dan berpindah ke daerah lain di DIY maupun luar provinsi mencapai 4.257 jiwa yang terdiri dari 2.405 laki-laki dan 1.852 perempuan. Dengan demikian diketahui migrasi bersih di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016 mencapai 432 jiwa (Tabel 3.36)

Data pada 2017 menunjukkan terjadi perubahan jumlah migrasi masuk dan migrasi keluar Kulon Progo. Migrasi masuk mencapai 4.310 jiwa (laki-laki sebanyak 2.809 jiwa dan 1.501 perempuan) atau turun sebesar 8,08 persen dibandingkan dengan tahun 2016. Sedangkan migrasi keluar Kulon progo juga menunjukkan penurunan yang cukup besar yaitu 975 jiwa atau mencapai 22,90 persen dibandingkan dengan tahun 2016. Total migrasi bersih tahun 2017 sebesar 1.028 jiwa atau naik sebesar 137,96 persen di bandingkan dengan tahun 2016.

Tabel 3.36
Migrasi Bersih Kabupaten Kulon Progo Tahun 2016-2017

Migrasi	2016			2017		
	Laki-Laki	Perempuan	Total	Laki-Laki	Perempuan	Total
Migrasi Masuk	3.107	1.582	4.689	2.809	1.501	4.310
Migrasi Keluar	2.405	1.852	4.257	1.796	1.486	3.282
Migrasi Bersih	702	270	432	1.013	15	1.028

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo

3.5 Data dan Informasi Kependudukan

Dalam pembangunan kependudukan, administrasi kependudukan sebagai suatu sistem merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari administrasi pemerintahan dan administrasi negara dalam rangka pemberian perlindungan terhadap hak-hak individu penduduk, melalui layanan publik dalam bentuk penerbitan dokumen kependudukan (KTP, KK Akta Catatan

Sipil). Sesuai amanat UU No.23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagai landasan hukum pelaksanaan kebijakan administrasi kependudukan dan data dasar (*database*) kependudukan DIY dan terwujudnya tertib administrasi kependudukan, pada gilirannya nanti akan dapat didayagunakan untuk kepentingan-kepentingan perumusan kebijakan pemerintahan dan perencanaan pembangunan yang berbasis administrasi kependudukan, sehingga akan terwujud pembangunan administrasi kependudukan yang berkelanjutan.

Sumber data kependudukan dapat diambil dari beberapa sumber sebagai berikut.

1. Sensus penduduk dengan informasi yang dikumpulkan bersifat umum, dilakukan di seluruh Indonesia, untuk semua penduduk, tidak menggunakan sampel penduduk atau sampel wilayah, dan dilakukan setiap sepuluh tahun sekali.
2. Survei kependudukan untuk pengumpulan data umum dan khusus. Untuk data kependudukan yang umum adalah Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang dilaksanakan 10 tahun sekali dan khusus misalnya Sakernas untuk bidang ketengakerjaan yang di kumpulkan dua kali setahun. Disamping itu, Indonesia juga melaksanakan survey sosial ekonomi nasional (Susenas) yang terdiri dari Susenas inti untuk pengumpulan data pokok bidang sosial ekonomi yang dilakukan sekali setahun dan Susenas Modul untuk data yang lebih rinci atau khusus, seperti pendapatan, pengeluaran, kesehatan, pendidikan, perumahan, lingkungan tempat tinggal, dan sosial budaya lainnya yang dilakukan setiap tiga tahun. Di luar kedua survei ini, masih ada yang lain, seperti SDKI serta survei Upah dan perjalanan dan lain sebagainya.
3. Registrasi atau pendaftaran penduduk yang dilakukan setiap saat apabila ada perubahan status kependudukan dalam sistem ini, penduduk dan/atau rumah tangga harus melaporkan perubahan status kependudukan mulai dari RT, RW dan Dusun. Apabila penduduk pasif melaporkan kepada petugas pencatatan dan pelaporan, akan terjadi kekurangan cacah perubahan status kependudukan yang terajadi. Sifat pasif dalam

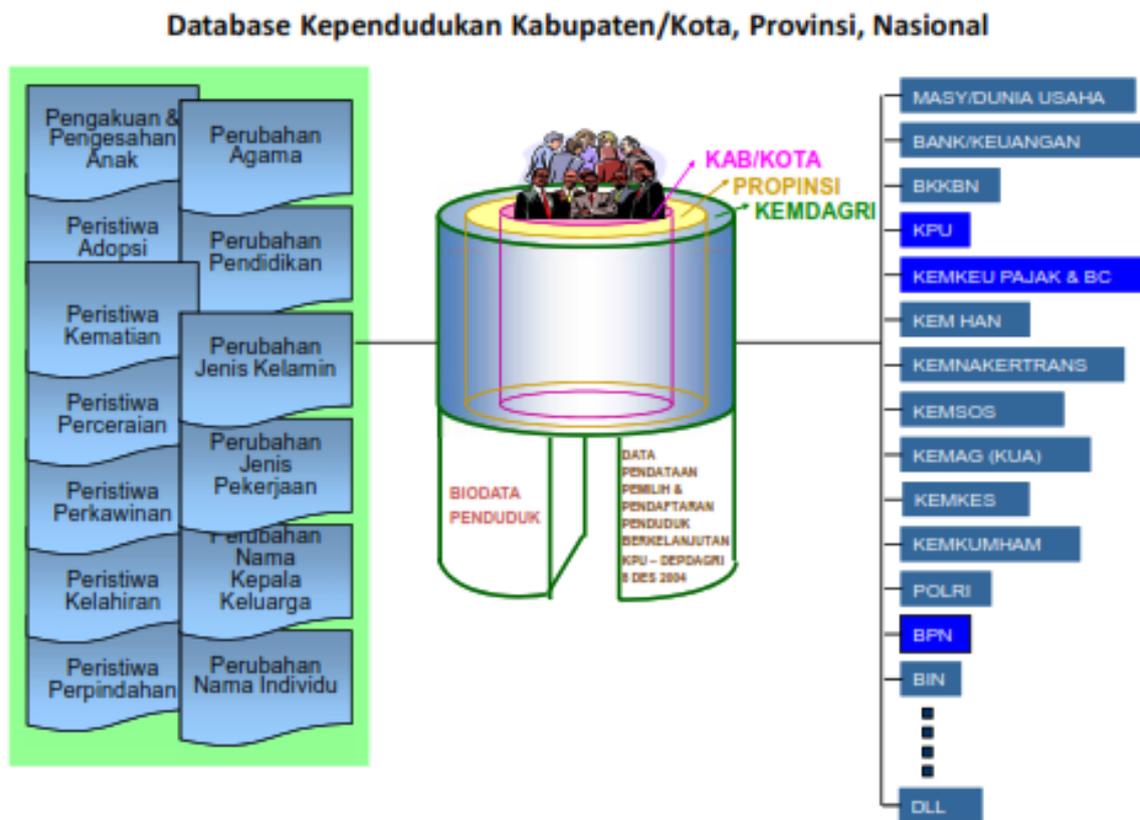
melaporkan perubahan status kependudukan merupakan kelemahan utama pelaksanaan registrasi/pendaftaran penduduk. Secara normatif, registrasi penduduk merupakan sumber data yang paling ideal. Hal ini didasarkan pada karakteristik data registrasi penduduk.

- a. Pertama, dari sisi cakupan, registrasi penduduk dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia mencakup unit administrasi kecil, yaitu desa/kelurahan. Hal ini memungkinkan untuk perencanaan pembangunan secara menyeluruh.
- b. Kedua, registrasi penduduk dilaksanakan secara kontinu sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan setiap waktu.

Sebagai sumber data yang ideal, registrasi penduduk sampai saat ini masih belum di manfaatkan secara optimal. Salah satu masalahnya adalah kualitas data yang rendah. Sumber masalah tersebut diantaranya adalah penggunaan sistem pasif yang dalam tingkat tertentu bersamaan dengan kurangnya kesadaran penduduk untuk melaporkan kehadiran demografis, menyebabkan data yang terkumpul under reporting. Persoalannya yaitu perlu dicari pemecahannya adalah membuat penduduk lebih proaktif untuk melaporkan perubahan status kependudukan kepada petugas yang berwenang pada tingkat dusun, desa bahkan RT sebagai ujung tombak pendaftaran penduduk. Memperkuat pemahaman dalam pencatatan dan pelaporan pada lini paling bawah ini sangat penting karena kelengkapan dan kualitas data berada pada tingkat desa. Pada tingkat desa inilah sebagian besar daftar isian atau formulir pencatatan tersedia secara lengkap.

Data dasar (*database*) kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur, dan saling berhubungan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras, dan jejaring komunikasi data. Untuk itu, diperlukan adanya penataan administrasi kependudukan yang merupakan rangkaian kegiatan

penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik, pembangunan sektor lain.



Gambar 3.3 Data dasar (database) kependudukan di Indonesia

Untuk membangun Data Dasar (database) Kependudukan, saat ini sedang dibangun sistem informasi administrasi kependudukan (SIAK) dalam rangka administrasi kependudukan yang terdiri dari hal-hal berikut :

1. Sistem pendaftaran penduduk (Dalduk)
 - Pencatatan biodata penduduk per keluarga
 - Pencatatan atas pelaporan peristiwa kependudukan
 - Pendataan penduduk renta kependudukan
 - Pelaporan penduduk yang tidak dapat melapor sendiri

2. Sistem pencatatan sipil

- Pencatatan kelahiran
- Pencatatan lahir mati
- Pencatatan perkawinan
- Pencatatan pembataln perkawinan
- Pencatatan perceraian
- Pencatatan kematian
- Pencatatan pengangkatan pengesahan dan pengakuan anak
- Pencatatan perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan
- Pencatatan peristiwa penting
- Pelaporan penduduk yang tidak dapat melapor sendiri

Hasil yang telah dicapai pada tahun 2010 adalah pemutakhiran data daar (database) kependudukan di semua kabupaten dan kota serta penerbitan Nomor Identitas Kependudukan (NIK) di 329 Kabupaten/Kota. NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK berlaku seumur hidup dan selamanya, yang diberikan oleh pemerintah dan diterbitkan oleh instansi pelaksana kepada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata. NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, SIM, NPWP, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah dan penerbitan dokumen identitas penduduk lainnya.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa masalah data dan informasi kependudukan yang muncul di Indonesia adalah belum teratutanya administrasi kependudukan dalam rangka membangun sistem pembangunan, pemerintahan, dan pembangunan yang berkelanjutan. Penataan sistem penyelenggaraan administrasi kependudukan telaii dimulai sejak tahun 1960-an, tetapi hingga saat ini belum terwujud. Walaupun telah ada peraturan tentang

pengelolaan sistem administrasi kependudukan, sampai saat ini belum dapat terwujud sistem informasi kependudukan yang memadai. Masih banyaknya pemersalahan administrasi kependudukan, seperti KTP ganda dan kesulitan pengurusan akta kelahiran. Selanjutnya, kesadaran masyarakat terhadap pentingnya dokumen kependudukan tertib administrasipun belum memadai. Bank data sebagai data dasar kependudukan juga belum tersedia.

Sementara itu, secara khusus beberapa permasalahan yang di hadapi terkait dengan kondisi Administrasi Kependudukan di Indonesia adalah sebagai berikut :

1. Regulasi

- Regulasi Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, baik di tingkat pusat maupun daerah, masih belum lengkap dan memadai. Hal ini menyebabkan lembaga legislatif sulit menyesuaikan diri dengan perkembangan TIK yang sangat pesat
- Harmonisasi regulasi antar instansi terkait dengan pemanfaatan database kependudukan dari pelayanan aplikasi SIAK masih perlu di intensifkan menuju konvergensi seluruh regulasi yang saling mendukung dalam rangka tertib administrasi kependudukan.

2. Kelembagaan

- Sinkronisasi struktur organisasi dengan tupoksi
Sinkronisasi struktur organisasi dengan tupoksi masih belum optimal. Oleh karena itu, pekerjaan setiap direktorat atau Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan tupoksinya menjadi terhambat
- Koordinasi kegiatan antarunit yang bermuara pada pencapaian visi
Kegiatan antar unit yang bermuara pada pencapaian visi belum terkoordinasi secara baik sehingga pencapaian visi itupun menjadi terhambat

3. Sumber Daya Manusia

Kemampuan SDM yang mendukung penerapan aplikasi SIAK sebagai sub sistem pengelolaan *database* kependudukan masih perlu ditingkat. Pemahaman SDM terhadap sistem ini masih sangat rendah dan jumlahnya masih sedikit. Hal ini akan berakibat terhambatnya penerapan dan pemanfaatan aplikasi SIAK.

4. Aplikasi dan *database* SIAK

- Penerapan aplikasi SIAK masih belum optimal karena terbatasnya kesiapan infrastruktur
- Konsolidasi data base dari kabupaten/kota kemudian ke pusat data pusat dan provinsi masih rendah. Meskipun daerah telah mengimplementasikan SIAK, konsolidasi data ke jenjang berikutnya (provinsi dan ke pusat) masih belum optimal.
- Penerapan tata kelola IT (*governance*) yang mendukung tercapainya tata administrasi kependudukan belum optimal
- Pemanfaatan *database* kependudukan masih mengalami kendala dan belum sesuai dengan harapan.

5. Nomor Induk Kependudukan Dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik

- Nomor Induk Kependudukan

Kondisi NIK yang ada masih belum pasti tunggal yang diindikasikan dengan masih terdapatnya penduduk yang memiliki beberapa NIK. Walaupun NIK diterbitkan adalah unik, beberapa NIK yang unik tersebut dimiliki oleh penduduk yang sama. Hal ini karena setiap database kependudukan belum tersambung melalui jaringan komunikasi data dan terkonsolidasi secara nasional serta belum termanfaatkan faktor ketiga dalam proses pemastian ketunggalan, yaitu karakteristik yang melekat pada diri seseorang, yaitu biometri sidik jari. Apabila NIK tunggal telah direalisasikan, maka pemanfaatan NIK tunggal sebagai kunci

akses pelayanan dapat memudahkan penduduk dalam registrasi dan transaksi, baik untuk layanan pemerintahan maupun non pemerintahan.

▪ **Kartu Tanda Penduduk Elektronik**

Masih banyak beredar KTP palsu dan KTP ganda yang dimanfaatkan untuk hal-hal ilegal, terorisme kriminal dan pemalsuan identitas. KTP yang bersifat nasional masih kurang di percaya sehingga banyak kebijakan lokal maupun isntitusi yang “mengharuskan” penduduk agar memiliki KTP di tempat penduduk tersebut bertransaksi. Hal ini tersebut dalam praktik berikut ini

▪ Di lapangan beberapa instansi “mengharuskan” penduduk memiliki KTP di tempat kejadian transaksi walaupun orng tersebut telah memiliki KTP dari tempat asal. Hal ini mendorong maraknya penerbitan KTP “lokal”, yang secara nasional akan berakibat pada penerbitan KTP ganda. Kebijakan yang melarang kepemilikan KTP ganda, baik untuk urusan administrasi pemerintahan maupun non pemerintahan, telah dikeluarkan. Namun permasalahan koordinasi, sosialisai dan penegakan (enforcement) kebijakan dengan lembaga/instansi terkait masih lemah sehingga praktik KTP ganda tetap berlangsung

▪ Potensi manipulasi data biodata penduduk tidak semua dapat terdeteksi dalam proses verifikasi dan validasi untuk penerbitan dokumen kependudukan. Pada banyak kasus data invalid masih dapat terdeteksi pada proses verifikasi dan validasi, tetapi sengaja dibiarkan agar dapat menerbitkan dokumen kependudukan. Sistem verifikasi dan validasi, serta kontrol prosedur/SOP Masih dapat dimanipulasi oleh faktor manusia. Diperlukan suau sistem dan mekanisme verifikasi dan validasi dari orientasi jati diri penduduk yang lebih kebal manipulasi (robust). Sistem e-KTP didesain lebih kebal manipulasi yang disebabkan oleh faktor manusia.

- KTP belum dapat dijadikan sebagai kartu identitas pemilih dalam pemilu nasional. Kehiatan pendaftaran penduduk untuk pembuatan Daftar Pemilih Tetap (DPT) harus melalui tahapan proses dan verifikasi sehingga hasil akhir DPT masih menimbulkan masalah. Pada pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2008, permasalahan DPT menyebabkan Mahkamah Konstitusi melegalkan penggunaan KTP dengan syarat tambahan tertentu, pada saat-saat terakhir menjelang dilaksanakannya pemilu. Namun hal tersebut bukanlah suatu solusi permanen. Sistem E-KTP akan lebih mempermudah kebijakan penggunaan KTP sebagai kartu identitas pemilih.

6. Infrastruktur TIK

Kondisi infrastruktur yang tersedia di lingkungan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri maupun di daerah masih terbatas. Untuk itu, perlu di tingkatkan pemerataan sarana dan prasarana infrastruktur pendukung operasional aplikasi SIAK

BAB IV

KONDISI KEPENDUDUKAN YANG DIINGINKAN

4.1 Kuantitas Penduduk

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Kulon Progo tahun 2015-2035 diketahui pada tahun 2015 jumlah penduduk Kulon Progo sebanyak 436.123 jiwa dengan perincian 216.651 laki-laki dan 219.472 perempuan. Jumlah tersebut akan bertambah menjadi 505.493 jiwa tahun 2035 sebagai akhir tahun proyeksi. Rata-rata pertambahan jumlah penduduk Kulon Progo setiap tahunnya mencapai 0,53 persen.

Berdasarkan jenis kelaminnya, jumlah penduduk Kulon Progo lebih banyak perempuan dibandingkan dengan laki-laki meskipun secara persentase semakin mengecil perbedaannya. Jika pada tahun awal proyeksi persentase penduduk laki-laki mencapai 49,63 persen dan perempuan 50,37 persen, perbedaan semakin menipis tahun 2035, yakni laki-laki sebesar 46,63 persen dan perempuan 50,37 persen.

Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan adalah tercapainya penduduk stabil dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Untuk mencapai kondisi ini jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk semakin stasioner. Indikator pencapaian penduduk tumbuh seimbang (PTS), adalah angka kelahiran total (TFR) sama dengan 2,1 per perempuan atau *Net Reproduction Rate* (Angka Reproduksi Bersih=NRR) sebesar 1 per perempuan (Tukiran, 2010).

Pencapaian Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) merupakan harapan kondisi kependudukan setiap daerah baik pada level negara ataupun level yang lebih kecil. Kondisi tersebut ditandai dengan jumlah bayi yang lahir diharapkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga penduduk menjadi stasioner dan kondisinya terus stabil seperti itu

(Iskandar, 1997; Tukiran, 2010). Capaian penduduk tumbuh seimbang juga ditandai dengan rendahnya nilai TFR yang berada pada angka 2,1 dan NRR1 (Tukiran, 2010). Dengan menggunakan indikator tersebut sebenarnya TFR dan NRR Kabupaten Kulon Progo belum memenuhi target. Berdasarkan proyeksi yang dilakukan diharapkan angka kelahiran total (TFR) di Kulon progo akan menjadi 1,6 per perempuan atau *Net Reproduction Rate* (NRR) sebesar 1 pada tahun 2020. Selanjutnya secara berlanjut angka fertilitas total menjadi 2,03 per wanita dan NRR menjadi 0,9 pada tahun 2025. Kondisi ini akan terus turun sampai dengan tahun 2030 dan TFR menjadi 1,97 dan nilai NRR sebesar 0,9.

Kabupaten Kulon Progo merupakan bagian dari DIY yang memiliki nilai TFR yang masih tinggi. Oleh karena itu pada tahun 2035 Kabupaten Kulon Progo menargetkan TFR yang lebih rendah lagi yaitu sebesar 1,91 per wanita usia subur. Salah satu aspek yang mendukung penurunan tersebut adalah adanya program Keluarga Berencana yang gencar di terapkan di Kulon Progo. Seperti diketahui negara-negara maju TFR yang rendah akan menciptakan kemajuan. Di negara maju TFR mencapai 1,5 per wanita atau bahkan nilai TFR nya lebih rendah dari 1 per wanita. Hal ini di karenakan penduduk yang terus menurun akibat fertilitas yang sangat rendah akan mengakibatkan proporsi produktif sangat banyak. Banyak kondisi ini maka akan dapat tercipta bonus demografi (*demographic deviden*), yang muaranya adalah kondisi kesejahteraan akan terwujud.

Disisi lain, angka kematian di Kabupaten Kulon Progo diproyeksikan terus naik dari tahun dasar 2015 sampai 2035. Total jumlah kematian yang terjadi pada 2015 mencapai 10,65 dan meningkat menjadi 11,84 tahun 2035. Kenaikan angka kematian tersebut tercatat sebesar 1,19 persen selama jangka waktu 20 tahun atau rata-rata 0,06 persen per tahun . Berdasarkan jenis kelaminnya, kematian laki-laki di Kabupaten Kulon Progo lebih tinggi daripada kematian perempuan. Pada tahun 2015 jumlah kematian laki-laki sebesar 75 jiwa dan terus naik sampai tahun 2035 dengan kematian sebesar 76 jiwa. Sedangkan untuk

kematian perempuan, pada tahun 2015 jumlah kematiannya sebesar 71 jiwa dan pada tahun 2035 meningkat menjadi sebesar 72 jiwa. Tingginya jumlah kematian laki-laki dibandingkan perempuan disebabkan oleh tingginya harapan hidup perempuan di banding laki-laki. Pada tahun 2035, angka harapan hidup perempuan sebesar 77,56. Sementara laki-laki hanya 75,04 Hal ini menunjukkan risiko kematian perempuan jauh lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki.

Dari aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata, tidak hanya terkonsentrasi di kecamatan-kecamatan yang berada di dataran rendah saja. Demikian juga halnya dengan urbanisasi, diharapkan prosesnya dapat terjadi di semua arah, disemua kecamatan. Patut di sadari bahwa beberapa kecamatan yang berada di Perbukitan Menoreh memiliki tingkat urbanisasi yang rendah.

4.2 Kualitas Penduduk

Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak (UU No. 52 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 5). Pengembangan kualitas penduduk dilakukan untuk mewujudkan manusia yang sehat jasmani dan rohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yang tinggi. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, pembangunan kualitas penduduk difokuskan pada unsur pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

Dari sisi lain pendidikan target utama adalah angka melek huruf mencapai 100 persen. Hal ini di dukung oleh angka partisipasi murni (APM) untuk SD mencapai 100 persen. APM

untuk SLP diharapkan terus mencapai 100 persen dengan memperhatikan trend selama 30 tahun terakhir.

4.3 Kondisi Keluarga

Kondisi keluarga di Kabupaten Kulon Progo yang diinginkan melalui pembangunan keluarga adalah terwujudnya keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial yang melaksanakan delapan fungsi keluarga secara maksimal. Delapan fungsi keluarga ini diharapkan dapat menjadi pijakan dan tuntunan dalam menjadi roda-roda kehidupannya untuk mencapai keluarga yang berkualitas, sejahtera, dan berketahanan sosial sebagai berikut.

- a. Keluarga yang bertakwa kepada Tuhan YME, yaitu keluarga berdasarkan pernikahan yang sah menurut hukum negara
- b. Keluarga sejahtera, sehat, maju, mandiri, dan harmonis yang berkeadilan dan berkesetaraan gender dengan jumlah anak yang ideal sesuai kemampuan keluarga tersebut
- c. Keluarga yang berketahanan sosial, yaitu :
 - 1) Keluarga yang memiliki perencanaan sumber daya keluarga
 - 2) Keluarga berwawasan nasional, yaitu keluarga yang mengembangkan kepribadian dan budaya bangsa Indonesia
 - 3) Keluarga yang berkontribusi dengan masyarakat, yaitu keluarga yang mampu berperan serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan dan memiliki kepedulian terhadap lingkungannya
 - 4) Keluarga yang berkontribusi kepada bangsa dan negara serta berpartisipasi dalam kegiatan bela negara, taat membayar pajak, patuh terhadap peraturan perundangan yang berlaku

4.4 Persebaran dan Mobilitas Penduduk

Dari aspek mobilitas penduduk, kondisi yang diinginkan adalah terjadinya persebaran penduduk yang lebih merata, sehingga pertumbuhan penduduk positif dapat terjadi di Kabupaten Kulon Progo. Demikian juga halnya dengan urbanisasi, diharapkan agar penduduk tidak datang berbondong-bondong datang ke kecamatan yang memiliki kepadatan penduduk tinggi seperti Kecamatan Pengasih, Wates, Sentolo, dan Temon. Kondisi persebaran penduduk yang diinginkan adalah persebaran penduduk yang merata dan pengaturan mobilitas sesuai dengan potensi daerahnya. Tentunya yang diharapkan adalah adanya penataan dan persebaran yang proporsial sesuai daya dukung alam dan lingkungan.

4.5 Database Kependudukan

Kondisi yang diinginkan dari pembangunan data dan informasi kependudukan secara umum dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Tersusunnya sistem survei dan pengumpulan data kependudukan yang terpadu sesuai dengan kebutuhan.
2. Tersusunnya sistem database kependudukan sehingga diharapkan dapat diperoleh data dan informasi kependudukan yang andal, akurat, rill dan dapat digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan secara cepat

Enam kategori isu-isu strategis :

1. Regulasi dan kebijakan
2. Kelembagaan
3. Sumber Daya Manusia (SDM)
4. Aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK)
5. NIK

6. Infrastruk Teknologi Informasi Dan Komunikasi (TIK) saling terkait satu sama lain.

Demikian pula untuk prioritas pemecahan masalah setiap isu-isu strategis tersebut.

Regulasi dan kebijakan yang berkenaan dengan kependudukan yang telah ada, tetapi masih perlu penjelasan yang lebih rinci, terutama untuk operasionalisasi regulasi dan kebijakan tersebut di daerah-daerah. Operasionalisasi regulasi dan kebijakan tersebut harus diiringi dengan *enforcement* dan pemberian sanksi bagi yang melanggar regulasi dan kebijakan. Di samping itu, regulasi dan kebijakan tersebut perlu secara sistematis disosialisasikan kepada semua pemangku kepentingan yang terkait dengan data kependudukan. Pembuatan operasionalisasi alur kerja ini akan menjamin standarisasi pelaksanaan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK). Regulasi dan perundang-undangan serta standarisasi ini tidak akan dapat berjalan secara optimal jika sekiranya tidak didukung oleh kelembagaan yang baik.

Kelembagaan di lingkungan Ditjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah tertata dengan baik. Semua fungsi SAK dan SIAK telah terbagi kedalam unit-unit yang ada. Setiap unit memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang terdefiniskan dengan jelas. Beberapa unit masih perlu mensinkronkan dan mengkoordinasikan pelaksanaan tupoksinya. Disamping itu, perlu ditetapkan indikator kinerja setiap unit agar irama kerja sama antar unit dapat menghasilkan produk layanan yang optimal. Sementara itu, kelembagaan yang jelas dan tegas menetapkan Dinas Kependudukan untuk menangani SAK dan SIAK, tetapi masih ada daerah yang menerapkan penanganan SAK dan SIAK ini dibawah dinas yang lain walaupun jumlah hanya satu dua daerah saja. Untuk itu, perlu mendesak adanya standarisasi struktur organisasi penanganan SAK di daerah. Struktur organisasi yang menangani SAK dan SIAK, baik yang di pusat maupun di daerah, tidak akan berjalan jika tidak didukung oleh SDM yang berkualitas.

SDM TIK yang menangani SAK dan SIAK seyogianya disusun berdasarkan hierarki kelambagaan yang mengelola SAK dan SIAK tersebut. Setiap tingkatan pada hierarki tersebut memerlukan kompetensi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, perlu ditetapkan SDM yang sesuai dengan kompetensinya pada setiap unit. SDM ini secara terus-menerus perlu di tingkatkan kapasitasnya, baik pengetahuan maupun keterampilannya dalam menangani SAK dan SIAK. Pelatihan untuk SDM ini perlu dilakukan secara berskala, terjadwal dan berkelanjutan. Terutama untuk SDM TIK yang sudah terlatih, mereka tidak boleh dimutasikan kebidang non-TIK, tetapi perlu disediakan jenjang karier yang jelas. Hal ini perlu dilakukan agar SDM TIK tersebut tetap dapat merespon perubahan-perubahan infrastruktur TIK yang sangat pesat.

Aplikasi SIAK itu tersendiri terdiri dari dua modul utama, yaitu modul pendaftaran penduduk dan modul pencatatan sipil. Setiap modul utama dibagi lagi atas berbagai sub modul yang digunakan, baik dipusat maupun di daerah. Oleh karena itu, perlu di review sejauh mana aplikasi SIAK diterapkan, baik yang di pusat maupun yang di daerah. Seharusnya, aplikasi SIAK tersebut mengalir mulai dari titik layanan kependudukan (kelurahan/kecamatan), lanjut ke kabupaten/kota, dan pusat serta ke provinsi. Secara proporsional dan terdistribusi, aliran aplikasi SIAK ini harus di sesuaikan dengan kondisi di daerah masing-masing. Bersamaan dengan aplikasi SIAK tersebut, maka *database* kependudukan dapat di konsolidasikan secara bertingkat.

NIK dan KTP elektronik adalah salah satu informasi identitas dan dokumen kependudukan sebagai keluaran dari aplikasi SIAK yang sangat penting dan berdampak luas. NIK, selain sebagai identitas penduduk Indonesia, juga merupakan kunci dalam melakukan verifikasi dan validasi data jati diri seseorang guna mendukung pelayanan publik ketunggulan NIK secara efektif dimulai sejak diterbitkannya kepada seorang menggunakan SIAK. Pada saat ini untuk menjamin aotentitas NIK hanya digunakan dua faktor, yaitu faktor yang

menyatakan *sesuatu yang anda ketahui* dan faktor yang menyatakan *sesuatu yang anda miliki*. Dalam rangka memastikan ketunggalan NIK, dilakukan konsolidasi *antar-database* kabupaten/kota, provinsi, dan nasional secara tersambung (*on-line*). Pada saat bersamaan, setiap *database* kependudukan kabupaten/kota dimutakhirkan untuk membersihkan unsur yang menjadikan NIK ganda, NIK yang tidak merepresentasikan pemiliknya, satu NIK dimiliki dua orang, seterusnya dengan mekanisme konsolidasi secara *on-line* dan verifikasi 1 : N.

Dalam rangka meningkatkan ketunggalannya NIK seseorang, maka seluruh penduduk wajib KTP akan direkam *karakteristik yang melekat pada diri seseorang* berupa biometri seluruh sidik jari dan di simpan dalam *server database sidik jari* (AFIS). Sistem *database* ini terintegrasi *database* SIAK sehingga seseorang wajib KTP dapat diakses biodata NIK dan biometri sidik jarinya. KTP elektronik sebagai KTP ber-*chip* yang memuat biodata, sidik jari, dan foto penduduk bersangkutan adalah upaya untuk meniadakan kepemilikan KTP palsu dan KTP ganda, serta kurangnya kepercayaan terhadap KTP bersifat nasional. Untuk itu, secara bertahap akan diterapkan KTP berbasis NIK secara Nasional.

Infrastruktur TIK untuk mendukung kegiatan SAK dan SIAK akan terus berkembang dan berubah. Seringkali perkembangan dan perubahan TIK ini tidak sejalan dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki pegawai. Dapat saja pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki sekarang tidak berlaku lagi bagi TIK masa yang akan datang. Agar terjadi kesinambungan dalam penanganan infrastruktur TIK, maka perlu disusun suatu kelola TIK (*IT Governance*) untuk SAK dan SIAK. Tata kelola TIK ini menjamin TIK yang digunakan untuk SAK dan SIAK memberikan manfaat yang optimal bagi unit-unit yang menangani administrasi kependudukan. Untuk mendapat manfaat yang optimal, infrastruktur TIK, seperti *server*, jaringan internet, dan komputer pribadi perlu di-*upgrade* secara berskala dan berkelanjutan. Perlu dipertimbangkan untuk melakukan-*outsourcing* pengelolaan

infrastruktur TIK ini agar SDM TIK yang menangani SAK dan SIAK dapat lebih fokus pada masalah-masalah yang substansif. Oleh karena itu, perlu dijalin kerjasama antara Ditjen Adminduk yang penyedia jasa TIK, terutama untuk mendukung kegiatan aplikasi SIAK agar memberikan hasil yang optimal.

4.6 Permasalahan dan Tantangan

Kabupaten Kulon Progo memiliki Total Fertility Rate (TFR) tertinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta dan migrasi yang cenderung meningkat. Persoalan besar yang sampai saat ini masih penting untuk dikaji lebih jauh adalah mobilitas internal, dalam arti angka migrasi neto yang tinggi. Posisi dan peran Kulon Progo yang ke depannya sangat strategis sebagai tempat pengembangan industri, berwisata, dan bermukim akan menyebabkan migrasi masuk pesat. Penduduk terkonsentrasi di kecamatan-kecamatan di dataran rendah terutama yang berdekatan dengan Bandara NYIA. Arah urbanisasi terkesan tidak merata, cenderung ke daerah-daerah yang sudah padat penduduknya. Meskipun demikian karena daerah padat sudah tidak mampu lagi menampung, arah permukiman di Kabupaten Kulon Progo mulai merambat ke daerah-daerah pinggiran. Diproyeksikan jika tidak diantisipasi dan diperhatikan, maka pola persebaran penduduk di Kabupaten Kulon Progo akan tidak terpola dan sulit diatur.

Bonus demografi terjadi apabila mayoritas penduduk Indonesia adalah usia angkatan kerja. Penduduk yang berada di usia angkatan kerja tersebut dapat menjadi potensi bagi Indonesia menjadi negara maju, tetapi juga dapat menjadi bumerang apabila kualitas sumber daya manusia usia produktif itu rendah. Modal untuk pembangunan adalah kualitas SDM. Salah satu tanda bonus demografi adalah angka ketergantungan dibawah 50 persen, artinya

satu orang penduduk non produktif ditanggung 1-2 orang penduduk usia produktif. Berdasarkan kelompok umur, penduduk dapat dibedakan menjadi tiga kategori, yaitu muda (0-14 tahun), menengah (15-64 tahun). Dan tua (65 tahun ke atas).

Pengelompokan penduduk yang terkait dengan produktivitas secara ekonomi dapat diklasifikasikan menjadi penduduk non produktif dan penduduk usia produktif. Penduduk non produktif terdiri dari penduduk yang berumur 0-14 tahun dan penduduk yang berumur 65 tahun. Kelompok penduduk usia produktif adalah penduduk yang berumur 15-64 tahun.

Berdasarkan hasil proyeksi penduduk diketahui angka rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Kulon Progo adalah sebesar 49,7 persen pada 2015. Angka tersebut menunjukkan bahwa 100 orang penduduk kelompok umur 15-64 tahun yang produktif menanggung sekitar 49 - 50 orang penduduk tidak produktif. Pada 2020 rasio ketergantungan tersebut menurun menjadi 47 persen, kemudian menjadi 46 persen tahun 2025. Rasio ketergantungan tersebut menunjukkan penurunan lagi menjadi 45 persen pada tahun 2030 dan tetap menjadi 45 persen tahun 2035.

Beban ketergantungan merupakan indikator yang tidak hanya ditentukan oleh jumlah penduduk muda, tetapi juga ditentukan oleh jumlah penduduk tua. Peningkatan derajat kesehatan yang sangat memadai pada titik tertentu akan berdampak pada membersarnya kelompok ini yang secara langsung akan meningkatkan angka beban ketergantungan penduduk usia produktif. Dengan kata lain, seiring dengan peralihan waktu beban ketergantungan tidak ditentukan oleh besarnya angka kelahiran, tetapi dengan meningkatkan derajat kesehatan.

Lansia yang panjang umur, sehat, dan tidak tergantung merupakan langkah yang harus dipersiapkan untuk menjemput “penduduk tua”. Penurunan kualitas fisik dan psikis lansia dapat disikapi secara bijak sehingga kelemahan yang ada dapat dimanfaatkan menjadi suatu modal pembangunan,

Hasil proyeksi menunjukkan persentase lansia di Kulon Progo tahun 2015 mencapai 12,2 persen dan tahun 2020 sebesar 12,81 persen. Pada 2025 kembali meningkat menjadi 13,82 persen. Perkembangan berikutnya menunjukkan kenaikan yang semakin tinggi, yakni mencapai 15,27 persen tahun 2030 dan 16,91 persen tahun 2035. Jadi dalam rentang waktu 20 tahun kedepan, jumlah penduduk lansia di Kulon Progo akan bertambah sebesar 4,7 persen. Isu lansia di Kulon Progo hendaknya memerlukan perhatian lebih. Hal ini dikarenakan jumlah penduduk lanjut usia berimplikasi pada berbagai bidang : sosial, ekonomi, dan kesehatan.

Aspek lain yang perlu diperhatikan dalam membicarakan bonus demografi adalah kualitas penduduk usia “dewasa” atau produktif. Menyiapkan generasi muda yang berkualitas dari aspek pendidikan dan kesehatan merupakan modal utama untuk membekali generasi muda melakukan kompetisi mendapatkan pasar kerja yang lebih berkualitas. Pengangguran terdidik dan peningkatan angkatan kerja perempuan di satu sisi sedangkan di sisi yang lain lapangan pekerjaan yang semakin terbatas merupakan tantangan tersendiri di bidang ketenaga kerjaan. Satu hal yang perlu disikapi adalah besarnya jumlah penduduk usia kerja yang kemudian disebut dengan bonus demografi benar-benar merupakan *jendela kesempatan dibidang ekonomi*, bukan sebaliknya sebagai petaka yang menyertai ledakan penduduk usia kerja ini.

Pencapaian bonus demografi sangat tergantung kepada usaha pengaturan fertilitas. Memperhatikan kecenderungan perubahan angka fertiltas, baik dari hasil sensus penduduk maupun SDKI, tantangan terbesar dibidang kuantitas penduduk adalah tetap mempertahankan angka fertilitas pada kisaran angka replacement level yaitu TFR sama dengan 2,1 per perempuan atau kurang sedikit dari batas tersebut. Tantangan kedepan adalah mempertahankan TFR pada level rendah dan mewujudkan angka TFR pada spesifik angka 2,1 pada tahun 2035.

BAB V

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

5.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk

Pengendalian kuantitas penduduk berkaitan dengan penetapan jumlah, struktur, komposisi, dan pertumbuhan penduduk yang ideal melalui upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian yang diarahkan untuk mewujudkan keseimbangan antara jumlah, struktur, dan komposisi penduduk yang serasi, selaras dan seimbang dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan. Pengendalian pertumbuhan dan kuantitas penduduk diarahkan untuk menciptakan keseimbangan antara kuantitas penduduk dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan

Pengendalian kuantitas penduduk dilakukan melalui pengaturan dua komponen utama kependudukan, yaitu : pengaturan fertilitas dan penurunan mortalitas. Pengaturan fertilitas dilakukan melalui Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) yang mencakup :

1. Usia ideal perkawinan
2. Usia ideal melahirkan
3. Jarak ideal melahirkan
4. Jumlah ideal anak yang dilahirkan

Kebijakan pengaturan fertilitas melalui Program KKBPK pada hakekatnya dilaksanakan untuk membantu pasangan suami istri mengambil keputusan dan memenuhi hak-hak reproduksi yang berkaitan dengan hal berikut :

1. Pengaturan kehamilan yang diinginkan

2. Penurunan angka kematian bayi dan angka kematian ibu
3. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan
4. Peningkatan kesertaan KB pria
5. Promosi pemanfaatan air susu ibu

Kebijakan pengaturan fertilitas melalui program KKBPK di daerah dilakukan sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan, Advokasi dan KIE keluarga berencana
2. Peningkatan capaian peserta aktif KB dan penurunan angka Unmetneed melalui berbagai pendekatan.
3. Peningkatan kerja sama dengan berbagai stake holder untuk peningkatan pelayanan dan capaian kesertaan.
4. Peningkatan pelayanan KB untuk jenis Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
5. Peningkatan kinerja Kampung KB dengan optimalisasi kerja sama lintas sektor

Penurunan angka kematian bertujuan untuk mewujudkan penduduk seimbangan dan berkualitas pada seluruh dimensinya. Penurunan angka kematian ini diprioritaskan pada upaya:

1. Penurunan angka kematian ibu hamil
2. Penurunan angka kematian ibu melahirkan
3. Penurunan angka kematian pasca melahirkan
4. Penurunan angka kematian bayi dan anak

Upaya penurunan angka kematian diselenggarakan terpadu dengan masyarakat melalui upaya-upaya proaktif, preventif dan rehabilitatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan norma agama. Disamping itu, upaya penurunan kematian difokuskan pada :

1. Kesamaan hak reproduksi pasangan suami istri (pasutri)
2. Keseimbangan akses, kualitas KIE, dan pelayanan

3. Pencegahan dan pengurangan risiko kesakitan dan kematian
4. Partisipasi aktif keluarga dan masyarakat

Untuk mencapai tahap yang diinginkan, yaitu pertumbuhan penduduk yang terkendali dan pencapaian *windows of opportunity*, maka pengendalian angka kelahiran sangat penting. Strategi yang dikembangkan agar pengendalian kuantitas dapat berhasil adalah dengan cara optimalisasi KIE, kerja sama sinergis lintas sektor, kemitraan, dan peningkatan kualitas SDM pelaku KKBPK serta pemanfaatan teknologi informasi dalam percepatan dan penguatan tata kelola program. Selain itu, strategi juga diarahkan pada implementasi program KKBPK untuk pengentasan kemiskinan.

Sejalan dengan program penanggulangan kemiskinan, pelaksanaan program KKBPK difokuskan pada masyarakat miskin dengan cara memberikan subsidi pelayanan kesehatan reproduksi dan KB. Dalam pelaksanaannya, strategi ini perlu memerhatikan kondisi sosial, budaya, demografi dan ekonomi kelompok sasaran.

5.2 Peningkatan kualitas penduduk

Kualitas Penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik yang meliputi derajat kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan, kemandirian, kecerdasan, sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, berkepribadian, berkebangsaan, dan hidup layak. Peningkatan kualitas penduduk berkaitan dengan upaya menjadikan penduduk sebagai sumber daya manusia melalui pembangunan keimanan dan ketaqwaan kepada tuhan Yang Maha Esa, pengembangan kualitas fisik, dan pengembangan kualitas non fisik untuk mewujudkan produktifitas dan ketahanan penduduk, khususnya terhadap kelompok anak, remaja, dewasa, usia lanjut, wanita, penduduk dan masyarakat rentan.

Peningkatan kualitas penduduk dilakukan mencakup bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan sosial budaya.

Beberapa kebijakan pokok untuk meningkatkan kualitas penduduk adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Kualitas Pendidikan

- a. Meningkatkan kualitas masyarakat dalam hal : karakter, iman dan taqwa, kompetensi melalui pendidikan formal, non formal maupun informal.
- b. Mewujudkan wajib belajar 12 tahun dan mengimplementasikan pendidikan karakter.
- c. Mengintegrasikan pendidikan karakter dalam kurikulum muatan lokal dan meningkatkan peran masyarakat dalam pendidikan karakter
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan tenaga kependidikan;
- e. Mengurangi kesenjangan pendidikan menurut jenis kelamin melalui peningkatan akses perempuan untuk memperoleh pendidikan.
- f. Meningkatkan prestasi olahraga dan generasi muda.

2. Peningkatan Kualitas Kesehatan

- a. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam rangka menurunkan angka kematian dan meningkatkan angka harapan hidup.
- b. Meningkatkan upaya promotif, preventif dan kuratif dan rehabilitatif kesehatan Masyarakat
- c. Peningkatan promosi kesehatan, kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Peningkatan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- e. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya kesehatan
- f. Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan dasar dan rujukan

3. Peningkatan Kualitas Ekonomi

- a. Peningkatan status ekonomi penduduk melalui perluasan kesempatan kerja dan pengurangan pengangguran untuk menurunkan angka kemiskinan.
- b. Peningkatan pemberdayaan masyarakat dan berbagai urusan pembangunan dengan semangat Bela Beli Kulon Progo;
- c. Meningkatkan kemajuan ekonomi daerah melalui program strategis dalam berbagai urusan pembangunan dengan pemanfaatan potensi lokal dan inovasi menuju kamandirian daerah

4. Peningkatan Kualitas Sosial Budaya

- a. Peningkatkan kapasitas tenaga kerja, pengembangan kesempatan kerja dan perlindungan ketenagakerjaan;
- b. Peningkatan upaya perlindungan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan pengarusutamaan gender.
- c. Peningkatan kapasitas PUG dan perlindungan perempuan dan anak
- d. Peningkatan partisipasi dan penguatan kelembagaan masyarakat

Strategi peningkatan kualitas penduduk merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan kependudukan. Disamping itu, strategi peningkatan kualitas penduduk merupakan bagian integral dari strategi pengendalian kualitas penduduk, pembangunan keluarga, dan pengarahannya mobilitas penduduk.

Penduduk merupakan pelaku, pelaksana, dan penikmat pembangunan. Dengan kualitas tinggi, penduduk akan lebih banyak berperan sebagai pelaku dan pelaksana pembangunan. Selain itu, pembangunan tidak hanya bergantung pada sumber daya alam dan teknologi, tetapi justru lebih bergantung pada kualitas penduduknya. Dengan tersedianya sumber daya manusia yang memadai dalam arti kualitas dan kuantitas, maka tantangan di

masa yang akan datang dapat diatasi dengan baik. Kualitas sumber daya manusia yang ada sekarang masih perlu ditingkatkan agar tantangan tersebut diatasi dengan baik.

Pembangunan kualitas penduduk ditentukan oleh tiga hal : Pembangunan ekonomi, pembangunan kesehatan, dan pendidikan. Oleh karena itu, kondisi yang ingin dicapai dalam peningkatan kualitas penduduk tahun 2035 adalah penduduk yang sehat, cerdas, produktif dan berakhlak mulia serta berkarakter. Kualitas penduduk adalah kondisi penduduk dalam aspek fisik dan nonfisik meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan, produktivitas, tingkat sosial, ketahanan kemandirian dan kecerdasan. Hal itu dianggap sebagai ukuran dasar untuk mengembangkan kemampuan dan menikmati kehidupan sebagai manusia yang bertakwa, berbudaya, bekepribadian, kebangsaan, dan hidup layak. Penduduk yang sehat tidak hanya berumur panjang sejalan dengan bertambahnya usia harapan hidup, tetapi juga produktif, cerdas dan berdaya asing. Penduduk dengan kualitas seperti ini diharapkan dapat mengatasi arus pasar global yang semakin menguat.

Dengan memperhatikan unsur-unsur tersebut, maka strategi peningkatan kualitas penduduk harus fokus pada tiga dimensi, yaitu kesehatan, pendidikan dan ekonomi. Strategi di bidang kesehatan dilakukan menurunkan angka kematian bayi dan anak serta kematian maternal. Sebagaimana diketahui bahwa saat ini telah terjadi pergeseran pola penyakit dari penyakit infeksi pada penyakit kronis dan degeneratif. Untuk itu, strategi utama yang harus dilakukan adalah melakukan pencegahan dan treatment penyakit infeksi, khususnya pada bayi dan anak-anak. Disamping itu, sejalan dengan meningkatnya penyakit kronis dan degeneratif sebagai penyebab kematian orang dewasa, maka alokasi sumber daya kesehatan harus diarahkan untuk pencegahan dan treatment penyakit tersebut. Akan tetapi, dengan memperhatikan diversitas kondisi kesehatan antardaerah, terutama dalam hal penyakit, maka setiap strategi, sekali lagi, tidak dapat bersifat homogen atau tunggal, tetapi harus merespons kondisi spesifik setiap daerah.

Sementara itu, strategi penurunan kematian maternal sangat erat kaitannya dengan program KB sehingga strategi yang di jalankan untuk pelaksanaan program KB juga akan memberikan kontribusi terhadap penurunan angka kematian maternal. Hal tersebut harus ditopang dengan pengembangan pelayanan prenatal maupun antenatal.

Dari sisi pendidikan, strategi yang harus dilakukan adalah memberikan akses sebesar-besarnya kepada kelompok renta, khususnya penduduk miskin, untuk memperoleh pendidikan. Penurunan gender gap dalam hal akses terhadap pelayanan pendidikan juga penting sebagai prioritas, khususnya untuk mengatasi masalah di berbagai daerah yang masih lebar kesenjangan pendidikan antara laki-laki dengan perempuannya. Karena di berbagai provinsi angka melek huruf masih rendah, maka untuk pendidikan nonformal maupun informal perlu memperoleh prioritas.

1.3 Pembangunan Keluarga

Sebagai batasan pemahaman dalam pengaturan kebijakan, keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Pembangunan keluarga adalah upaya mewujudkan keluarga berkualitas yang hidup dalam lingkungan yang sehat. Keluarga berkualitas yang dimaksud adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Arah kebijakan di daerah dalam pembangunan keluarga adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan advokasi dan KIE dalam program KKBPK dengan optimalisasi peran dan fungsi keluarga;
2. Peningkatan layanan advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR) baik melalui jalur sekolah dan masyarakat.

3. Peningkatan ketahanan keluarga melalui Tribina dan pemberdayaan ekonomi keluarga
4. Peningkatan kerja sama lintas sektor dalam penanganan permasalahan keluarga, permasalahan remaja serta perlindungan anak dan perempuan.
5. Integrasi pembangunan keluarga dengan penerapan pendidikan karakter, pembinaan iman dan taqwa serta keagamaan keluarga.

Sasaran dari kebijakan pembangunan keluarga tersebut adalah seluruh keluarga yang terdiri dari keluarga dengan siklus keluarganya; keluarga yang memiliki potensi dan sumber kesejahteraan sosial; keluarga rentan secara ekonomi, sosial, lingkungan, maupun budaya; serta keluarga yang bermasalah secara ekonomi dan sosial psikologis.

Dalam upaya membangun keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, strategi yang disuguhkan adalah pembangunan keluarga melalui pendidikan etika, moral dan sosial budaya secara formal maupun informal. Pembangunan keluarga yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa mempunyai indikator keberhasilan yang dilihat dari hal berikut :

- a. Keluarga yang menjalankan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing
- b. Keluarga yang menaati nilai, norma, dan aturan agama
- c. Keluarga yang memelihara kerukunan antarumat beragama

Strategi untuk membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah dilakukan dengan hal berikut :

- a. Meningkatkan pelayanan lembaga penasehat perkawinan
- b. Meningkatkan peran kelembagaan keluarga
- c. Komitmen pemerintah indonesia yang hanya mengakui perkawinan antara laki-laki dan perempuan
- d. Perkawinan yang dilakukan menurut hukum agama dan negara
- e. Perkawinan yang mensyaratkan diketahui oleh keluarga dan masyarakat.

Indikator keberhasilan dalam membangun iklim berkeluarga berdasarkan perkawinan yang sah adalah :

- a. Keluarga dibangun dari perkawinan menurut hukum agama dan negara
- b. Keluarga yang dibangun dari perkawinan laki-laki dengan perempuan, bukan sesama jenis kelamin
- c. Keluarga dibangun dari perkawinan yang di ketahui oleh keluarga dan masyarakat
- d. Setiap perkawinan tercatat dilembaga yang berwenang dengan buktikan oleh kepemilikan akta nikah.

Beberapa strategi untuk membangun keluarga harmonis, sejahtera, sehat, maju, dan mandiri adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan ketahanan keluarga berwawasan gender berbasis kelembagaan lokal, strategi ini dijalankan melalui kegiatan konsultasi dan advokasi keluarga, pendamping keluarga rentan, pengembangan nilai keluarga dan keadilan gender, pembagian peran gender yang berkeadilan dan kesetaraan, serta optimalisasi fungsi keluarga menuju kesejahteraan dan ketahanan keluarga.
2. Pengembangan perilaku hidup sehat pada keluarga (sehat fisik/reproduksi, sehat psikologis, sehat sosial, dan sehat lingkungan)
3. Pendidikan dan pengasuhan anak agar berkarakter baik
4. Pengembangan ketahanan keluarga dan ketahanan pangan keluarga. Strategi ini dilaksanakan dengan pemanfaatan pekarangan dan dukungan sosial lingkungan.

Strategi yang digunakan adalah penyadaran melalui pendidikan, pembinaan, dan penyuluhan. Strategi ini dilakukan dengan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) keluarga, seperti penguatan kapasitas keluarga, pembangunan sebuah keluarga berketahanan sosial, pemilihan keluarga pionir, dan meningkatkan peran serta keluarga dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. Indikator keberhasilannya adalah keluarga yang berketahanan

sosial, berwawasan kedepan (menguasai iptek), serta berkontribusi kepada masyarakat, bangsa dan negara (berperan serta dalam kegiatan sosial kemasyarakatan).

Strategi yang dapat dilakukan adalah membangun keluarga yang mampu merencanakan sumber daya dengan pendamping manajemen sumberdaya keluarga. Kegiatan lainnya adalah dengan konsultasi perkawinan, pengasuhan anak, manajemen keuangan rumah tangga, manajemen stres, serta manajemen waktu dan pekerjaan keluarga. Indikator keberhasilan dari kegiatan ini adalah sebagai berikut :

1. Keluarga mempunyai perencanaan berkeluarga
2. Keluarga mempunyai perencanaan investasi anak, hal ini dapat dilihat dari tingkat partisipasi sekolah wajib belajar, tabungan/asuransi pendidikan anak, dan angka drop-out menurun
3. Keluarga mempunyai perencanaan keuangan, hal ini dapat diukur dari tabungan keluarga, partisipasi keluarga menabung di bank dan perencanaan membeli rumah.

5.4 Pengarahan Mobilitas Penduduk

Pengarahan mobilitas penduduk adalah upaya mengarahkan gerak keruangan penduduk agar serasi, selaras, dan seimbang dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Pengarahan mobilitas penduduk dilakukan dengan upaya penataan persebaran penduduk sesuai dengan kebijakan tata ruang dan daya dukung alam dan lingkungan. Untuk itu kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk ini dilakukan untuk mendorong pembangunan daerah secara umum agar lebih adil, tertata, terintegrasi dengan bidang pembangunan yang lain serta sejahtera.

Ada beberapa arah mendasar dalam kebijakan ini, yaitu :

1. Menciptakan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

2. Mendorong adanya kemajuan daerah secara merata, berkeadilan dalam pembangunan daerah dalam aspek wilayah dan penduduk.
3. Menumbuhkan kondisi kondusif bagi terjadinya migrasi internal yang harmonis
4. Memberikan kemudahan, perlindungan, dan pembinaan terhadap para migran dan keluarganya
5. Memperluas kesempatan kerja produktif
6. Menurunkan angka kemiskinan dan mengatasi pengangguran
7. Meningkatkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia

Untuk mencapai tujuan tersebut, pengarahannya mobilitas penduduk perlu dilakukan mengupayakan peningkatan mobilitas non permanen dengan cara menyediakan berbagai fasilitas sosial, ekonomi, budaya, dan administrasi kependudukan. Untuk tercapainya tujuan-tujuan pengarahannya mobilitas penduduk tersebut, maka perlu sejak awal dipastikan bahwa regulasi daerah mendukung untuk hal itu. Beberapa peraturan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan tujuan itu adalah sebagai berikut :

- a. Kebijakan mobilitas penduduk non permanen
- b. Penataan persebaran penduduk melalui kerja sama antar daerah
- c. Pengarahannya mobilitas penduduk melalui pengembangan daerah penyangga
- d. Pedoman pengelolaan urbanisasi di perkotaan
- e. Pedoman pelayanan terhadap penduduk musiman serta tata cara pengumpulan data, analisis mobilitas, dan persebaran penduduk. Sementara itu, pada tataran perda, dibutuhkan adanya perda tentang kebijakan mobilitas penduduk.

5.5 Penataan Administrasi kependudukan

Sebagai batasan pemahaman konsep dalam pengaturan kebijakan, administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan

dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

- a. Memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen Penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh Penduduk;
- b. Memberikan perlindungan status hak sipil Penduduk;
- c. Menyediakan data dan informasi kependudukan secara nasional mengenai Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada berbagai tingkatan secara akurat, lengkap, mutakhir, dan mudah diakses sehingga menjadi acuan bagi perumusan kebijakan dan pembangunan pada umumnya;
- d. Mewujudkan tertib Administrasi Kependudukan secara nasional dan terpadu; dan
- e. Menyediakan data Penduduk yang menjadi rujukan dasar bagi sektor terkait dalam penyelenggaraan setiap kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Kebijakan penataan administrasi kependudukan di daerah dilakukan dengan cara :

1. Peningkatan kualitas layanan penerbitan dokumen kependudukan;
2. Peningkatan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan;
3. Penataan dan Pengelolaan database kependudukan untuk menunjang pengambilan keputusan strategis daerah;

Penataan dan pengelolaan data base kependudukan dilakukan dengan mengembangkan database kependudukan yang memiliki akurasi dan tingkat kepercayaan yang tinggi serta dikelola dalam suatu sistem yang integratif, mudah diakses oleh para pemangku kepentingan, serta menjadi bagian dari *Decision Support Sytem (DSS)*. Kondisi ini dicapai apabila didukung oleh penguatan kapasitas sumberdaya manusia yang memiliki kopetensi tinggi, insfrastuktur yang memadai, serta sistem kelembagaan yang kuat.

Update database kependudukan agar data kependudukan yang ada sesuai dengan kondisi nyatanya dilakukan secara reegular melalui pelayanan pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, dan pelayanan e-KTP secara regular juga. Terbangunnya database kependudukan berbasis NIK secara nasional akan memberikan banyak sekali keuntungan dari berbagai sektor pembangunan dan pelayanann publik. Database kependudukan melalui NIK diintegrasikan dengan sidik jari sebagai kunci akses sehingga data kependudukan terjamin validitasnya dan secara mudah diakses oleh berbagai pihak yang membutuhkan. Database kependudukan juga dapat digunakan untuk kepentingan pemilu dan pilkada, baik itu melalui data kependudukan yang telah di mutakhirkan dan diverifikasikan bimoterik program e-KTP.

Sedangkan penataan dan penerbitan dokumen kependudukan dilakukan untuk peningkatan kualitas pelayanan dan penataan dokumen kependudukan agar tertib, ada kepastian hukum, adil dan membawa manfaat atau multiplier terhadap sektor pembangunan yang lain. Karena dengan adanya penerbitan dokumen kependudukan sebagai produk layanan pemerintah, diharapkan dapat memberikan pemenuhan atas hak-hak administratif penduduk dalam pelayanan publik serta memberikan perlindungan tanpa ada perlakuan yang diskriminatif.

BAB VI

ROAD MAP PEMBANGUNAN KEPENDUDUKAN

Pembangunan kependudukan dan keluarga berkualitas merupakan langkah penting dalam mencapai pembangunan berkelanjutan. Hal ini diselenggarakan melalui pondasi pembangunan data kependudukan berbasis SIAK yang akurat, terpercaya dan terintegrasi. Berdasarkan ketersediaan data yang lengkap tersebut maka dilakukan pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga dan pengarahan mobilitas penduduk. Keberhasilan pembangunan kependudukan di Kabupaten Kulon Progo akan mendukung seluruh rangkaian pembangunan dalam mewujudkan penduduk yang sejahtera, berkarakter, berkualitas, berbudaya dan berdaya saing.

6.1 Pengendalian Kuantitas Penduduk

Road Map Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk di Kabupaten Kulon Progo ini mencakup kurun waktu 2018-2035 dengan periode lima tahunan. Roadmap dibuat untuk mengetahui sejauh mana sasaran-sasaran pengendalian kuantitas penduduk telah dapat dicapai, baik mencakup fertilitas maupun mortalitas. Dengan demikian, tujuan roadmap ini dapat berjalan secara sistematis dan terencana sehingga dapat diketahui sasaran-sasaran yang harus di capai pada setiap periode, serta kebijakan, strategi, dan program yang perlu dilakukan.

Tahun dasar yang dipergunakan dalam menyusun Grand Design Pengendalian Kuantitas Penduduk adalah tahun 2015, sesuai dengan data SIAK dan data pendukung lainnya. Perkiraan kondisi kependudukan terkait dengan indikator kuantitas dilakukan berdasarkan proyeksi penduduk.

Pada tahun 2015 sasaran yang hendak dicapai untuk berbagai indikator kependudukan adalah sebagai berikut :

Penduduk :

Total = 436.123 jiwa

Laju pertumbuhan = 1,9%

Fertilitas :

Total Fertility Rate (TFR) = 2,16 Anak per Wanita Usia Subur

Net Reproduction Rate (NRR) = 1

Crude Birth Rate (CBR) = 13,9 kelahiran per 1000 penduduk

Contraceptive Prevalence Rate (CPR) = 69,85%

Pada tahun 2020 sasaran yang hendak dicapai untuk berbagai indikator kependudukan adalah sebagai berikut :

Penduduk :

Total = 456.601 jiwa

Laju pertumbuhan = 1,6%

Fertilitas :

Total Fertility Rate (TFR) = 2,1 Anak per Wanita Usia Subur

Net Reproduction Rate (NRR) = 1

Crude Birth Rate (CBR) = 13,9 kelahiran per 1000 penduduk

Contraceptive Prevalence Rate (CPR) = 71,10%

Pada tahun 2025 sasaran yang hendak dicapai untuk berbagai indikator kependudukan adalah sebagai berikut :

Penduduk :

Total = 472.095 jiwa

Laju pertumbuhan = 1,5 %

Fertilitas :

Total Fertility Rate (TFR) = 2,03 Anak per Wanita Usia Subur

Net Reproduction Rate (NRR) = 1

Crude Birth Rate (CBR) = 13,8 kelahiran per 1000 penduduk

Contraceptive Prevalence Rate (CPR) = 72,32%

Pada tahun 2030 sasaran yang hendak dicapai untuk berbagai indikator kependudukan adalah sebagai berikut :

Penduduk :

Total = 488.374 jiwa

Laju pertumbuhan = 1,4 %

Fertilitas :

Total Fertility Rate (TFR) = 1,97 Anak per Wanita Usia Subur

Net Reproduction Rate (NRR) = .0,9

Crude Birth Rate (CBR) = 13,4 kelahiran per 1000 penduduk

Contraceptive Prevalence Rate (CPR) = 73,57%

Pada tahun 2035 sasaran yang hendak dicapai untuk berbagai indikator kependudukan adalah sebagai berikut :

Penduduk :

Total = 505.493 jiwa

Laju pertumbuhan = 0,9 %

Fertilitas :

Total Fertility Rate (TFR) = 1,91 Anak per Wanita Usia Subur

Net Reproduction Rate (NRR) = 0,9

Crude Birth Rate (CBR) = 12,7 kelahiran per 1000 penduduk

Contraceptive Prevalence Rate (CPR) = 75,00%

Tabel 6.1
Road Map Pengendalian Kuantitas Penduduk
Tahun 2018-2035

No	Sasaran	2015	2020	2025	2030	2035
1	Jumlah Penduduk	436.123	456.601	472.095	488.374	505.493
2	LPP	1,9	1,6	1,5	1,4	0,9
3	TFR	2,16	2,1	2,03	1,97	1,91
4	NRR	1	1	0,9	0,9	0,9
5	CBR	13,9	13,9	13,8	13,4	12,7
6	CPR	69,85	71,10	72,32	73,57	75,00

6.2 Peningkatan Kualitas penduduk

Sebagaimana tersebut didalam teori mutu modal manusia, bahwa kualitas manusia ditentukan oleh pendidikan dan kesehatan. Pendidikan dan kesehatan adalah faktor yang penting dalam mendukung produktivitas manusia. Oleh karena itu terkait dengan roadmap kualitas penduduk di kabupaten Kulon Progo, maka dikelompokkan dalam tiga indikator pokok yakni indikator pendidikan, indikator kesehatan, indikator ekonomi.

Road Map indikator pendidikan di Kabupaten Kulon Progo 2018-2035 tersaji pada Tabel 6.2 berikut ini :

Tabel 6.2
Roadmap Indikator Pendidikan
Tahun 2018-2035

No	Sasaran	2015	2020	2025	2030	2035
1	Angka melek Huruf (%)	92,80	99,19	100	100	100
2	Rata-rata lama sekolah (tahun)	8,40	8.80	8,99	9,04	9,09

3	Angka partisipasi sekolah pada tingkat pendidikan SMA dan sederajat (%)	58,73	63,74	68,79	73,80	77,89
4	Indeks pendidikan dalam IPM (%)	87,25	88,75	90,20	91,75	93,25

Road Map Indikator Kesehatan Tahun 2015-2035 tersaji pada Tabel 6.3 berikut ini :

Tabel 6.3
Roadmap Peningkatan Kualitas Kesehatan
Penduduk Tahun 2018-2035

No	Sasaran	2015	2020	2025	2030	2035
1	CDR	10,65	10,89	11,1	11,36	11,84
2	IMR	18,6	17,8	17,1	16,3	15,5
3	MMR	59,9	58,3	57,7	56,5	55,1
4	E (tahun)	75,01	75,04	75,66	75,97	76,30
5	Indeks kesehatan dalam IPM (%)	85,0	86,5	88,0	89,5	90,0

Adapun Roadmap Indikator Ekonomi Tahun 2015-2035 tersaji pada Tabel 6.4 berikut ini :

Tabel 6.4
Roadmap Peningkatan Kualitas Ekonomi
Penduduk Tahun 2018-2035

No	Sasaran	2015	2020	2025	2030	2035
1	Pendapatan rill perkapita	10,47	12,28	14,65	17,82	22,15
2	Persentase penduduk dibawah garis kemiskinan	14,48	13,23	11,54	9,16	7,77
3	Angka ketergantungan penduduk tidak produktif terhadap penduduk produktif	48	47	46	45	45
4	Indeks kesehatan dalam IPM (%)	85,0	86,5	88,0	89,5	90,0

6.3 Pembangunan Keluarga

Pembangunan keluarga dilakukan untuk mencapai kondisi keluarga yang harmonis, sejahtera, dan damai yang siap menghadapi perubahan-perubahan yang sangat cepat.

Ketahanan keluarga diharapkan dapat menjadi landasan bagi kelangsungan berkehidupan yang aman, damai, dan sejahtera. Adapun kegiatan untuk setiap periode adalah sebagai berikut:

Tabel 6.5
Road Map Pembangunan Keluarga Tahun 2018-2035

No	Sasaran	2015	2020	2025	2030	2035
1	Cakupan pembinaan terhadap kelompok Tribina	90	93	95	98	100
2	Cakupan pembinaan terhadap PIKR	94	98	100	100	100
3	Persentase angka perceraian	16,39	12,72	10,50	8,34	6,22
4	Indek Ketahanan keluarga	56,88	60,83	63,97	67,01	70,00
5	Cakupan pelayanan advokasi dan KIE KKBPK	75	80	85	90	95
6	Cakupan pembinaan Klinik Konsultasi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	20	35	50	65	80

6.4 Pengarahan mobilitas Penduduk

Merujuk pada UU No. 52 Tahun 2009 pasal 33 ayat 1, pengarahannya mobilitas penduduk bertujuan untuk tercapainya persebaran penduduk optimal dan didasarkan pada keseimbangan jumlah penduduk dengan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan. Mobilitas penduduk meliputi mobilitas internal dan internasional. Pasal 16A PP No. 57 Tahun 2009 menegaskan bahwa mobilitas penduduk dilaksanakan secara permanen dan/atau non permanen. Mobilitas penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi mobilitas penduduk dalam kabupaten/kota, mobilitas penduduk antar kabupaten/kota dalam provinsi, dan mobilitas penduduk antar kabupaten/kota antar provinsi. Pasal 16B menjelaskan bahwa

mobilitas sebagaimana dimaksud dalam asal 16A dapat dilakukan atas kemauan sendiri, fasilitas pemerintah, dan/atau fasilitas pemerintahan daerah.

Pasal 16J menegaskan dalam penyelenggaraan pengarahannya mobilitas penduduk, pemerintah daerah provinsi melakukan pengumpulan dan analisis data-data mobilitas/persebaran penduduk sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah; pengembangan sistem informasi kesempatan kerja, peluang usaha, dan pasar kerja serta kondisi daerah tujuan; pengembangan sistem database dan penertiban pelaksanaan pengumpulan /laporan, pengolahan, analisis data dan informasi yang berkaitan dengan mobilitas penduduk; sosialisasi dan advokasi mengenai kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk pada instansi terkait; komunikasi, informasi dan edukasi mengenai kebijakan dan pengelolaan pengarahannya mobilitas penduduk kepada masyarakat; pembinaan dan fasilitasi pengarahannya mobilitas penduduk pada seluruh instansi terkait; pelaporan data statistik mobilitas penduduk; pemantauan dan evaluasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pengarahannya mobilitas penduduk; pengendalian dampak mobilitas penduduk terhadap pembangunan dan lingkungan.

Sebagai arahan kebijakan, berikut adalah Pokok-Pokok Road Map Pengarahannya Mobilitas Penduduk Kabupaten Kulon Progo 2018-2035

Tabel 6.6
Road Map Pengarahannya Mobilitas Penduduk Tahun 2018-2035

No	Sasaran	2015	2020	2025	2030	2035
1	Tingkat pengangguran terbuka	3,72	2,71	2,55	2,42	2,35
2	Tingkat kesempatan kerja	96,28	96,50	96,87	97,01	97,22
3	Komposisi Penduduk Desa Kota:					
	- Desa	75,63	73,47	71,31	69,15	66,99
	- Kota	24,37	26,53	28,69	30,85	33,01

6.5 Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan

Pada prinsipnya Road Map pembangunan data dan informasi kependudukan dibagi menjadi lima periode. Setiap periode merupakan penahapan yang sangat terkait dengan pencapaian tujuan dari pengembangan data dan informasi kependudukan, yaitu menciptakan suatu sistem yang terintegrasi, mudah diakses, dan menjadi bagian dari *Decision Support System* (DDS).

Sebagai arahan kebijakan, berikut adalah Pokok-Pokok Road Map Pembangunan Data dan Informasi Kependudukan Tahun 2015-2035.

Tabel 6.7
Road Map Pembangunan Data Dan Informasi Kependudukan
Tahun 2018-2035

No	Sasaran	2015	2020	2025	2030	2035
1	Jumlah Penduduk	436.123 orang	456.601 orang	472.095 orang	488.374 orang	505.493 orang
2	Cakupan penerbitan Akta Kelahiran	94,32 %	95,60 %	96,75 %	97,80 %	98,25 %
3	Cakupan penerbitan Akta Kematian	49,51 %	50,25 %	51,50 %	52,30 %	53,60 %
4	Cakupan kepemilikan KIA	0%	67,65 %	87,67 %	96,24 %	98,25 %
5	Cakupan layanan pemanfaatan data base kependudukan dalam pengambilan keputusan publik	11,81 %	45,67 %	77,16 %	86,61 %	100 %
6	Cakupan penerbitan Kartu Keluarga	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
7	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	96 %	97 %	98 %	99 %	99 %

BAB VII

PENUTUP

Penduduk adalah titik sentral pembangunan, karena di samping sebagai obyek (penerima) hasil pembangunan, penduduk sekaligus sebagai subyek (pelaku) atau *agent of change* pembangunan. Oleh karenanya, pembangunan harus berfokus atau berorientasi pada manusia dan bernafaskan kependudukan. Selain itu, arah kebijakan pembangunan harus memperhatikan nilai berkelanjutan (*sustainable development*), yaitu kebijakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk saat ini, dan sekaligus juga memperhatikan kesejahteraan penduduk di masa sekarang.

Berdasarkan *review* pembahasan sebelumnya, tantangan utama persoalan kependudukan di Kabupaten Kulon Progo adalah, masih tingginya angka TFR dan laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, namun belum didukung oleh tingkat kesejahteraan masyarakat dari sisi ekonomi secara memadai, yang tercermin dengan masih tingginya angka kemiskinan. Terhadap permasalahan ini, maka potensi bonus demografi harus dijadikan sebagai jendela kesempatan untuk mengatasi permasalahan dengan upaya peningkatan kualitas & produktivitas penduduk dan perluasan lapangan kerja agar memperoleh manfaat besar guna peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kunci utama untuk mewujudkan hal itu terletak pada kualitas penduduk sebagai modal dasar pembangunan. Oleh karena itu, visi Grand Design Pembangunan Kependudukan di Kabupaten Kulon Progo diarahkan terwujudnya penduduk yang berkualitas sebagai modal dasar dalam pembangunan untuk tercapainya masyarakat Kulon Progo yang sejahtera, berkarakter, berkualitas, berbudaya, berdaya saing berlandaskan iman dan taqwa.

Terwujudnya penduduk yang berkualitas ini tentu harus ditopang oleh upaya yang terarah, terintegrasi dan terencana hingga tahun 2035 melalui komponen pengendalian kuantitas, peningkatan kualitas, pembangunan keluarga, pengarahannya mobilitas, dan pembangunan basis data kependudukan yang valid dan akurat.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS. 2014. *Proyeksi Penduduk Kabupaten Kulon Progo Tahun 2010-2020*. Wates: BPS Kabupaten Kulon Progo
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo. 2017. *Proyeksi Penduduk Kabupaten Kulon Progo 2013-2035*. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kulon Progo.
- Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo. 2017. *Profil Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo 2016, Peluang dan Tantangan*. Kulon Progo: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kulon Progo
- Everett S. Lee. 2000. *Teori Migrasi*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada
- Faturrohmah dan Agus Dwiyanto. 2001. *Reorientasi Kebijakan Kependudukan*. Yogyakarta: Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada.
- Iskandar, I. 1977. *Demografi Teknik*. Jakarta: Lembaga Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia
- Peraturan Pemerintah No 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Kependudukan
- Peraturan Presiden No 15 Tahun 2014 tentang Grand Design Pembangunan Kependudukan
- Perwakilan BKKBN DIY. 2015. *Profil Kependudukan dan Pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta*. Yogyakarta: Perwakilan BKKBN DIY.
- Tukiran dkk. 2002. *Mobilitas Penduduk Indonesia, Tinjauan Lintas Disiplin*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan Universitas Gadjah Mada.
- Tukiran. 2010. *Kependudukan*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Undang-Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga